

346.0486

TOR

P

C1

PERLINDUNGAN HAK PATEN DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL ASING DI INDONESIA

Tesis

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas
dan Memenuhi Syarat-syarat Mencapai
Gelar Magister Kenotariatan



Oleh
Agustinus Andy Toryanto
B4B001221

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2003

PENGESAHAN:

**PERLINDUNGAN HAK PATEN DALAM RANGKA
PENANAMAN MODAL ASING DI INDONESIA**

Disusun oleh :
Agustinus Andy Toryanto
B4B001221

TELAH DIUJIKAN DAN DITERIMA DIHADAPAN TIM PENGUJI
TANGGAL 18 NOVEMBER 2003.

Pembimbing:

Ketua Program:



Maringan Lumban Raja S.H., M.S.



Prof. IGN. Sugangga S.H.

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2003

UPT-PUSTAK-UNDIP	
No. Daft:	2400/T /mna/e
Tgl.	08/3 04

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis ini adalah hasil pekerjaan saya sendiri dan didalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum/tidak diterbitkan ,sumbernya dijelaskan didalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, November 2003

Penulis :

Agustinus Andy Toryanto

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Allah Tuhan Semesta Alam atas segala rahmat dan karunia-Nya , penulis dapat menyelesaikan tesis ini.

Tesis ini berjudul : " Perlindungan Hak Paten Dalam Rangka PMA di Indonesia ", dibuat sebagai syarat penyelesaian studi pada Pasca- Sarjana Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang

Penulis menyadari bahwa penyelesaian tesis ini adalah karena dorongan ,bimbingan dan bantuan dari banyak pihak . Untuk itu sudah selayaknya jika pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Yth Bapak Prof. IGN. Sugangga S.H. selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang
2. Yth Bapak Maringan Lumban Raja S.H,M.S. selaku Pembimbing yang telah memberikan banyak masukan dan bimbingan .
3. Yth Ibu Etti S. Soehardo , S.H., M.S. yang telah banyak memberikan bimbingan.
4. Yth Bapak Budi Santoso , S.H., M.S. yang telah banyak memberikan bimbingan.

5. Yth Bapak Ery Agus Priyono , S.H. , Msi. yang telah banyak memberi bimbingan.
6. Bapak dan ibu di lingkungan Direktorat Jendral Haki.
7. Bapak dan ibu di lingkungan Departemen Kehakiman dan HAM .
8. Rekan -rekan dan pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Pada akhirnya penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini masih banyak kekurangan yang disebabkan oleh keterbatasan kemampuan penulis , untuk itu kritik dan saran dari pembaca akan diterima dengan senang hati.

Semarang , November 2003

Penulis

Agustinus Andy Toryanto, S.H.

ABSTRAKSI

Indonesia telah melaksanakan ketentuan TRIPs pada pengaturan Paten melalui Undang-undang No. 7 tahun 1994 yang berlaku sejak tanggal 1 Januari 2000 . Berdasarkan ketentuan TRIPs semua anggota harus menyesuaikan standar minimum perlindungan dan penegakan hukum yang ditetapkan dalam TRIPs. Dalam kebijakan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia , pada tahun 1997 telah direvisi Undang-Undang Hak Paten yang disempurnakan kembali melalui UU nomor 14 tahun 2001 tentang Hak Paten .

Indonesia sangat membutuhkan Modal Asing di dalam membangun perekonomian yang beberapa lama ini telah hancur . Berbagai kepentingan asing selaku investor yang akan menanamkan modalnya ke Indonesia telah diatur dengan UU nomor 1 tahun 1967 dan peraturan pelaksanaannya sangat dibutuhkan di dalam menarik modal asing datang ke Indonesia selain berupa devisa juga dapat berupa Paten yang di bawa oleh Penanaman Modal asing

Permasalahan yang menjadi pembahasan adalah bagaimana keterkaitan antara perlindungan Hak Paten dengan kegiatan Penanaman Modal Asing di Indonesia dan hambatan-hambatan apakah yang timbul dalam perlindungan

Hak Paten dalam rangka Penanaman Modal Asing serta langkah-langkah apakah yang harus ditempuh di bidang perlindungan Hak Paten dalam rangka menunjang Penanaman Modal Asing di Indonesia .

Berdasarkan data yang dikumpulkan dan pendapat dari para ahli maka dapat disampaikan keterkaitan yang erat antara perlindungan Hak Paten dengan PMA dan hambatan-hambatan yang timbul dalam perlindungan Hak Paten dalam rangka Penanaman Modal Asing lebih didominasi oleh Penegakan hukum yang kurang memadai serta perlunya penyempurnaan UU Paten maupun UU PMA yang *Up to date* dengan memperhatikan kepentingan nasional selaras dengan pelaksanaan globalisasi sehingga Perlindungan Hak Paten akan menunjang pertumbuhan PMA yang secara ekonomis sangat diperlukan dalam pembangunan nasional .

Abstract

Indonesia has implemented the provision of the TRIPs Agreement regarding Law no. 7 year 1994, which came into effect on January 2000. Based on TRIPs Agreement, all country members should conform with the minimum standar is requirement on protection and law enforcement as prscribed in TRIPs Agreements. On the intellectual property policy, in the year 1997, Indonesia revised Law of Patent and re-amended with law no. 14 year 2001.

Indonesia need Foreign Capital urgently for rebuilt the economic which has been disaster a view years ago. Many tendencies of Foreign as the investors which will invest their capital to Indonesia already regulated with Law No. 1 year 1967 and other operational regulations are needed for atractiving Foreign Capital come to Indonesia through Devisa also can through Paten which are carried by the Investor.

The problems which are disscused : How is the relevancy between Law Enforcement of Paten and with the activities of Foreign Invesment in Indonesia and the barriers can caused in Law Enforcement of Paten at the Frame Foreign Invesment, also What stepss must be done in the frame to increase the foreign Invesment.

According with the data which are collected and the opinions of the experts can be say that there is very tight relevancy between the Law enforcement of Patent and foreign Investment and the barriers can caused in law enforcement of Patent at the frame of foreign investment mostly because of the weakness in the law enforment generally .also need to re-modern Law of Paten and Law of

Foreign Investment to up to date with give attention of National benefit so can in the same direction with the globalization and the law enforcement can support the growth of Foreign Capital Investment which is economicly is needed in the National growth.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL-----	I
HALAMAN PENGESAHAN-----	II
HALAMAN PERNYATAAN-----	III
KATA PENGANTAR-----	IV
ABSTRAK-----	VI
ABSTRACT-----	VIII
DAFTAR ISI-----	IX
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah-----	1
B. Perumusan Masalah-----	19
C. Tujuan Penelitian penelitian -----	19
D. Manfaat Penelitian-----	20
E. Sistematika Penulisan-----	21
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A Sejarah Hak Paten-----	23
B Sifat dan Hakekat Paten-----	27
C Syarat dan prosedur pembuatan Paten-----	32
D Hak Paten,Hak absolute, khusus dan Monopoli-----	40
E Penanaman Modal Asing-----	45
BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Objek Penelitian-----	51
B Pendekatan Masalah-----	51
C. Lokasi Penelitian-----	53
D. Tehnik Penentuan Sample-----	53
E. Tehnik Pengumpulan Data-----	53
F. Metode Analisis Data-----	53
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Keterkaitan antara Perlindungan Paten dan PMA-----	55
1. Modal Asing-----	58
2. Produk yang menggunakan hak paten asing berdasarkan lisensi-----	65
3. Hubungan antara PMA dan Paten dalam alih teknologi-----	70
B. Hambatan-hambatan yang timbul dalam perlindungan Paten yang terkait dengan PMA-----	75
1. Penegakan Hukum-----	75
2. Bea Cukai-----	78
3. Kepolisian -----	79
4. Kejaksaan -----	83
5. Pengadilan-----	85

6. Penyelesaian sengketa-----	90
7. Ganti rugi-----	91
8. Penetapan Sementara Pengadilan-----	92
9. Penyidikan-----	97
10. Sanksi Pidana-----	100

C. Langkah-langkah Yuridis yang ditempuh Indonesia di bidang perlindungan Paten dalam rangka PMA-----	102
1. Penggunaan Hak Paten Asing berdasarkan Lisensi-----	109
2 Proses Alih Teknologi dalam bentuk Perjanjian Lisensi-----	113

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan-----	183
B. Saran-saran-----	184

DAFTAR PUSTAKA

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hak Kekayaan Intelektual merupakan padanan kata dari istilah *Intellectual Property Right* dikenal dengan istilah HaKI, atau HKI yang pada dasarnya memiliki pengertian yang sama yaitu Hak Khusus yang bersifat eksklusif dan monopoli yang diberikan atas kreatifitas manusia dari hasil kegiatan intelektual melalui cipta, rasa dan karsa manusia yang bernilai ekonomi.

Hak Kekayaan Intelektual terdiri dari; a. Hak Cipta dan Hak-hak yang terkait (*Copyright and Related Rights*) serta b. Hak Kekayaan Industri (*Industrial Property Right*) yang terdiri dari : Merk Dagang (*Trademarks*), Indikasi Geografis (*Geographical Indication*), Disain Industri (*Industrial Designs*), Paten (*Patens*), Disain tata Letak Sirkuit terpadu (*Layout-Designs/topographies of Integrated Circuits*), dan rahasia Dagang (*Trade Secret*), *Plant Varieties*, *plant Breeders*.

Lembaga Pemerintah yang menangani Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia adalah Direktorat Jenderal Hak

Kekayaan Intelektual, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.

WIPO (*World Intellectual Property Organization*)¹ memberikan penjelasan mengenai Hak Kekayaan Intelektual (*intellectual property Rights*) adalah sebagai berikut :

Intellectual Property, very broadly, means the legal right which result from intellectual activity in the industrial, scientific and artistic field. Countries have laws to protect intellectual property for two main reasons. One is to give statutory expression to the moral and economic right of creators in their creations and such right of the public in access to those creations. The second is to promote, as a deliberate act of Government policy creativity and the dissemination and application of its result and application of its result and to encourage fair trading which contribute to economic and social development ².

Dalam konvensi *Establishing the World Intellectual Property Organization (WIPO)* yang ditandatangani di Stokholm pada tanggal 14 Juli 1967

¹ Lihat *The World Intellectual Property Organization, Intellectual Property Reading Material*, Geneva, wipo, 1998, p 4. WIPO adalah salah satu spesialis agen (*Specialized agencies*) organisasi U.N. (United Nation) yang didirikan berdasarkan *The Convention Establishing the World*

² *Intellectual Property Organization*, yang ditandatangani di Stockholm 1967 dan berlaku pada tahun 1970, bagaimanapun asal WIPO kembali pada tahun 1883-1886 berlakunya konvensi Paris dan konvensi ini dibuktikan untuk mendirikan Sekretariat Internasional, dan keduanya dibawah pengawasan Pemerintahan Swiss. Beberapa pejabat tinggi yang diperlukan menyediakan Administrasi dari dua konvensi yang berlokasi di Berne, Swiss.

"intellectual property shall include rights relating to
:

Literary, artistic and scientific works, performance of performing artists, phonograms and broadcasts, inventions in all fields of human ideavor, scientific discoveries, industrial designs, trademarks, servise marks and commercial names and designations, protection against unfair competition all other rights resulting from intellectual activity in industrial, scientific, literary or artistic fields"³

Persetujuan TRIPs merupakan singkatan dari (Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights, including Counterfeit of Goods) yang merupakan bagian integral dari Perjanjian Pendirian WTO (the Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization) yang ditandatangani pada tanggal 15 april 1994 di Marrakesh Morocco, berlaku pada tanggal 1 Januari 1995⁴.

³ Ibid.,p.3

Ibid ...p3

⁴ World healt Organization, op.cit,p47 TRIPs The Agreement on Trade- Related Aspects of Intellectual Property Right covers a new field multilateral international trade law. It was proposed that this subject should be included in the multilateral trade organization of Uruguay Round in an attempt to remedy problems of international piracy and infringement of intellectual property rights. The Agreement Establishes minimum standard of propertion for each category of rights. These standards should be integrated into the national legislation of all WTO members and should be applied in accordance with the principles of most-favoured-nation treatment. They subsume and extend to all WTO Members the substantve obligations of the main traties administered by WIPO, i.e. the Bern Convention for the Protection of Copyright and the Paris Convention for the Protection of Industrial property, with edition of other obligation when necessary to complement the

Anggota dari negara maju berkewajiban untuk menyesuaikan dengan ketentuan TRIPs mulai 1 Januari 1996. dan untuk negara-negara berkembang diberikan periode transisi selama 5 (lima) tahun sampai 1 Januari 2000. Negara-negara yang berdasarkan daftar dari UN (*United Nation*) yang dikategorikan negara-negara terbelakang (*least developed countries*) diberikan periode transisi selama 11 tahun sampai 1 Januari 2006. Selain itu ketentuan dalam perjanjian membolehkan untuk memperpanjang periode transisi tersebut berdasarkan permohonan yang diperuntukkan bagi negara-negara terbelakang.

Indonesia menandatangani persetujuan TRIPs pada tanggal 2 November 1994 dengan diundangkannya Undang-undang No.7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*Agreement Establishing the World Trade Organization*)⁵ berlaku efektif bagi Indonesia pada tanggal 1 Januari 2000.

scope of these Conventions. The TRIPs Agreement, as an entity in the block of multilateral agreement, binds the obtaining and maintenance of customs benefit in framework of WTO to respect for intellectual property rights by the state in question. It is the agreement in the Final Act of the Uruguay Round that could have the most implications for the productions of and access to drugs, particularly in developing countries.

⁵ Lihat Undang-undang R.I. No.7 tahun 1994 Tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) disahkan dan diundangkan pada tanggal 2 Nopember 1994 dalam Lembaran Negara R.I. Tahun 1994 Nomor 57.

Ketentuan TRIPs selain mengatur ketentuan umum dan prinsip-prinsip dasar tetapi juga preambule yang terdiri dari 7 bagian dan terdiri dari 73 pasal, seperti halnya perjanjian internasional lainnya perlu dibaca dan ditafsirkan sesuai dengan maksud perjanjian dalam preambule dan tujuan⁶ dan prinsip-prinsip⁷ dalam TRIPs artinya negara-negara maju dan negara berkembang harus menafsirkan standar yang sama sesuai dengan semangat TRIPs.

Persetujuan TRIPs berisi Ketentuan Umum dan Prinsip dasar, Standar mengenai keberadaan, Lingkup dan Penggunaan hak kekayaan Intelektual yang terdiri dari hak cipta dan hak-hak yang terkait, merek dagang, indikasi geografis, desain industri, paten desain tata letak sirkuit terpadu, perlindungan terhadap informasi yang dirahasiakan, pengendalian atas praktek persaingan curang dalam perjanjian lisensi, Pengakuan Hukum di Bidang Hak Kekayaan Intelektual, Prosedur untuk Memperoleh dan mempertahankan Hak Kekayaan Intelektual berikut *Prosedur Inter Parties* terkait, Pencegahan dan Penyelesaian Sengketa, ketentuan Peralihan, Ketentuan Kelembagaan, ketentuan Penutup.

⁶ Pasal 7 dari persetujuan TRIPs

⁷ Pasal 8 dari Persetujuan TRIPs

Secara umum negara-negara berkembang telah mulai berusaha memberikan perhatian terhadap perlindungan hak intelektual sesuai dengan standar ketentuan yang diatur dalam TRIPs⁸ namun diharapkan tidak memberikan dampak negatif pada kepentingan masyarakat.

Lembaga WTO⁹ merupakan lembaga penerus dari GATT (*General Agreement on Tariff and Trade*), yang telah berfungsi dan dikelola selama 40 tahun lebih sejak tahun 1947. GATT adalah perjanjian multilateral yang mengatur tentang perdagangan internasional¹⁰. Dasar-dasar pengaturan tersebut dimaksudkan untuk penyempurnaan dan pengembangan yang akan dilakukan pada periode berikutnya, yang ada masih tetap berlaku sebagai landasan dari sistim GATT. Namun dengan adanya perkembangan baru hasil *Uruguay Round* maka substantif yang tercakup telah menjadi jauh lebih luas.

Informasi berikutnya menyajikan bahwa pada tahun 1980, negara-negara industri mulai mengubah undang-undang perdagangan mereka, menggolongkan tidak

⁸ Indonesia, Singapura melaksanakan TRIPs Review pada tanggal 22 Juni 2000, Filipina dan Malaysia

⁹ WHO Policy Perspectives on Medicines WHO, Geneva 2001 yang dimaksud dengan WTO adalah: The World Trade Organization is the International organization dealing with the rules of trade between national. Although the WTO become officially operational only in January 1995, it is the successor to the GATT multilateral trading system founded in 1947. In becoming Members of the Wt, countries undertake to abide by its rules, As of 30 November 2000, The WTO counted 140 Members. The WTO is charged with setting the legal ground rules for international trade. Its objective are to promote: (1) non-discrimination (2) progressive of barriers to trade (3) predictable policies and transparency (4) competition and (5) special provisions for developing countries.

sempurnanya sistim Hak Kekayaan Intelektual sebagai satu jenis praktek perdagangan yang tidak jujur. Negara-negara maju yang dipelopori oleh Amerika Serikat, mulai mendesak untuk memperluas pokok-pokok aturan GATT, yaitu mengenai aspek-aspek dagang Hak Kekayaan Intelektual (*trade related aspects of intellectual property rights* atau *TRIPs*)¹¹ Sebagai akibatnya, TRIPs menjadi salah satu kelompok perundingan resmi dalam Putaran Uruguay pada perundingan-perundingan dalam hal perdagangan multilateral. Bagaimana gigihnya negara maju terutama diprakarsai perdagangan oleh Amerika Serikat dalam perjuangan memasukan masalah-masalah aspek dagang dari Hak Kekayaan Intelektual (*Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights, Including Trade in Counterfeit of Good/TRIPs*) dalam perundingan Putaran Uruguay GATT (*General Agreement on Tariffs and Trade*).

Secara keseluruhan dapat dikemukakan bahwa TRIPs mengatur tentang standar perlindungan dan norma dan dalam beberapa hal mendasarkan diri pada prinsip "*full compliance*" dengan konvensi-konvensi Hak Kekayaan Intelektual sebelumnya yaitu standar perlindungan minimal yang telah tertuang dalam perjanjian-perjanjian

¹⁰ World Health Organization, *Globalization And Access to Drugs*, Geneva.1999 p43.GATT

It consist of the original text of the GATT of 1947 as revised and modified during the various rounds of negotiations, including the concessions agreed the Uruguay Round.

yang sudah ada dan dikembangkan dalam konvensi yang berada dalam koordinasi dan administrasi dibawah naungan WIPO (*World Intellectual Property Organization*) sebagai contoh dibidang Hak Cipta standar perlindungan yang menjadi patokan Konvensi Bern adalah *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works: :Berne Convention (1971)*”, dan untuk Kekayaan Industri untuk menjadi patokan adalah Konvensi Paris 1967 adalah *Paris Convention for the Protection of Industrial Property, refers to Stockholm Act of this Convention of 14 July 1967*. Konvensi Roma adalah *International Convention for the Proction of Performers, Producers of Phonogram and Broadcasting Organization*, yang diadakan di Roma pada tanggal 26 Oktiober 1961 dan untuk Desain Tata Letak sirkit Terpadu adalah Perjanjian Wasington 1989 adalah *Treaty on Intellectual in Respect on Integrated Sircuit (TPIC Treaty)* yang diadakan di Wasington pada tanggal 25 Mei 1989. Perjanjian WTO adalah Pengesahan Perjanjian WTO.

Organisasi Perdagangan Dunia ini mulai berjalan pada tanggal 1 Januari 1995 dimana keanggotaannya pada 1 Januari 2002 telah mencapai 144 negara, pada organisasi tersebut sejumlah perjanjian perdagangan barang dan jasa terlampir dalam konvensi WTO. Diantara perjanjian-

perjanjian multilateral tersebut adalah perjanjian TRIPS yang memiliki pengaruh yang luas pada sektor industri.

Perjanjian TRIPS memutuskan untuk segera dilaksanakan oleh seluruh anggota-anggotanya seperti yang dikemukakan oleh Usha Vohra: *The Agreement imposes the general obligations of National Treatment i.e each "Member shall accord to the nationals of other Members, treatment no less favourable than it accords to its own national and Most Favoured Nation (MFN) Treatment which establishes that "any advantage, favour, privilege, or accorded immediately and unconditionally to the nationals of any other Members". These principles are applicable to all members, including those on the UN list of least developed country members which in 1 January, 1996*¹²

Hal tersebut dilakukan karena adanya keinginan dari negara anggota WTO untuk mengurangi gangguan dan hambatan dalam perdagangan internasional dan mengingat kebutuhan untuk meningkatkan perlindungan yang efektif dan memadai terhadap hak kekayaan intelektual, serta untuk menjamin penegakan hukum di bidang hak kekayaan intelektual agar tidak menjadi penghalang bagi perdagangan yang sah.

Perundingan Putaran Uruguay yang diluncurkan pada bulan September 1986, khususnya TRIPs mendapat tantangan sehingga sempat tidak dibahas selama tiga tahun dikarenakan gagal memperoleh kesepakatan antara negara-negara maju dan negara-negara berkembang mengenai hal-hak sifatnya substantif.

Pada tahun 1989-1990 isu tersebut mulai dilanjutkan melalui perundingan secara intensif oleh kelompok kekayaan intelektual dan difokuskan kepada masalah yang bersifat substantif dan komprehensif adapun draft persetujuan diusulkan oleh Amerika, masyarakat Eropah, Swiss, Jepang, serta negara-negara berkembang lainnya seperti Argentina, Brasil, Cina, Chili, India, Colombia, Cuba, Mesir, Pakistan, Peru, Tanzania, Uruguay, dan Zimbabwe.

Pada tahun 1990 dalam kesempatan tersebut Sekretariat GATT mengeluarkan draft pertama dengan text bersama, pada pertemuan para Menteri di Brussel mengajukan usulan substantif yang kurang lebih sama. Secara politis konsep paten lebih kompleks, dan isu tersebut meliputi antara lain persyaratan dapat dipatenkan (*patentable subject matter and exclusions therefrom*); lamanya perlindungan (*term of protection*);

¹² Usha Vohra, TRIPs and Health sector in the South-East Asia Region, WHO/SEARO Geneva

lisensi wajib (*compulsory licensing*); pemberian hak termasuk proses paten (*rights conferred including process patents*); perlindungan informasi rahasia (*protection of undisclosed information and the transitional arrangements*)¹³

Pada tahun 1991 tidak begitu banyak kemajuan (*The political deadlock continued*) karena sangat sedikitnya dokumentasi resmi yang dapat dikaji. Perubahan yang terjadi dengan perunding sebelumnya adalah dimana para perunding terdiri dari para ahli yang memiliki latar belakang pengetahuan/ahli di bidang hak Kekayaan Intelektual (*intellectual property*). Pemimpin Delegasi untuk merunding TRIPs berasal dari para pejabat Departemen Perdagangan yang didampingi para pejabat dari Kantor Paten yang akan memahami akan dampak dan kewajiban TRIPs kepada masyarakat seperti perolehan paten, pemeliharaan dan pelaksanaan paten.

Pada dasarnya dari sejak awal perundingan pertama kali, konsep TRIPs berasal dari para anggota negara-negara maju seperti Amerika, Jepang, Swiss EC menghindari adanya perubahan pengaturan di Bidang hak Kekayaan Intelektual (*Intellectual Property law and*

September 1998.

¹³ Gorlin Jacques j.Ph.D An Analisis of The Pharmaceutical-Related Provisions of The WTO TRIPs (Intellectual Property) Agreement Intellectual Properti Institut, 1999.p.2.

Practice) memperlihatkan bahwa perlindungan Hak Kekayaan Intelektual sebagai element yang krisis pada bidang hukum, ekonomi dan teknologi, hasilnya akan membuahkan bagi pertumbuhan ekonomi, Sedangkan bagi negara LDC (*Least Developing Countries*) melihat hak Kekayaan Intelektual dengan penuh waspada dan dikuatirkan ada penyalah gunaan dalam perlindungan hukum hak kekayaan intelektual, walaupun mereka percaya Hak Kekayaan Intelektual sebagai alat kebijakan pemerintah untuk menyelesaikan dan mendorong pengembangan ekonomi.

Dalam Pasal 7 dari Persetujuan TRIPs dikemukakan bahwa tujuan TRIPs adalah: *The protection and enforcement of intellectual property right should contribute to the promotion of technological innovation and to the transfer and dissemination of technology to mutual advantage of producers and user of technological knowledge and in a manner conducive to social and economic welfare, and tabalance of rights and obligations*¹⁴.

Pengertiannya adalah perlindungan dan penegakan hukum hak intelektual bertujuan untuk mendorong timbulnya inovasi, pengalihan dan penyebaran teknologi, diperolehnya manfaat bersama pembuat dan pemakai

¹⁴ *ibid.*, p.16

pengetahuan teknologi dengan cara menciptakan kesejahteraan sosial dan ekonomi serta keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Mengenai prinsip dalam pelaksanaan persetujuan TRIPs bahwa dalam merumuskan atau mengubah hukum dalam peraturan nasional (internalnya), anggota dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi kesehatan dan gizi masyarakat dalam bidang yang vital bagi perkembangan sosial ekonomi dan teknologi, sepanjang langkah-langkah itu tidak bertentangan dengan ketentuan dalam perjanjian TRIPs. Selain itu langkah-langkah yang sesuai mungkin diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan hak kekayaan intelektual oleh pemegang hak atau terjadinya praktek-praktek yang secara tak wajar membatasi perdagangan atau sangat merugikan pengalihan teknologi internasional.

Negara anggota dapat memberlakukan perlindungan yang melebihi dari yang diharuskan oleh perjanjian ini dalam ketentuan nasionalnya dengan syarat tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dengan TRIPs.

Members shall give effect to the provisions of this Agreement Members may but shall not be obliged to implement to their law more extensive protection than is required by this Agreement, provided that such

protection does not contravene the Provision of this Agreement members shall be free to determine the appropriate method of implementing the provisions of this agreement within their own legal system and practice¹⁵.

Pelaksanaan Hak Kekayaan Intelektual dalam penyesuaian dengan perjanjian TRIPs tidak mengakibatkan suatu hambatan dan tidak menimbulkan diskriminasi dalam perdagangan internasional (Harmonization Principle). Dalam perjanjian WTO meliputi barang (*the General Agreement on Tariffs and Trade or GATT*), dan Jasa (*the Agreement on trade in Services or GATT*) dan hak Kekayaan Intelektual (*The Agreement on trade related aspect of Intellectual Property Right or TRIPs*).

Persetujuan WTO adalah persetujuan multilateral yang kesemuanya merupakan suatu dokumen hukum yang panjang serta kompleks. Disisi lain ada hal-hal yang bersifat sederhana dan sangat fundamental serta berlaku untuk semuanya yaitu prinsip-prinsip mengenai antara lain : *Non-discrimination* yang artinya adalah salah satu prinsip dalam persetujuan WTO dimana negara-negara anggota tidak dapat melakukan diskriminasi diantara partner dagang, hal tersebut menunjuk kepada *Most*

¹⁵ Op.cit.,p 19

Favoured Nation Principle, yaitu negara Harus memperlakukan semua negara asing secara sama (*equal treatment*). Walau bagaimanapun pengecualian dimungkinkan misalnya dalam *regional free trade agreement*. Aspek lainnya adalah *national treatment* artinya pengertian impor dan diproduksi secara lokal harus diperlakukan sama pada saat memasuki pasar. *Transparency and predictability*, hal ini diperlukan agar supaya bisa menstimulasi pasar bebas. Lingkungan bisnis akibatnya stabil dan dapat di prediksi. Peraturan pelaksanaan mengenai hal tersebut harus jelas dan terbuka untuk masyarakat (*More favourable treatment for developing countries*).

Keterbukaan pasar dapat bermanfaat dan diperlukan penyesuaian Persetujuan WTO dapat memungkinkan negara-negara untuk melakukan perubahan secara bertahap melalui libelalisasi yang maju. Terhadap negara-negara berkembang atau *Least Developed countries* diberikan suatu periode transisi untuk menyesuaikan hal-hal yang belum sesuai atau kesulitan dalam memenuhi kewajiban persyaratan WTO, hal ini terjadi karena adanya perbedaan dalam level perkembangan ekonomi. Dengan demikian pada dasarnya Persetujuan TRIPS memuat norma-norma dan

standart hukum baru yang harus ditaati oleh setiap negara anggota Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

Ambassador Clayton K.Yeutter mengemukakan tentang arti penting dari persetujuan TRIPS bagi pertumbuhan ekonomi sebagai berikut; *The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs) will be regarded as one of the Round's most enduring accomplishments. Scientists, companies, inventors and artist around the world stand to reap enormous benefit from effective global minimum standards for patent, trademarks, copyrights, semiconductor design, and trade secret, along with new enforcement procedures to deal with wide spread piracy. More important, TRIPs will spur innovation, scientific discovery, technology transfer and artistic creativity worddwide. In short, TRIPs brings together two vital sources of economic growth-trade and intellectul property in a why that help the contrinued dynamism and prosperity of the global marketplace in the next century*¹⁶.

Persetujuan TRIPS dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual mendorong individu-individu dan perusahaan-perusahaan untuk melakukan kegiatan inovasi.

¹⁶ Ibid.,pi.

Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual telah menstimulasi pertumbuhan ekonomi seperti halnya ide-ide baru untuk menjadikan produk-produk baru dan proses-proses baru yang memiliki dampak pada pertumbuhan Industri dan akan membantu pada membaiknya keadaan ekonomi.

Selanjutnya dikemukakan; Disadari perlunya kebijakan publik untuk melaksanakan sistim Hak Kekayaan Intelektual Nasional untuk pengembangan teknologi dan ekonomi.

Para anggota WTO mengemukakan bahwa:

Penggunaan prinsip-prinsip dasar GATT dalam perjanjian atau konvensi internasional mengenai hak kekayaan intelektual, serta ketentuan mengenai standar dan prinsip ketersediaan, lingkup, penggunaan hak kekayaan intelektual yang berkaitan dengan perorangan dan sarana yang efektif bagi penegakan Hak Kekayaan Intelektual perlu memperhatikan perbedaan yang ada dalam sistim hukum masing-masing. Selain hal tersebut diatas pengaturan peralihan dimaksudkan untuk memperoleh partisipasi penuh dari hasil negosiasi.

Paten dalam pertumbuhan dan perkembangannya telah mendapat perhatian yang sangat besar dari masyarakat dunia baik itu dari negara maju atau negara berkembang.

Di negara-negara yang sudah maju sistim tersebut dikembangkan dengan berbagai cara pada tahap berikutnya, hal yang perlu diperhatikan dalam pemikiran, paten pada dasarnya adalah sebagai alat untuk alih teknologi dan pendirian industri-industri baru.

Putusan Uruguay tentang Investasi dan kerjasama Internasional adalah selaras dengan pemikiran tersebut diatas.

Melalui Undang-undang nomor 1 tahun 1967 Indonesia telah berusaha mengatur Penanaman Modal Asing yang memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi semua pihak ,mengingat perkembangan dan kebutuhan adalah penting untuk menilai relevansi dari Undang-undang Nomor 1 tahun 1967 tentang PMA tersebut dikaitkan dengan perlindungan Hak Paten.

Indonesia yang sedang mengalami kelesuan ekonomi memerlukan kepercayaan dari Investor asing untuk datang ke Indonesia dan menanamkan modalnya yang berupa devisa maupun Paten yang mereka bawa.

Untuk menyakinkan Investor asing tersebut perlu analisa dampak dari peraturan-peraturan yang berlaku positif di Indonesia harus jelas dan mengakomodir kepentingan investor tersebut serta harus memperhatikan kepentingan bangsa dan Negara.

Keterkaitan perlindungan Paten dalam rangka PMA memang perlu diperhatikan oleh pemerintah Indonesia sehingga hambatan-hambatan yang timbul dalam perlindungan Paten tersebut dapat diminimalisir melalui langkah-langkah yuridis yang ditempuh Indonesia sehingga pertumbuhan ekonomi melalui masuknya modal asing dan alih teknologi merupakan suatu kebijaksanaan yang komprehensif jangka panjang pembangunan ekonomi dapat tercapai.

Perlindungan Hak Paten melalui Lisensi yang kurang menguntungkan Indonesia sebagai contoh adalah Semen Cibinong. Walaupun secara bertahap prosentase besarnya saham dimiliki oleh Pemodal dalam negeri menjadi dominant namun Hak Paten tetap dimiliki oleh pihak asing melalui lisensi sehingga alih teknologi tidak terjadi dan pihak asing tetap akan mendominasi teknologi melalui Lisensi tersebut.

B. Perumusan Masalah

Dari uraian tersebut dapat dirumuskan beberapa masalah dalam bentuk pertanyaan :

1. Bagaimanakah keterkaitan antara Perlindungan Hak Paten dengan PMA.
2. Hambatan-hambatan apakah yang timbul dalam Perlindungan Hak Paten yang terkait dengan PMA.

3. Langkah-langkah yuridis apa yang ditempuh Indonesia dibidang perlindungan Paten dalam rangka PMA.

C. Tujuan Penelitian.

Berdasarkan permasalahan dan kerangka teori tersebut diatas tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini ,yaitu :

1. Untuk mengetahui keterkaitan perlindungan Hak Paten dengan PMA.
2. Untuk mengetahui hambatan; hambatan yang timbul dalam perlindungan Hak Paten yang terkait PMA.
3. Untuk memperoleh analisa yang jelas dan sistematis serta lengkap mengenai langkah-langkah yuridis yang ditempuh Indonesia dibidang perlindungan Hak Paten dalam rangka PMA.

D. Manfaat Penelitian.

Kegunaan penelitian ini adalah memberikan kontribusi sebagai berikut :

1. Aspek keilmuan dimana dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pembendaharaan konsep , metode ataupun teori dalam pengkajian Hak Kekayaan Intelektual guna mendorong

meningkatnya kreativitas dan inovasi pada masyarakat Indonesia.

2. Aspek praktis untuk menghasilkan solusi praktis baik langsung ataupun tidak langsung untuk memberikan masukan yang positif bagi para peneliti yang mempunyai kajian yang sama maupun para perencana dan pelaksana hukum sesuai dengan kompetensi tugasnya.

3. Memberikan pandangan kepada Para Investor Asing mengenai perlindungan Paten dalam rangka Penanaman Modal asing di Indonesia.

E. Sistematika Penulisan.

Hasil penelitian tersebut diatas akan disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab Kesatu berisi Pendahuluan yang terdiri atas Latar Belakang Masalah , Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian , Manfaat Penelitian , dan sistematika Penulisan Tesis.

Bab Kedua berisi tentang Tinjauan Pustaka yang terdiri atas : Sejarah Paten, Sifat dan Hakekat Paten, Syarat dan Prosedur pembuatan Paten , Hak Paten Hak absolute khusus dan Monopoli dan Penanaman Modal Asing.

Bab Ketiga berisi tentang Metode Penelitian meliputi : Objek Penelitian, Pendekatan Masalah , Lokasi

Penelitian , Teknik Pengumpulan data dan Metode Analisa Data.

Bab Keempat berisi tentang : Hasil Penelitian yang terdiri dari Keterkaitan Perlindungan Hak Paten dan PMA yang meliputi : Modal Asing , Produk yang menggunakan Hak Paten Asing berdasarkan Lisensi serta Hubungan antara PMA dengan Paten dalam alih teknologi , Hambatan-hambatan yang timbul dalam Perlindungan Paten yang terkait dengan PMA , meliputi : Penegakan Hukum, Bea Cukai, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Penyelesaian Sengketa, Penetapan Sementara Pengadilan, Penyidikan dan Sanksi Pidana serta langkah-langkah Yuridis yang ditempuh Indonesia dibidang perlindungan Paten dalam Rangka PMA yang terdiri dari Penggunaan Hak Paten Asing berdasarkan Lisensi dan Proses Alih Teknologi dalam bentuk Perjanjian Lisensi yang terdiri dari : Hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian Lisensi , Hak dan kewajiban dalam perjanjian Paten serta Sistem Pendaftaran.

Bab Kelima berisi tentang : Kesimpulan dan saran-Saran yang dilengkapi dengan daftar pustaka dan lampiran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Sejarah Hak Paten

Hak paten yang merupakan hak perlindungan terhadap suatu penemuan baru, sesungguhnya telah ada sejak abad XIV dan XV, seperti halnya di Venesia dan Inggris. Akan tetapi hak paten pada zaman itu pada dasarnya berlainan dan tidak begitu dititik beratkan kepada hasil penemuan baru, walaupun demikian hak ini dapat berkembang dengan baik sehingga kemudian dikenal di samping beberapa paten yang benar - benar mempunyai sifat penemuan baru yang dihasilkan para ahli setempat ada juga perwujudan Paten sebagai " Hasil Tarik " para ahli dari luar negeri yang maksud utamanya yaitu memberi kesempatan kepada para ahli tersebut untuk mengembangkan keahliannya di " Negara Pengundang ." Dengan demikian maka hasil penemuan para ahli yang bersangkutan dapat dimanfaatkan di " Negara Pengundang " tersebut.

Dapat dikatakan bahwa hak paten atau lazim juga disebut *oktroi* pada waktu itu mempunyai sifat yang lebih sesuai dengan *Vestiging svergunning* atau " Perizinan untuk bertempat di", yang jelasnya

mengundang para ahli penemu yang bersangkutan dan kemudian memberinya izin untuk bertempat tinggal guna mengembangkan hasil penemuannya itu.

Jadi jelaslah bahwa paten semacam di atas tidak serupa dengan paten pada masa sekarang, yang mana pada waktu sekarang " pencipta" barang (hasil penemuan baru) di suatu negara sangat dilindungi hak - haknya dengan Undang - undang paten dan terdaftar pada Departemen kehakiman. Perlindungan ini diberikan terhadap hak ciptaannya (barang baru), mempergunakan, menjual atau memindahkan (hak - hak itu) kepada orang lain.

Pada abad XVI pemberian perlindungan terhadap penemuan baru untuk menciptakan sesuatu barang, berkembang dengan baik di Venesia, Nederland, Inggris, Jerman, Australia, Perancis, yang selanjutnya pada abad XIX dan XX peraturan pemberian Hak Paten tersebut dapat dikatakan telah diikuti oleh negara - negara di seluruh dunia.

Di Amerika Utara pertumbuhan Hak Paten dimulai pada abad XIX, sedang di Amerika Selatan pada abad XX. Setelah Undang - undang Paten di Amerika Serikat terbentuk, terdapat perubahan sifat dari pemberian Hak Paten yaitu diperuntukkan kepada " meraka yang

menghasilkan pendapatan sebagai hak yang diperolehnya sendiri dan tidak sebagai suatu hadiah."

Perubahan demikian diikuti di Perancis, Inggris, Rusia dan Nederland. Undang - undang Paten ini selanjutnya berkembang dengan baik di Asia dan Australia, beberapa negara di antaranya yang telah mempunyai Undang - undang Paten yaitu India, Jepang, Philipina, Indonesia, Australia, dan Selandia Baru.

Di Indonesia sejarahnya dapat dikemukakan sebagai berikut :

Sebelum tanggal 27 Desember 1949 (saat pengakuan kedaulatan RIS oleh Belanda) segala sesuatu yang ada hubungannya dengan penemuan baru/penciptaan sesuatu yang ada hubungan erat dengan segala sesuatu mengenai hal ini yang berlaku di Nederland, dimana Octroiwet 1910, S. No. 313 menurut pasal 58 berlaku juga untuk bagian jajahan, jelasnya di Tanah Air kita.

Untuk memudahkannya bagi mereka yang ingin mengajukan permintaan Paten di Batavia, telah diadakan kantor untuk meneruskan permintaan tersebut ke Dewan Paten di Negeri Belanda. Kantor ini ada di bawah pengawasan Departemen Kehakiman Belanda.

Perlu diketahui tentang jumlah Paten yang telah diberikan dan dinyatakan berlaku di Tanah Air kita

sampai pada saat - saat pengakuan kedaulatan RIS (1949) berjumlah kurang lebih 18.000. Setelah itu *Octroiwet* 1910 S. No. 313 dinyatakan tidak berlaku lagi di Negara kita. Selanjutnya untuk mengatur pemberian Hak Paten, dengan mendahului terbentuknya Undang - undang Paten maka pada tanggal 12 Agustus 1953 oleh Menteri Kehakiman RI telah dikeluarkan pengumuman nomor J.S.5 / 41 / 4 (B.N. 53 - 69) tentang permohonan sementara pendaftaran Paten.

Dengan demikian maka apabila terdapat suatu penemuan penciptaan barang - barang yang benar - benar baru, maka hanya dapat diajukan permohonan sementara pendaftaran dan permohonan - permohonan tersebut akan diumumkan apabila telah diundangkannya Undang - undang Paten. Penemuan - penemuan baru selama itu, setelah diajukan permohonan pendaftaran memungkinkan memperoleh Hak Diutamakan. Mengenai Hak Paten dari Luar Negeri dapat pula didaftarkan di Indonesia sehubungan dengan adanya Pengumuman Menteri Kehakiman nomor J.G. 1/2/17 tanggal 29 Oktober 1953, BN. 53 - 91.

Oktroi dan paten mempunyai arti yang sama, hanya tempat penggunaanya yang berbeda. Di Inggris, Amerika, Jerman dan di negara - negara yang mempergunakan bahasa Inggris dan Jerman dipergunakan kata paten. Di negeri

Belanda dipergunakan kata *Oktroi*, sedang di Perancis dan Belgia dipergunakan kata *Brevet*. Kata *Oktroi* asal muasalnya diambil dari kata *auctor* / *auctorizare* yang merupakan bahasa latin. Dengan adanya perlindungan hukum terhadap mereka yang telah berhasil dengan segala daya upayanya menemukan dan atau menciptakan sesuatu benda baru, sesuatu cara kerja yang menghasilkan sesuatu manfaat yang baru bagi kehidupan manusia, maka jerih payah tersebut akan selalu dilindungi oleh Pemerintah.

B. Sifat dan Hakekat Paten

Pengertian *Oktroi* atau Paten ataupun *Brevet d'Invention* dapat dibatasi sebagai berikut:" Bahwa *Oktroi* itu merupakan suatu hak khusus, diberikan kepada dan atas permintaan pencipta atau yang menurut hukum menjadi penggantinya, atas ciptaan baru, cara bekerja baru atau perbaikan cara bekerja, pendek kata menghasilkan penemuan atau pendapatan baru."

MOLENGRAAFF, merinci syarat - syarat obyektif daripada suatu paten sebagai berikut:

1. Suatu penemuan
2. Berupa suatu hasil, cara kerja atau perbaikan dari keduanya
3. Mempunyai nilai penggunaan praktis
4. Di bidang perindustrian

5. Harus baru

Syarat yang pertama dan kelima sebetulnya merupakan suatu kelanjutan satu sama lain, suatu " penemuan " di satu pihak menggambarkan akan adanya suatu karya merupakan suatu hasil pemikiran manusia sehingga diwujudkan suatu invensi tertentu, sedangkan di lain pihak menurut sifatnya penemuan itu haruslah " baru ."

Yang menjadi persoalan ialah bahwa pengertian " baru" ini juga adalah suatu hal yang relatif, suatu hal yang baru bagi orang yang satu belum tentu " baru " bagi orang lain. Karena itu dalam rangka hukum Oktrooi diambil suatu kriteria obyektif yang menganggap sesuatu itu baru manakala seseorang ahli memandangnya demikian.

Syarat kedua memberikan batasan bahwa terhadap suatu hasil cara kerja, atau Perbaikan dari keduanya dapat diberikan hak Paten. Yang maksudnya ialah untuk membedakan antara suatu " hasil " dengan suatu " bahan ."

Terhadap bahan ini tidak diberikan Hak Paten.

Adapun kriterium pembeda daripada suatu hasil dengan suatu bahan di dalam pengertian hukum Oktroi terletak pada fungsi kedua hal tersebut di atas. Suatu hasil ialah suatu barang yang untuk fungsinya terikat oleh suatu bentuk tertentu oleh karena itu dapat

dimintakan hak patennya, sedangkan suatu bahan untuk penggunaannya tidaklah memerlukan suatu bentuk tertentu.

Syarat ketiga mengatakan bahwa untuk dapat diberikan Paten itu haruslah penemuan itu mempunyai nilai penggunaan praktis, yang dengan sendirinya terhadap sesuatu yang tidak praktis tidak usah dimintakan patennya, karena orang lainpun tidak akan meniru sesuatu yang tidak praktis walaupun harus diakui bahwa pengertian mempunyai penggunaan praktis atau tidaknya suatu benda itu sangat tergantung dari perkembangan zaman.

Syarat keempat ialah bahwa suatu paten hanyalah dimaksudkan untuk perlindungan - perlindungan di bidang perindustrian saja. Di luar bidang perindustrian penemuan - penemuan itu dilindungi oleh lembaga - lembaga hukum yang lain, misalnya hak atas merk, hak cipta karangan dan lain sebagainya.

Ada pula hal - hal yang pada pokoknya tidak termasuk ke dalam salah satu hak diatas, yang dimaksud dalam hal ini yaitu penemuan - penemuan yang baik karena sifatnya maupun menurut tujuannya bertentangan dengan Undang - undang, ketertiban umum dan atau kesusilaan, dengan sendirinya tidak dapat dimintakan patennya.

Tentang batasan Oktroi lainnya yang dikemukakan oleh Drs. Soeryatin dalam bukunya yang berjudul " Hukum Dagang I ,dan II, adalah sebagai berikut :

" Oktroi" adalah suatu hak mutlak atas:

- a. suatu penemuan baru
- b. suatu cara bekerja baru
- c. suatu perbaikan penemuan baru
- d. perbaikan cara bekerja ,dengan demikian maka jika seseorang dapat menghasilkan suatu barang baru sebagai karya ciptaannya yang bukan berarti meniru suatu barang yang telah ada yang diciptakan oleh sebuah pabrik atau seseorang, maka orang yang bersangkutan dapat mengajukan kepada Departemen Kehakiman untuk mendapat perlindungan atas barang ciptaannya itu. Barang yang dimaksudkan dalam hal ini adalah yang berhubungan dengan bidang kerajinan (pasal 3 OW) dan harus benar - benar merupakan suatu penemuan sehingga seorang ahli tidak dapat mengerjakannya tanpa diberitahu cara - caranya, misalnya penemuanmembuat mentega dari bahan - bahan kedelai, jadi sesuai dengan syarat keempat seperti dikemukakan di atas, akan tetapi di Negara - negara yang telah mempunyai Undang - undang Paten arti dari bidang perindustrian itu adalah sangat luas

yang dalam hal ini termasuk juga mesin - mesin untuk pertanian, seperti misalnya mesin penyebaran biji, mesin potong dan lain - lainnya, dan dapat juga berhubungan dengan perindustrian obat - obatan untuk cara bekerja dan bahan - bahan yang dihasilkan dari cara bekerja itu.

Dalam hal seperti di atas itulah maka justru sangat diperlukan adanya hukum tentang paten, karena tanpa adanya pengaturan - pengaturan hukum tentang paten yang dengan jelas memberikan di satu pihak berbagai hak kepada pemegang paten dan di lain pihak adanya larangan - larangan bagi seseorang bukan pemegang paten, maka seorang penemu suatu penemuan baru akan selalu berusaha sedapat - dapatnya agar penemuannya itu tidak ditiru orang. Dengan demikian jelas hal demikian akan mengakibatkan tertutupnya kemungkinan - kemungkinan bagi seseorang lainnya agar dapat menyumbangkan pikirannya yang berupa perbaikan - perbaikan dari suatu hal / benda yang telah ditemukan terdahulu, sehingga mengakibatkan kerugian bagi bidang perindustrian dan masyarakat sendiri, karena kemajuannya menjadi tidak begitu pesat.

Selain hal - hal tersebut di atas, maka dengan adanya hukum yang mengatur paten berarti pula telah

memenuhi harapan - harapan dari suatu masyarakat mutakhir, berupa :

- a. Hak - hak dan perlindungan - perlindungan tertentu bagi seseorang yang telah membuat (menemukan suatu penemuan yang berguna di bidang perindustrian)
- b. Hak - hak dan perlindungan - perlindungan bagi mereka yang telah mengadakan perbaikan - perbaikan atas penemuan - penemuan yang terdahulu.
- c. Ganjaran bagi jerih payah seseorang yang mendapatkan suatu penemuan cara kerja atau seseorang yang memperbaiki suatu penemuan dari masyarakat terhadap jerih payah dan segenap usaha - usahanya.

C. Syarat dan prosedur pembuatan Paten

Karena hak paten merupakan hak yang diberikan untuk melindungi penemuan - penemuan baru, maka dengan sendirinya hal tersebut erat hubungannya dengan orang - orang yang menemukan penemuan - penemuan itu, yang dalam prakteknya ternyata sukar untuk menentukan siapakah penemu dari suatu penemuan itu. Sehubungan dengan hal demikian maka di dalam Undang - undang Paten, pendaftar pertam atas sesuatu penemuan dianggap sebagai penemunya dan karenanya berhak atas hak paten. Hal demikian ini diikuti sepanjang pendaftar pertama yang bersangkutan

tidak meninggalkan azas itikad baik yang juga berlaku dalam Undang - undang Paten.

Di dalam hal suatu penemuan didapat melalui kerja sama antara dua orang atau lebih, maka tiap - tiap orang bermaksud mempunyai hak yang sama atas hak paten tersebut. Tentang hal demikian ini berlaku sepanjang ;

a. Kerjasama itu terbukti dengan adanya suatu perjanjian tertulis (akta)

b. Pekerjaan - pekerjaan haruslah bersamaan (*gelijk wardigarbeid*)

c. Kerjasama dilaksanakan hingga penemuan itu selesai.

Dalam bahasa Belanda hal seperti ini disebut

Suatu masalah dapat timbul, *gezamenlijk Octrooi* atau suatu Oktroi bersama. apabila penemuan itu didapatkan oleh seorang buruh atau pegawai dari suatu perusahaan industri, yaitu apakah hak patennya kepunyaan buruh / pegawai yang bersangkutan ataukah kepunyaan pengusaha / perusahaannya.

Hukum oktroi mengandung pula berbagai ketentuan yang bersifat larangan - larangan yang tidak boleh dilakukan oleh seseorang bukan pemegang paten, baik yang ada kaitannya dengan perlindungan terhadap sesuatu hasil maupun terhadap suatu cara kerja yang dilindungi.

- a. Dalam kaitannya dengan sesuatu hasil atau sesuatu perbaikan dari suatu hasil yang telah dipatenkan maka Hukum Oktroi tidak memperbolehkan seseorang bukan pemegang paten/hak paten untuk membuat, memperjualbelikan, menjual lagi, menyewakan, menyerahkan atau menyediakannya untuk kepentingan orang lain atau mempergunakannya.
- b. Dalam kaitannya dengan suatu cara kerja atau suatu perbaikan dari suatu cara kerja, maka Undang - undang paten tidak memperkenankan seseorang bukan pemegang paten untuk menyelenggarakan bagi penggunaanya, membuat bagi kepentingan dirinya dengan cara kerja atau perbaikan itu, mengedarkan baik untuk kepentingan sendiri atau kepentingan orang lain, untuk menjual lagi, menyewakannya lagi, menyerahkan atau menyediakannya bagi seseorang yang tidak berhak untuk mempergunakannya.

Manakala terdapat perbuatan atau perbuatan - perbuatan seperti yang dimaksudkan di atas yang dilakukan oleh seorang bukan pemegang paten, maka pemegang paten yang bersangkutan dilindungi oleh hukum untuk dapat mengajukan berbagai gugatan -gugatan dan menganggap si pelaku itu telah melakukan suatu perbuatan

yang melanggar Undang - undang paten atas haknya yang sah.

Sehubungan dengan memperbaiki hak paten, seperti telah dikemukakan, ada 2 macam cara memperbaikinya, yaitu Perbaikan dilakukan oleh pemegang paten sendiri, yang artinya maka si pemegang paten yang bersangkutan akan memakai paten yang baru yang dinamakan :

1. Paten perbaikan (*verbeterings aktrooi*)
2. Paten tambahan (*aanvullend oktrooi*)
3. Perbaikan dilakukan oleh pihak lain, yang dalam hal ini akan mewujudkan Paten tergantung atau *Afhankelijk Octrooi*.

Selanjutnya tentang perbedaan ketiga macam paten perbaikan tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a. Hak paten tambahan, merupakan hak paten pokok (paten yang pertama) digabungkan dengan paten yang sudah diperbaiki atau hak paten baru, dengan demikian maka syarat mengajukan permohonannya kelak akan lebih mudah dan biaya - biayanya akan lebih ringan. Kelemahannya dalam hal ini, yaitu jangka waktunya digabungkan menjadi satu dengan hak paten pokok.
- b. Hak paten perbaikan, pengajuannya sama seperti pengajuan hak paten pokok, demikian pula dengan

masalah biayanya. Dalam hal ini keuntungannya terletak pada jangka waktunya. Misalnya hak paten pokok berumur 5 tahun, selanjutnya paten yang diperbaiki kalau sudah jangka waktunya maka hak paten menjadi milik masyarakat.

- c. Hak paten tergantung (*afhankelijk Octrooi*), yaitu suatu paten yang dalam pelaksanaannya menggunakan hak paten orang lain diperlukan syarat bahwa pihak yang memberikan paten (pemegang hak paten pokok) mempunyai hak meminta ganti kerugian sesuai dengan kata sepakat kedua belah pihak.

Dalam hal pemberian hak paten ini bukanlah buah pikiran seseorang yang diutamakan (yang diberi hak paten) akan tetapi hak tersebut diberikan justru kepada hasil nyata dari buah pikiran orang tersebut, dengan lain perkataan yang diberi hak paten adalah perwujudan barang yang dihasilkannya yang dapat bermanfaat bagi sesama manusia lainnya.

Sebagaimana telah diuraikan di muka, bahwa perlu diperhatikan tentang syarat utama barang yang dihasilkannya yaitu yang berhubungan dengan industri/kerajinan dan berpangkal pada lapangan produksi bahan - bahan. Penemuan baru itu harus memenuhi syarat bahwa ia memperkaya perindustrian dan tehnik serta harus

mempunyai pengaruh di lapangan teknik, jadi harus mewujudkan hasil yang nyata.

Penemuan baru itu harus bebarang - barang baru yang artinya bahwa sebelumnya tidak seorangpun yang mengetahui terkecuali penemunya sendiri (obyektif). Kalau seseorang menciptakan sesuatu yang telah diciptakan oleh orang lain akan tetapi yang bersangkutan tidak mengetahuinya terlebih dahulu (artinya bahwa ciptaannya itu baginya sendiri dianggap sesungguhnya atau memang baru) maka secara obyektif penemunya itu bukanlah penemuan baru karenanya tidak dapat diberi hak paten.

Penemuan baru tersebut tidak boleh bertentangan dengan Undang - undang dan peraturan - peraturan Negara atau dengan ketertiban umum dan kesusilaan. Berdasarkan pasal 10 *Octrooi Wet* (*OW*) yang juga telah diterangkan di muka, apabila seorang buruh/karyawan dari suatu perusahaan berhasil menemukan penemuan/ciptaan baru dan riil dapat mewujudkannya dalam perusahaan yang telah menyediakan biaya khusus dan bantuan fasilitas - fasilitas (sarana/alat - alat milik perusahaan), maka yang berhak atas patennya adalah perusahaan di mana buruh/karyawan itu bekerja. Dalam hal demikian si penemu/pencipta dapat menuntut penghargaan serta namanya agar dapat dicantumkan/dicatat dalam daftar Paten.

Hak Paten dapat diberikan Pemerintah untuk jangka waktu 18 tahun setelah diberikan oleh Dewan Paten dihitung dari tanggal pemberiannya. Hak Paten dapat dianggap sebagai suatu hak atas barang yang dapat dipindah tangankan dan dapat diserahkan kepada siapa saja (diwarisi oleh siapa saja), pemindahan hak mana harus dilaporkan kepada yang berwajib dan dicatat dengan resmi dalam register paten supaya pengakuan hukum terhadap orang lain.

Hak milik atas paten dapat diserahkan seluruhnya atau sebagiannya saja, menurut ketentuan - ketentuan di masing - masing negara. Penyerahannya acapkali dapat dilakukan menggunakan akta dalam mana dijelaskan bahwa pemilik/pemegang paten yang bernomor paten sebagai yang tercantum dalam Daftar Patennya kepada yang berkepentingan itu dalam mana nama dan alamatnya dijelaskan pula.

Kalau yang memiliki Hak Paten meninggal dunia, sedangkan para ahli warisnya berkehendak memindahkannya kepada mereka sendiri, maka maksud demikian dengan diperkuat dengan bukti - bukti yang otentik dan sah (wasiat, akta notaris dan lain sebagainya) dapat dilakukan atau diperbolehkan juga oleh undang - undang.

Dalam hal pengalihan/penyerahan paten seluruhnya atau sebagiannya, maka bagi yang memperoleh izin harus membayar kerugian (lisensi), yang mana lisensi itu ada 2 macam, yaitu :

- a. Lisensi sukarela, yang diberikan berdasarkan persetujuan antara kedua belah pihak
- b. Lisensi paksaan, yang karena keadaan memaksa terdorong oleh keperluan yang sangat mendesak, tidak diperlukan persetujuan terlebih dahulu dari pemilih/pemegang paten pokok. Dalam hal ini lisensi akan diberikan oleh Dewan Paten (bukan oleh pemilik/pemegang paten pokok), misalnya Negara dalam keadaan perang, untuk pertahanan negara diperlukan senjata dan mesiu, maka untuk hal ini tanpa izin pemilik/pemegang paten pun dapat digunakan.

Selain kedua jenis lisensi itu masih terdapat pula lisensi timbal balik, terdapat antara hak paten pokok dengan hak paten yang diperbaiki oleh pihak lain, maksudnya hak paten pokok yang dapat mempergunakan paten orang lain, misalnya tentang TV hitam putih dan TV berwarna, yang mempunyai hak atas TV hitam putih dan TV berwarna dapat mempergunakan lisensi orang lain.

Tentang hal pengalihan, menurut Undang - undang paten, pengalihannya harus dengan akta di mana pejabat yang berwenang dalam hal ini adalah Notaris. Yang dialihkan adalah izin penggunaannya (lisensi) dan harus diumumkan dalam Berita Negara agar supaya masyarakat mengetahuinya. Nama pencipta/penemu tidak bisa dialihkan, yang diperbolehkan adalah hasilnya, demikian juga dalam memperbanyak hak paten, nama penciptanya tidak boleh dialihkan.

D. Hak Paten; hak khusus, eksklusif dan monopoli.

Penemu/pencipta yang telah memiliki hak paten untuk hasil ciptaan/penemuannya berarti dapat melakukan perusahaan sendiri (monopoli) dalam memproduksi barang - barang penemu/ciptaannya itu. Monopoli mana memuat suatu ketentuan hukum bahwa pencipta dapat mempergunakan penemunya dengan larangan kepada orang lain agar tidak meniru, memalsu dan mengedarkannya dalam bentuk yang sama di masyarakat.

Dengan demikian maka jelaslah bahwa pemegang hak paten atas penemuan/ ciptaannya yang telah diberi paten mempunyai kedudukan yang kuat sekali terhadap persaingan (konkurensi, kompetisi). Kepada siapa saja yang melanggar Hak Paten milik orang lain dapat dituntut

dimuka pengadilan dimana acapkali si pelanggar diwajibkan mengganti kerugian kepada yang berhak, akan tetapi apabila pelanggaran dilakukan berkali --kali maka yang bersangkutan dapat dipidana akibat meniru, memalsu barang -barang ciptaan orang lain yang telah memiliki paten.

Gangguan yang pertama terhadap pemegang paten didapat dari para pesaingnya, jika secara realita barang - barang ciptaannya yang telah diproduksi dan dipasarkan mendapat penawaran dan permintaan yang sangat baik di masyarakat, sehingga semua orang berhasrat untuk memilikinya atau memakainya.

Pesaing - pesaing dalam melancarkan gangguan - gangguannya akan mempergunakan 2 taktik (siasat),yaitu

- a. meniru atau memalsu untuk turut mendapatkan keuntungan
- b. meniru atau memalsu untuk menjatuhkan mutu dan harga dari barang itu

Dalam keadaan demikian, pemegang hak paten dapat mengajukan para pesaingnya yang tidak baik itu melalui hukum yang biasanya ditangani oleh kuasa hukum atau pengacaranya untuk menuntut ganti kerugian atau tindakan hukum lainnya di muka pengadilan.

Jika para importir yang mendatangkan/memasukkan barang-barang yang sesungguhnya tiruan dari luar negeri, sedangkan di negaranya sendiri barang-barang tersebut dilindungi oleh hak paten, maka para importir yang bersangkutan telah melanggar hak paten di negara tersebut.

Tentang sifat dan cara menyelesaikan suatu pelanggaran terhadap suatu hak paten dapat dikemukakan sebagai berikut di bawah ini.

Seorang pemegang hak paten yang sah diperlindungi oleh hukum terhadap perbuatan-perbuatan yang dapat digolongkan sebagai pelanggaran hak paten oleh seorang bukan pemegang paten.

Perlindungan-perlindungan yang diberikan oleh hukum ini berupa 2 macam gugatan yang dapat diajukan oleh pemegang paten kepada mereka yang melakukan pelanggaran tersebut, yaitu gugatan yang bersifat hukum perdata dan yang bersifat hukum publik.

Baik bagi suatu gugatan yang bersifat hukum publik maupun yang bersifat hukum privat, harus dibuktikan pada taraf pertama akan adanya sikap sengaja (opzet) daripada para pelanggar paten ini.

Undang -undang paten mensyaratakan bagi terciptanya sikap sengaja ini, suatu pemberitahuan dari pihak yang merasa dirugikan kepada pihak yang dianggapnya melanggar hak paten ini, yang pada azasnya memuat kehendaknya agar segala tindakan - tindakan yang merugikan pihak yang disebut terdahulu dihentikan. Untuk menghindarkan berbagai kemungkinan yang tidak dikehendaki, maka pemberitahuan semacam ini diserahkan melalui exploit seorang juru sita pengadilan negeri setempat. Manakala 30 hari setelah pemberitahuan resmi ini dilakukan, pihak yang melanggar paten ini masih tetap melakukan perbuatan - perbuatan yang dianggap merugikan pihak pemegang paten, maka suatu sikap sengaja telah dianggap telah tercipta.

Selanjutnya setelah sikap ini ada pada pihak pelanggar paten, seorang pemegang paten menurut ketentuan undang - undang paten dapat segera mengajukan gugatan - gugatannya melalui Pengadilan. Gugatan ini bisa berupa suatu gugatan hukum privat maupun sebagai

suatu pengaduan bagi suatu perkara kejahatan di dalam pengertian hukum pidana.

Segi hukum privat daripada gugatan paten mengharuskan seorang pelanggar paten untuk memberikan suatu ganti kerugian kepada pemegang paten atas perbuatan - perbuatan pelanggaran paten yang telah dilakukannya. Dasar yang umum dari penggantian kerugian ini ialah suatu perbuatan melawan hukum seperti tertera dalam kitab undang - undang hukum perdata.

Hak paten dapat dihapus dari pemegangnya, apabila :

- a. ditanggalkan (*afstand doen*) oleh yang berhak dengan suatu akta, yang harus dicatat dalam Daftar Paten.
- b. Demi hukum apabila yang berhak tidak membayar biaya tahunannya sebagai kewajiban pemegang hak paten dalam jangka waktu 6 bulan setelah tiba saat wajib, hal ini harus pula dicatat dalam Daftar Paten
- c. Karena permintaan pihak ketiga untuk dihapuskan, apabila yang berhak tidak menyelenggarakannya dalam suatu perusahaan, setelah 5 tahun diberikannya hak paten.

Selanjutnya hak paten dapat pula dibatalkan, karena

- a. Diberikan bertentangan dengan pasal 1 sampai dengan pasal 5 OW

- b. Diberikan bertentangan dengan hak orang lain yang telah mendapat paten berdasarkan Bab I pasal 51 OW.

Maksud Hak Paten sebagai hak didahulukan atau prioritas ialah hak seseorang untuk mendapat hak paten apabila ciptaan/penemuannya itu diajukan pula oleh orang lain di negara lain. Kepada orang yang mengajukannya terlebih dahulu akan permintaan Hak paten itu dengan sendirinya dapat diberikan prioritas.

Sesungguhnya hal demikian akan menimbulkan beberapa kesulitan, apabila orang yang benar-benar sebagai pencipta / penemu tidak hati-hati yang artinya tidak segera meminta untuk mendapatkan hak paten tersebut, sehingga rahasia ciptaannya telah diketahui orang lain dan didahului pengajuan permintaannya untuk mendapatkan hak patennya oleh orang lain yang dimaksudkan. (tambahkan pengaturan paten dgn kepentingan pertumbuhan ekonomi dan tehnolog indonesia melalui investasi)

E. PENANAMAN MODAL ASING.

Pemerintah Indonesia dalam mengatasi kesulitan modal , terutama devisa untuk pengadaan prasarana dan sarana untuk menunjang pelaksanaan pembangunan yang segera harus diwujudkan yang meliputi segala bidang ,

dengan penuh penuh kehati-hatian /kewaspadaan telah mempersilahkan perusahaan asing atau kaum modal asing masuk untuk mengembangkan usaha-usahanya di Indonesia.

Penanaman modal asing ini hanya diwenangkan bagi mereka yang hanya berhasrat untuk melakukan usaha /menjalankan perusahaan , dengan demikian maka pemilik modal secara langsung menanggung risiko dari penanaman modalnya. Adapun modal asing itu, adalah selain alat pembayaran luar negeri yang tidak merupakan kekayaan devisa Indonesia adalah juga alat-alat untuk perusahaan , termasuk penemuan-penemuan baru milik orang asing dan bahan-bahan yang dimasukan dari luar negeri kedalam wilayah Indonesia dalam bentuk hukum yang diikat dengan Lisensi,dan selama alat-alat tersebut tidak dibiayai dari kekayaan devisa Indonesia.

Perusahaan Modal asing yang dapat didirikan itu harus merupakan satu kesatuan perusahaan tersendiri dan harus berbentuk badan hukum menurut hukum Indonesia,dan berkedudukan di Indonesia ,yang daerahnya usahanya ditetapkan oleh pemerintah ,demikian juga dengan tentang macamnya perusahaan ,besarnya penanaman modal dan keinginan pemilik modal agar tidak bertentangan dengan dengan rencana pembangunan ekonomi

nasional dan ekonomi daerah dapat tertunjang dengan adanya perusahaan asing tersebut.

Dengan demikian jelaslah bahwa kebijakan pemerintah dalam mengatur penanaman modal asing , sehingga penanaman modal asing tidak akan berarti pemasaran -pemasaran terhadap kekayaan alam Indonesia dan para tenaga bangsa Indonesia . Makna dari pasal 4 UU no. 1 tahun 1967 menyatakan bahwa syarat pertama yang harus dipenuhi oleh para penanam modal asing haruslah terlebih dahulu memiliki perijinan dari Pemerintah , yang berarti pula bahwa pemilik modal asing harus menyepakati segala ketentuan pemerintah Indonesia , mentaati kewajiban-kewajiban yang ditentukan pemerintah serta menjauhi larangan-larangan yang telah diharuskan .Karena dengan dikeluarkannya perijinan berarti telah terjadi kesepakatan antara pemerintah dengan pihak pemilik modal asing tersebut (vide pasal 1320 ,pasal 1313, dan pasal 1338 KUHPerdara.

Untuk maksud pengaturan penanaman modal asing ini pemerintah telah mengeluarkan selain UU PMA juga Keputusan Presidium Kabinet RI nomor 17/EK/I/1967 tentang pembentukan Badan Pertimbangan Penanaman modal asing , yang kemudian dicabut dan diubah dengan

Keputusan Presiden nomor 286 tahun 1968 tentang Pembentukan Panitia Teknis PMA.

Dengan demikian maka jelas bahwa penanaman modal asing walau sangat kita butuhkan , tidaklah Pemerintah gegabah dalam pemberian izin-izinnyz, melainkan harus melalui pertimbangan yang cermat dan dalam pelaksanaannya akan diawasi secara seksama agar jangan sampai merugikan perekonomian nasional /daerah dan kehidupan masyarakat yang ada disekitar perusahaan dengan PMA tersebut . Hal diatas ternyata dimaklumi oleh pihak para PMA , bahwa cara yang ditempuh Pemerintah bukan berarti mempersulit masuknya modal asing ke Indonesia,tetapi merupakan kebijaksanaan yang wajar mengingat pengalaman-pengalaman dimasa lampau tentang tindak-tanduk pengusaha asing yang terlalu mengutamakan kepentingannya, tidak memberikan kesempatan untuk alih teknologi dengan tetap mempertahankan kedudukan-kedudukan penting dalam perusahaannya untuk ditempati oleh tenaga-tenaga ahli mereka dan menjadikan tenaga-tenaga Indonesia sebagai buruh dengan upah rendah ,bahkan sempat pula merugikan /mengganggu ketertban,keamanan masyarakat.

Kebijaksanaan Pemerintah dalam pelaksanaan PMA ,yang melalui pertimbangan-pertimbangan yang matang dan

mantap ini, ternyata telah berhasil menggugah kesadaran para pemilik modal asing bahwa izin yang diberikan kepada mereka untuk melakukan usaha-uashanya di Indonesia mengandung amanat untuk berpartisipasi menunjang pembangunan di Indonesia , sebagai rasa kemanusiaan untuk turut serta dalam mengembangkan dan meningkatkan kesejahteraan hidup bangsa Indonesia . Hal ini terbukti dengan adanya :

- A. kesediaan mereka untuk melakukan alih tehnologi;
- B. penyediaan fasilitas-fasilitas pendidikan kejuruan baik yang diadakan dilingkungan perusahaan maupun di luar negri.
- C. Pemberian kesempatan kepada tenaga-tenaga tekhnisi Indonesia untuk menduduki jabatan-jabatan penting dalam perusahaannya;
- D. Turut serta membantu kehidupan masyarakat disekitar perusahaannya dari berbagai kesulitan/musibah yang menimpinya.

Bahwa pemerintah pada tiap kali menyusun Rencana-rencana Pembangunan memperhatikan perkembangan teknologi dan ekonomi akan menetapkan perincian bidang-bidang usaha yang terbuka bagi modal asing menurut prioritas yang urutan dan syarat-syaratnya telah ditentukan , sehingga penerimaan atau pelaksanaan

penanaman modal asing tersebut selalu seirama dengan pelaksanaan pembangunan di Indonesia.

Dengan demikian maka jelaslah bahwa rencana dan pelaksanaan PMA selalu dilakukan dengan hati-hati ,diatur sedemikian rupa sehingga pada akhirnya setelah kita menguasai teknologi -teknologi yang mutakhir serta permodalan yang cukup.

Tentang produksi selanjutnya bagi produk-produk yang dilindungi UU Paten ,tidaklah menjadi masalah karena selain dapat diusahakan dengan cara lisensi ,terdapat pula ketentuan bahwa penemuan-penemuan yang mengenai kepentingan umum. Pemberian lisensi adalah merupakan suatu kewajiban yang dapat dipaksakan oleh Dewan Paten ,dan tehnisi bangsa kitapun dengan sendirinya akan mampu mengembangkan lebih lanjut.

UPT-PUSTAK-UNDIP

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Objek Penelitian

Dalam penelitian ilmiah diperlukan metode pendekatan yang tepat sesuai dengan permasalahan yang telah ditentukan . Pendekatan masalah yang dipilih dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Berdasarkan pendekatan tersebut objek penelitian ini meliputi lingkup penelitian inventarisasi hukum positif yang merupakan kegiatan pendahuluan dan bersifat mendasar untuk melakukan penelitian hukum in Concreto merupakan usaha untuk menemukan apakah suatu peraturan yang telah ada , telah sesuai saat diterapkan pada situasi kongkrit.

B. Pendekatan Masalah

Ruang lingkup penelitian ini adalah Ilmu Hukum sub Hukum Perusahaan yang menyangkut Hukum Paten dan Penanaman Modal Asing.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah melakukan penelitian hukum empiris atau metode induktif , digunakan pendekatan ini karena melalui pendekatan ini hukum tidak dipandang hanya sebagai peraturan atau kaidah-kaidah saja , akan tetapi juga meliputi bagaimana bekerjanya hukum

dalam masyarakat serta bagaimana hukum berinteraksi dengan lingkungan dimana hukum itu diberlakukan.

Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif. Sebagai penelitian yang bersifat deskriptif , penelitian ini ingin memperoleh informasi secara factual yang mendetail untuk memperoleh justifikasi keadaan dan melukiskan realitas adanya suatu perubahan dalam masyarakat karena diberlakukannya suatu peraturan atau undang-undang baru dalam masyarakat.

Disamping penelitian seperti hal tersebut diatas maka akan diterapkan penelitian kualitatif , yaitu penelitian yang menekankan pada analisis secara mendalam dan holistic (pengkajian data dari berbagai aspek).

Pendekatan yuridis empiris dilakukan khususnya dalam menganalisa data dengan mengacu kepada norma-norma hukum yangterdapat dalam GATT , TRIPs, Undang-undang no.6 tahun 1989 jo Undang-undag no. 13 tahun 1997 jo Undang-undang no. 14 tahun 2001 tentang Paten dan Undang-undang no. 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing .

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Jakarta dengan pertimbangan pusat industri PMA dan informasinya mudah didapat.

D. Teknik penentuan sample

Populasi yang diteliti adalah Dirjen Haki , Deperindag , BKPM. Sedangkan penarikan sample dilaksanakan dengan mewawancaraai responden meliputi , para staff dirjen Haki , Pengusaha PMA , staff Dinas Perindustrian ,serta informan kunci atau ahli yang dianggap mempunyai banyak data mengenai bidang Paten dan Penanaman Modal Asing.

E. Teknik Pengumpulan data

Mengingat penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris , maka yang diperlukan adalah data sekunder sebagai data awal , namun dalam penelitian ini juga membutuhkan data primer yang diperoleh dengan wawancara (interview) dilakukan tidak terarah (non directive interview) yang tidak berdasarkan pada suatu daftar pertanyaan yang sebelumnya sudah disusun terlebih dahulu . Disini peneliti tidak memberikan pengarahan-pengarahan , akan tetapi terserah kepada informan yang diwawancara untuk memberikan penjelasan menurut kemauannya sendiri

Sedangkan pengumpulan data sekunder dilakukan melalui study pustaka (Library research) , yakni terhadap dokumen dan bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

Disamping pendekatan penelitian kualitatif dan kuantitatif tersebut diterapkan juga metode komparatif , yaitu membandingkan konsep, latar belakang politik, social, kebiasaan , fungsi suatu peraturan maupun kondisi bisnis.

F. Metode Analisa Data

Pada tahap penyajian data , seluruh data yang diperoleh dikumpulkan , kemudian disusun dalam suatu susunan yang komprehensif.

Analisis data dilakukan secara induktif. Prosesnya dimulai dari premis-premis yang berupa norma hukum positif yang diketahui dan melalui proses Sylogisme akan memperoleh kesimpulan.

Dalam tahap penyajian data ini pula , digunakan metode analisis normatif kualitatif , karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif . Sedangkan kualitatif dimaksudkan analisis data yang bertitik tolak pada usaha-usaha penemuan hukum dan informasi-informasi yang bersifat uraian monografis dari responden.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Keterkaitan antara Perlindungan Paten dan Penanaman modal Asing.

Teknologi mengandung keterampilan ,pengetahuan untuk memproses sesuatu menjadi produk yang dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga pengertian teknologi dipergunakan dalam arti ekonomi. Dengan lain perkataan, teknologi yaitu pengetahuan dalam arti yang seluas-luasnya mengenai teknik mengerjakan sesuatu untuk menghasilkan produk yang diperlukan orang banyak dalam kehidupan masyarakat. Pengetahuan mengenai teknik ini dapat diperoleh baik dari pengalaman karena belajar dari orang lain, maupun karena tradisi.

Interaksi antara manusia dengan manusia lainnya dalam masyarakat, terutama manusia yang teknologinya telah tinggi dengan manusia yang bekerja dalam lingkungan atau di bawah bimbingan manusia di atas dapat menimbulkan saluran-saluran peralihan teknologi.

Demikian pula karena tiap-tiap negara mempunyai teknik sendiri-sendiri sehubungan dengan kemajuannya yang berbeda-beda. Ada negara yang bidang teknologinya

telah maju, ada yang kurang maju dan ada pula yang terbelakang.

Bagi negara-negara berkembang (dalam hal ini termasuk Indonesia), dalam hal meningkatkan pembangunannya tidak harus menemukan teknologi secara sendiri-sendiri, akan tetapi lebih efisien apabila melaksanakan alih teknologi dari para penanam modal asing dari negara-negara maju, tanpa melupakan usaha untuk menemukannya sendiri.

Sebagai negara berkembang dan lebih-lebih karena negara kita bertekad untuk meningkatkan pembangunan industri di samping pembangunan sektor pertanian, maka alih teknologi itu merupakan cara yang sangat berdaya guna dan berhasil guna, kalau dikaitkan dengan waktu dan biaya. Melimpahnya penduduk ($\pm 2,3$ %/ tahun), kurangnya lapangan pekerjaan sangat memerlukan teknologi terpilih yang tepat guna, yaitu teknologi yang dapat membawa kemajuan, dapat menyerap pengangguran sehingga mendatangkan kesejahteraan bagi segenap rakyat. Kunci peralihan teknologi yang menguntungkan terletak dalam cara peralihannya.

Tentang peralihan teknologi ada beberapa cara, yaitu:

a. Memperkerjakan tenaga-tenaga asing secara perseorangan.

b. Menyelenggarakan supplies mesin-mesin dan sarana - sarana lainnya (supply ini dilaksanakan dengan melalui kontrak dan biasanya untuk peralihan operasional teknologi. Cara pembayarannya di samping pembayaran jasa-jasa secara tersendiri, dapat juga dilaksanakan pembayaran setelah termasuk perhitungan dengan harga mesin-mesin atau sarana teknik lainnya).

c. Perjanjian lisensi (*Technology Lisence Agreement*) dengan cara ini berarti pemilik teknik mengalihkan teknologinya dengan jala memberikan lisensi kepada pihak lain dalam ikatan perjanjian untuk memproduksi sesuatu produk.

d. Berupa asistensi atau bantuan teknik, berupa keahlian dalam berbagai tahap pelaksanaan, seperti pemasangan dan menjalankan mesin-mesin yang serba mutakhir, bantuan umum, bantuan khusus, bantuan dalam manajemen, spesifikasi mesin-mesin dan lain sebagainya.

Tentang saluran untuk alih teknologi dengan demikian dapat berupa :

- a. Kerja sama antar negara
- b. Kerja sama antar perusahaan
- c. Penelitian dan pengembangan
- d. Kerja sama antar lembaga-lembaga internasional

1. MODAL ASING.

Permodalan dari luar negeri pada umumnya meliputi segala bantuan permodalan untuk membangun sarana-sarana industri dan produksi yang sulit dibiayai oleh permodalan di dalam negeri. Bentuk permodalannya ada yang berbentuk grant yaitu bantuan permodalan dalam ikatan negara dengan negara atau antar pemerintah dengan pemerintah seperti halnya dengan IGGI, khusus dari negara Belanda, USA dan negara-negara eropa lainnya, dari Bank Pembangunan Dunia, dari Jepang dan ada pula yang berbentuk Joint Venture dengan perusahaan-perusahaan besar asing yang menanamkan modalnya di tanah air kita.

Pembangunan pabrik-pabrik yang memproduksi barang-barang teknik (peralatan besar, kapal, kapal terbang, kendaraan-kendaraan, pertambangan, perkebunan besar dan lain sebagainya), barang-barang kimia-farmasi, tekstil, perkayuan, peternakan dan lain sebagainya, yang kesemuanya itu memerlukan penanaman modal asing yang sekaligus dapat melaksanakan alih teknologi yang dalam pelaksanaannya harus dibatasi dengan peraturan-peraturan yang tegas agar tidak sampai mengikat dan mempengaruhi jalannya pemerintahan dan kebebasan negara kita.

Tentang penanaman modal asing di negara kita dalam perjalanan sejarahnya dapat dikemukakan sebagai berikut :

- a. Pada periode kabinet Ali Sastroamijoyo S.H. yang pertama (1952-1953) telah dipersiapkan peraturan untuk menarik penanaman modal asing di tanah air kita. Selanjutnya pada tahun 1953 telah dapat diajukan rancangan Undang-Undang Penanaman Modal Asing yang mengandung syarat-syarat sedemikian rupa agar penanaman modal asing itu tidak menimbulkan dampak negatif yang dapat menghambat pelaksanaan pembangunan di negara kita. RUU ini ternyata tidak mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
- b. Baru pada tahun 1958 Undang-Undang nomor 78 tentang penanaman modal asing dapat diberlakukan di tanah air kita, setelah mengadakan restriksi-restriksi yang lebih kuat daripada RUU penanaman modal asing yang ditolak Dewan Perwakilan Rakyat pada tahun 1953.
- c. Pada tahun 1965 UU no. 78/1958 tersebut dinyatakan dicabut dengan adanya Undang-Undang nomor 16 tahun 1965 karena Presiden Sukarno bertekad untuk melakukan pembangunan secara

berdikari, modal asing dianggapnya sebagai penghisapan atas rakyat serta menghambat revolusi Indonesia.

- d. Setelah terjadinya peristiwa G 30 S/PKI tahun 1965 pemerintah Orde Baru dibawah Presiden Suharto berpandangan sangat luas, pembangunan tanpa dukungan modal dan keahlian yang cukup tidak mungkin akan mencapai keberhasilan. Modal sangat diperlukan asal tidak menjadikan ketergantuan dan merugikan kepentingan hidup segenap rakyat Indonesia. Hal ini tercermin dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1967 tentang penanaman modal asing yang hingga kini manfaatnya terasa benar sehingga pembangunan dapat terlaksana di seluruh tanah air tanpa adanya ketergantungan. Dengan demikian maka Indonesia telah mengalami perubahan pandangan terhadap penanaman modal asing sebanyak empat kali, hal mana disebabkan oleh perubahan-perubahan sosial dan politik serta kehidupan perekonomian di negara kita.

Masalah Pemerintah dalam hal membuka pintu bagi aktivitas modal asing adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana memperbesar hasil valuta asing baik untuk keperluan pengembalian hutang maupun untuk pembangunan.
- b. Bagaimana meningkatkan produksi serta kaitannya dengan alih teknologi
- c. Bagaimana memperbesar pendapatan per kapita
- d. Bagaimana memperluas kesempatan dan lapangan kerja

Prinsip pemerintahan order baru dalam hal membuka pintu bagi penanaman modal asing yang tergambar baik dari UU nomor 1/1967 maupun dari repelita-repelitanya adalah :

- a. Penanaman modal asing diberi kesempatan bila hal itu dapat mendorong pembangunan serta tidak merugikan kepentingan nasional, tidak merugikan kegiatan rakyat dalam berusaha, khususnya para pengusaha nasional agar penanaman modal asing itu tidak menjadikan gulung tikarnya perusahaan-perusahaan nasional atau terhalangnya perkembangan perusahaan-perusahaan nasional tersebut.
- b. Pemerintah tidak secara apriasi menerima dan memanfaatkannya tanpa adanya tujuan tertentu yang berkaitan dengan alih teknologi, yang artinya

bahwa bersamaan dengan investor asing menanamkan modalnya di Indonesia, para investor asing harus dapat atau berusaha meng-up grade diri dengan memanfaatkan kehadiran para penanam modal tersebut sebagai guru ataupun sebagai partner sehingga dengan demikian akan diperoleh kemajuan-kemajuan yang dapat diterapkan sendiri dalam pelaksanaan pembangunan selanjutnya.

Ternyata UU no. 1/1967 telah berhasil menarik perusahaan-perusahaan besar asing untuk menanamkan modalnya di negara kita. Perusahaan-perusahaan tersebut dengan sendirinya bermaksud mengembangkan usaha-usaha produksinya, terutama agar barang-barang yang telah diproduksi di negaranya dapat diproduksi pula di Indonesia sehingga mereka memperoleh keuntungan dan bagi kita pun diperoleh pula keuntungan berupa:

- a. Keuntungan di bidang keuangan
- b. Keuntungan dengan adanya penyerapan tenaga kerja
- c. Keuntungan dalam wujud peningkatan teknologi bagi para pengusaha nasional dan para tenaga kerja bangsa kita

d.Keuntungan dalam wujud bangunan-bangunan apabila perjanjiannya telah habis waktu (\pm 30 tahun, pasal 18 UU no. 1/1967).

Mengenai ad.b, pasal 10 UU no. 1/1967 menyatakan sebagai berikut : " Perusahaan-perusahaan modal asing (PMA) wajib memenuhi kebutuhan akan tenaga kerjanya dengan warga negara Indonesia kecuali dalam hal-hal tenaga pimpinan dan tenaga-tenaga ahli yang belum dapat ditangani oleh tenaga-tenaga Indonesia ". Yang dalam hal ini agar tenaga-tenaga itu kelak sepenuhnya dapat ditangani oleh tenaga-tenaga Indonesia, maka pasal 12 UU no. 1/1967 melahirkan ketentuan sebagai berikut : " Perusahaan-perusahaan modal asing berkewajiban menyelenggarakan dan / atau menyediakan fasilitas- fasilitas latihan dan pendidikan didalam dan / atau di luar negeri secara teratur dan terarah bagi warganegara Indonesia dengan tujuan agar berangsur-angsur tenaga-tenaga warganegara asing dapat diganti oleh tenaga-tenaga warganegara Indonesia".

Perusahaan-perusahaan asing yang menanamkan modalnya itu akan memproduksi barang-barang yang dinegerinya telah dilindungi oleh hak paten atau berdasarkan lisensi (hak yang diberikan kepada

orang lain / perusahaan lain untuk mempergunakan penemuannya disebabkan si pencita / perusahaan yang menciptakannya telah memberikan izin / wewenang kepada perusahaan lain), seperti misalnya : perusahaan assembling Vespa, Toyota, Honda, Bajay, pabrik mesin Yanmar, pabrik obat-obatan Bayer, Squibb dan lain sebagainya, pabrik pembuatan kapal laut, kapal terbang, industri penggergajian kayu dan lain sebagainya.

Dari uraian diatas ini jelas bahwa penanaman modal asing di tanah air kita, ditinjau dari segi hukum ternyata banyak berkaitan dengan hukum paten, artinya para pengusaha asing mengembangkan produk-produknya yang telah dilindungi paten.

Dengan bekerja samanya para teknisi asing dengan para teknisi nasional, kemungkinan pula para teknisi Indonesia akan dapat menemukan produk-produk baru sebagai peningkatan kualitas dan desain dari produk-produk pokok yang dilindungi hukum paten (*afhankelijk octrooi* / paten tergantung). Selain kemungkinan di atas, karena operasi perusahaan-perusahaan asing di negara kita sesuai dengan perjanjian penanaman modalnya hanya akan berlaku 30 tahun, maka setelah perjanjian tersebut terpenuhi

masa berlakunya, dengan perjanjian khusus para pengusaha nasional kita dapat terus melaksanakannya / menangani perusahaan-perusahaan ex asing itu dengan memproduksi produk-produk atas dasar lisensi atau atas dasar haknya yang dilindungi oleh paten tergantung (*afhankelijk octrooi*).

2. PRODUK YANG MENGGUNAKAN HAK PATEN ASING BERDASARKAN LISENSI.

Dalam penanaman modal secara *Joint Venture* (kerjasama antara pemilik modal asing dengan pemilik modal nasional) atau yang lebih disukai yaitu *Joint Enterprise* (kerjasama antara perusahaan nasional dengan perusahaan asing) kita mengenal suatu persetujuan (*agreement*) yang bernama : " *FRANCHISE AND BRAND USE AGREEMENT* ". Persetujuan mana digunakan apabila suatu perusahaan nasional (dalam negeri) berhasrat memproduksi suatu barang yang telah mempunyai merk telah terkenal dan dilindungi oleh undang-undang paten seperti halnya Coca Cola, Honda, Toyota, Bata, Rokok 555 dan lain sebagainya, maka dalam persetujuan mana ditentukan hal-hal yang wajib ditaati, ketentuan bagi keuntungan, cara-cara kerja dan lain sebagainya.

Ketentuan tentang produk menyangkut tentang mutu, bentuk, ukuran, berat dan rasa yang harus sama dengan produk-produk yang aslinya yang telah dilindungi hukum paten.

Dengan adanya kerjasama antara perusahaan asing dengan perusahaan nasional dengan dasar "*Franchise and Brand Use Agreement*", maka Indonesia tidak perlu lagi mengimpor produk-produk yang penting bagi peningkatan kesejahteraan rakyat, bahkan karena produk-produk yang dihasilkan kerjasama perusahaan tersebut melebihi kepentingan / kebutuhan dalam negeri, Indonesia dapat pula mengekspornya.

Tentang kerjasama modal asing dan modal nasional tersebut diwenangkan berdasar ketentuan pasal 23 bab IX UU nomor 1 tahun 1967, yang dalam hal ini tentang bidang-bidang usaha, bentuk-bentuk dan cara-cara kerjasama, pemanfaatan modal dan keahlian tenaga asing, produksi barang-barang dan jasa serta bidang ekspornya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Pemerintah (ayat 2 pasal diatas) sehingga dengan demikian kerjasama usaha ini dapat diarahkan kepada produksi barang-barang yang belum dapat ditangani sendiri oleh tenaga-tenaga Indonesia ataupun karena

terikat oleh hak paten, tenaga-tenaga ahli Indonesia sebelum terjadinya kerjasama ini tidak berani untuk melanggar hak paten tersebut walaupun kemampuan untuk memproduksi telah ada.

Bila kita mengaitkan kerja sama antara perusahaan asing dengan perusahaan nasional dengan batas ketentuan pemberian lisensi yang hanya berlaku untuk 3 tahun, maka kerja sama antar perusahaan ini jelas lebih banyak menguntungkan dunia usaha bangsa kita, daripada membiarkan perusahaan nasional mengusahakan sendiri lisensi tersebut.

Joint enterprise dengan industri kendaraan Jepang (misalnya Toyota) untuk perakitan (*assembling*) kendaraan - kendaraan tersebut di Indonesia adalah lebih banyak menguntungkan daripada perusahaan nasional kita meminta lisensi dari pemegang patennya. Keuntungan-keuntungan tersebut antara lain :

- a. Batas kerjasama itu dapat berlangsung sampai 30 tahun(sesuai dengan pasal 18 bab VII UU nomor 1/1967).
- b. Kendaraan-kendaraan Toyota yang dirakitnya dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan keadaan di tanah

air kita, misalnya Toyota Kijang, Toyota Mini Bus dan lain- lain.

- c. Alih teknologi dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sehingga pada waktu perjanjian kerjasama ini berakhir, para tenaga Indonesia dapat sepenuhnya melaksanakan pembuatan kendaraan-kendaraan tersebut, baik atas dasar lisensi untuk meneruskan produksi Toyota Kijang dan lain-lain, ataupun atas dasar dimilikinya paten tergantung (*afhankelijk octrooi*) dari paten pokoknya.
- d. Perusahaan yang terbentuk atas dasar kerja sama ini merupakan kesatuan perusahaan tersendiri yang berbentuk badan hukum Indonesia sehingga tidak akan bertentangan dengan hukum-hukum yang berlaku di tanah air kita atau jelasnya tidak akan merugikan kepentingan negara (pasal 26 UU no. 1/1967).

Kalau perusahaan nasional bekerja sendiri untuk memproduksi produk-produk atas dasar lisensi selain memberikan keuntungan demikian saja kepada pemegang hak patenya juga perpanjangan waktu penggunaan lisensi harus diulangi secara terus - menerus (ingat batas waktu pemberian lisensi), tanpa mengingat apakah perusahaan nasional itu

berhasil atau tidaknya dalam mengembangkan / memproduksi penemuan yang telah dilindungi hak paten tersebut.

Uraian di atas ini menyangkut penjelasan yang telah dikemukakan di bagian depan, bahwa setiap pemilik paten dapat menarik keuntungan dari patennya yaitu dengan cara pemberian lisensi kepada pihak lain atas dasar persetujuan / perjanjian dimana pihak lain itu diharuskan memberi imbalan yang berupa sejumlah uang pengganti yang dapat dibayar secara sekaligus atau secara periodik, sedangkan batas waktu pemberian lisensi kepada pihak lain tersebut adalah 3 tahun yang dapat diperpanjang dengan mengadakan perjanjian-perjanjian perpanjangan. Setiap kali perjanjian perpanjangan penggunaan lisensi maka perusahaan nasional yang bersangkutan wajib membayar uang pengganti atas pemakaian lisensinya, tanpa mengingat berhasil atau tidaknya atau berkembang dan mundurnya usaha produksinya.

Dengan demikian maka jelas bahwa kerjasama antara perusahaan nasional dengan perusahaan asing yang menanamkan modalnya di tanah air kita yang memproduksi barang-barang yang dilindungi paten

adalah sangat menguntungkan perusahaan nasional, lebih-lebih kalau dikaitkan dengan pembangunan sarana fisik, alih teknologi dan kemungkinan-kemungkinan dimiliki saham-sahamnya oleh para pengusaha nasional kita.

3. HUBUNGAN ANTARA PMA DENGAN PATEN DALAM ALIH TEKNOLOGI.

Suatu perusahaan joint venture yang bergerak dengan mengusahakan produksi barang-barang sejenis yang telah diproduksi di negara asal perusahaan asing yang melakukan kerjasama itu, hal ini berarti suatu pengembangan dari barang-barang tersebut di tanah air kita.

Pada hakekatnya penanaman modal asing baik dalam rangka joint venture maupun joint enterprise di negara-negara berkembang dikarenakan industri pada negara-negara maju tengah menghadapi bahaya kelebihan produksi dinegaranya, sedang pemasaran di negara-negara berkembang mengalami beberapa rintangan / halangan seperti pengangkutan, liku-liku peraturan serta biaya pemasukan ke negara-negara berkembang dan di negara-negara berkembang itu sendiri, risiko perdagangan dan lain sebagainya.

Karena itulah dengan terbukanya kesempatan penanaman modal asing di negara berkembang (misalnya Indonesia) perusahaan-perusahaan negara maju itu berarti mempunyai kesempatan untuk mengembangkan produksi barang-barangnya dimana Indonesia telah diperhitungkan akan memberikan keuntungan yang besar mengingat potensi permintaan akan produk-produk tersebut cukup besar, bahan-bahan baku muda diperoleh, tenaga kerja masih merupakan tenaga upahan yang relatif murah, adanya kelonggaran-kelonggaran perpajakan dan pungutan-pungutan lain (pasal 15 bab VI UU no. 1/ 1967 jo pasal 16 dan 17) dan keadilan dalam memperoleh keuntungan, disamping situasi dalam negerinya yang aman yang dapat memperlancar usaha.

Para penanam modal asing itu baik dalam bentuk *direct investment*, *joint venture* maupun *join enterprise* dengan sendirinya akan mengembangkan produksi barang-barang yang telah dilindungi paten yang dalam mewujudkannya sebagai produk-produk perdagangan internasional (komoditi) telah ditunjang dengan penggunaan teknik-teknik yang tinggi / mutakhir. Dengan demikian dalam usaha mengembangkan produk-produk tersebut di tanah air

kita, mereka akan membangun pula pabrik-pabrik yang mutakhir, manajemen produksi dan pemasaran yang didukung dengan skill yang diterapkan secara mantap dan lain sebagainya, yang mungkin bagi para pengusaha di negara kita segera kemutakhirannya itu masih asing atau belum terbiasa dilakukan.

Kemutakhiran dalam proses produksi dan kemantapan dalam manajemen perusahaan inilah merupakan salah satu keuntungan bagi para pengusaha nasional kita, untuk mana para pengusaha nasional dapat mempelajari, mencontoh atau menyesuaikan diri dalam rangka joint venture atau joint enterprise guna memproduksi barang-barang yang dikembangkan oleh para penanam modal asing.

Sehubungan dengan produksi dilakukan di tanah air kita, maka para pengusaha nasional beserta seluruh karyawannya yang tergabung dalam perusahaan joint venture atau joint enterprise itu mau tidak mau akan berdaya upaya pula untuk melakukan proses produksi menurut pola produksi kemutakhiran, penjagaan kualitas, ukuran, bentuk dan sifat produk yang sesuai dengan produk pokok yang telah dilindungi paten tersebut, sehingga setahap demi

setahap akan berlakulah alih teknologi (*transfer of technology*).

Suatu hal yang patut kita banggakan dari para perancang undang-undang penanaman modal asing (UU no. 1 / 1967) dimana mereka telah berhasil menyelipkan ketentuan-ketentuan untuk mempercepat *transfer of technology* tersebut, sehingga terjamin dengan kepastian hukum bahwa setiap perusahaan asing yang melakukan operasi di tanah air kita atas dasar penanaman modalnya wajib melakukan alih teknologi tersebut kepada para karyawan bangsa Indonesia yang didayagunakan di perusahaan-perusahaannya, sehingga dalam waktu singkat para karyawan bangsa kita itu telah dapat menguasai keterampilan-keterampilan secara mutakhir, teknik-teknik penciptaan produk baru, teknik penggunaan bahan baku, teknik pemasaran dan lain-lain yang menyangkut kemutakhiran berproduksi telah dapat ditangani sendiri oleh para pengusaha dan para karyawan bangsa kita. Produk yang dimaksudkan (yang sesuai dengan kualitas, bentuk, sifat dan ukuran produk yang dilindungi paten) mendapat jaminan penuh bahkan kemungkinan lebih baik yang dihasilkan oleh putra-putra Indonesia, sehingga para penanam modal asing tidak

akan mengalami kerugian dalam menjalankan usahanya di tanah air kita.

Transfer of technology sangat menguntungkan tenaga-tenaga kerja bangsa kita yang bekerja pada perusahaan PMA, perusahaan joint venture ataupun perusahaan joint enterprise dimana karyawan-karyawan Indonesia itu akan dapat lebih meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya untuk melangsungkan proses produksi yang peralatannya serba mutahir, keuntungan lainnya setelah merek berhasil mengganti tenaga-tenaga asing (pasal 11 dan 12 UU no.1/1976) maka penghasilannya pun akan meningkat sesuai dengan jabatan-jabatan atau kedudukan-kedudukannya dalam perusahaan yang bersangkutan.

Pasal 11 UU no. 1/1976 menyatakan sebagai berikut

:

" Perusahaan - perusahaan modal asing diizinkan mendatangkan atau menggunakan tenaga-tenaga pimpinan dan tenaga-tenaga ahli warganegara asing bagi jabatan-jabatan yang belum dapat diisi dengan tenaga kerja warganegara Indonesia. "

Pasal 12 UU no. 1 / 1976 berisi ketentuan sebagai berikut :

" Perusahaan-perusahaan modal asing berkewajiban menyelenggarakan dan / atau menyediakan fasilitas-fasilitas latihan dan pendidikan di dalam dan / atau diluar negeri secara teratur dan terarah bagi warganegara Indonesia dengan tujuan agar berangsur-angsur tenaga-tenaga warganegara asing dapat diganti oleh tenaga-tenaga warganegara Indonesia. "

B. Hambatan-hambatan yang timbul dalam perlindungan Paten yang terkait dengan PMA :

1. Penegakan Hukum/Law Enforcement

Penegakan hukum merupakan hal yang sangat penting dalam usaha pelaksanaan ketentuan TRIPS tidak hanya dapat berakhir sampai dilaksakannya persyaratan minimum dari ketentuan TRIPS tersebut tetapi juga pada penekanan sistim hukum di negara-negara berkembang yang berkaitan dengan pelaksanaan penegakan hukunya.

Pelaksanaan TRIPS akan mencakup juga persyaratan pada revisi undang-undang nasional yang meliputi ketentuan yang berkaitan prosedur dan penanggulangan untuk penegakan hukum di bidang hal kekayaan intelektual termasuk hal yang berkaitan dengan hukum perdata (civil Law)/sengketa perdata, kriminal/sangsi pidana dan prosedur administrasi termasuk si dalamnya menyangkut

peranan polisi, be cukai dan penegakan hukum lainnya serta dalam pelaksanaan TRIPs harus mencakup secara luas dan Komprehensif sistim hukum serta penegakan hukumnya.

Hal tersebut seperti antara lain: *injunction, damages, including recovery of profit and expences, including attorneys fees; destruction on other disposal of infringing goods and material/implements for their production.*

Artinya penegakan hukum di bidang Hak Kekayaan Intelektual pengaturannya tidak selalu harus ada di bidang Hak Kekayaan Intelektual (*Intellectual Property Law*) itu sendiri ada pada peraturan-peraturan lain seperti Hukum Acara Perdata, Hukum Acara Pidana, Undang-undang varitas Tanaman, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan dan lainnya.

Disini dapat dijelaskan sedikit tentang kepabeanan yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean dan pemungutan bea masuk sebagai contoh pajak atas barang impor, pengawasan ekspor dan impor barang. Dan cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam Undang-

undang No.11 Tahun 1995 sebagai contoh cukai rokok, cukai kaset.

Bagi negara-negara anggota *World Trade Organization* (termasuk di dalamnya pelaksanaan TRIPs), dalam melaksanakan liberalisasi perdagangan tidaklah cukup dengan menyiapkan perangkat hukum, menyiapkan administrasi pengelolaan dan pendaftaran, serta meningkatkan sumber daya manusia yang tak kalah penting adalah penegakan hukum.

Penegakan hukum adalah merupakan langkah strategis untuk melaksanakan Undang-undang paten secara konsisten, dimana pada saat ini banyak terjadi kasus-kasus di bidang Hak Kekayaan intelektual seperti peniruan-peniruan terhadap produk Hak Kekayaan Intelektual yang dilakukan oleh sementara pihak di Indonesia.

Dalam periode 2002-2003 pada bulan Mei tahun 2003 Indonesia oleh pihak Amerika Serikat (*United States Trade representative*) masih tetap ditempatkan dalam kelompok *priority watch list* artinya walaupun Indonesia dari satu segi peraturan perundang-Undangan telah melakukan perubahan sesuai dengan ketentuan persetujuan TRIPs namun dalam pelaksanaannya masih terjadi banyak pelanggaran di bidang Hak Kekayaan intelektual artinya

di mata Amerika Serikat belum ada perubahan yang berarti.

Hal ini terjadi karena penegakan hukum di Indonesia masih sangat lemah didukung juga adanya faktor belum adanya persepsi yang sama mengenai pelanggaran hak Kekayaan Intelektual oleh aparat penegak hukum, serta kurangnya pengetahuan di bidang Hak Kekayaan Intelektual itu sendiri.

2. Bea Cukai

Bea cukai sebagai penjaga gerbang negara ikut bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan, baik bagi pemilik hak maupun melindungi hak-hak negara dalam bentuk pelarian pajak, sebagai penegak hukum di perbatasan (*border enforcement*) pada saat barang yang dilindungi hak kekayaan intelektual melintasi perbatasan negara.

Dalam rangka melaksanakan ketentuan TRIPs khususnya part II Section 4 tentang *Special Requirement Related to Bordered Measure*, dalam hal ini Dit Jen Bea Cukai mencegah peredaran barang-barang yang melanggar Hak Kekayaan Intelektual yaitu dengan melakukan tindakan penangguhan sementara waktu pengeluaran barang impor atau ekspor dari kawasan pabean¹⁷ tindakan tersebut sesuai dengan persetujuan TRIPs pada pasal 51.

¹⁷ Lihat Undang-undang No.10 Tahun 1995, pasal 54-64

Seperti yang dikemukakan oleh^o Jacques J. Gorlin, perlunya ketentuan penegakan hukum pada bea cukai:

*The TRIPs agreement requires countries to have special border measure that permit the suspension of the release of suspected infringing imports by the customs authorities. These special border provisions, which are mandatory for counterfeit trademarked and pirated copyrighted goods, patents, integrated circuits or right in undisclosed information.*¹⁸

Salah satu aparat penegak hukum terdepan adalah bea cukai yang sebelumnya dalam hasil penelitian telah dijelaskan mengenai tugas dan fungsi dari aparat bea cukai. Aparat Bea dan Cukai dapat mencegah peredaran barang-barang yang melanggar Hak Kekayaan Intelektual yaitu dengan melakukan tindakan penangguhan sementara waktu pengeluaran barang impor atau ekspor dari kawasan pabean. Tindakan penangguhan dapat dilaksanakan berdasarkan surat Perintah dari Ketua Pengadilan Negeri.

3. Kepolisian

Kepolisian adalah Bagian Penegakan hukum/enforcement yang terpenting landasan hukum kepolisian diatur dengan undang-undang Nomor 2 Tahun

¹⁸ Gorlin Jacques J, *An Analysis of Pharmaceutical-related Provisions of the WTO TRIPs (Intellectual Property) Agreement*, Intellectual property Institut, london, 199.p.53

2002 tentang Kepolisian Negara. Kewenangan Polisi Republik Indonesia adalah melakukan penyelidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Tugas Pokok Polisi Republik Indonesia adalah memelihara Keamanan dan ketertiban masyarakat; Menegakkan Hukum; memberikan Perlindungan Pengayoman dan Pelayanan pada masyarakat.¹⁹

Peran Kepolisian Republik Indonesia di bidang Hak Kekayaan Intelektual adalah penegakan hukum atau fungsi represif terhadap tindak pidana Hak Kekayaan Intelektual dengan melaksanakan fungsi penyidikan. Dalam hal ini Polisi Republik Indonesia sebagai penyidik sesuai dengan undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Dalam persetujuan TRIPs diatur pula mengenai penegakan hukum dalam article 41 yang mengemukakan bahwa anggota akan mengusahakan agar prosedur penegakan hukum diatur dalam bagian ini diatur pula hukum nasional sehingga negara anggota untuk memungkinkan tindakan yang efektif terhadap pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual yang diatur dalam persetujuan ini, termasuk cara penyelesaian

¹⁹ Lihat Undang-undang No.2 Tahun 2000 pasal 13

terbaik untuk mencegah pelanggaran itu serta penyelesaian yang menjadi penangkal terhadap pelanggaran lebih lanjut. Prosedur ini akan diterapkan dengan cara yang tidak menimbulkan hambatan terhadap perdagangan yang sah serta yang dapat memberikan pengamanan terhadap penyalahgunaannya.

Maksud dari ketentuan tersebut adalah prosedur penegakan hukum agar dilakukan dengan *fair* dan *equitable*, tidak rumit dan memakan biaya dan pemakaian waktu yang pasti atau penundaan yang tidak beralasan. Pengaturan ini untuk memperkuat kewajiban penegakan hukum dan tidak diinterpretasikan sebagai suatu persyaratan saja.

Keputusan atas suatu kasus sebaiknya dalam bentuk tertulis dan diberi alasan, Keputusan akan mudah diperoleh setidak tidaknya oleh para pihak dalam prosedur itu tanpa kelambatan yang tidak beralasan, keputusan atas suatu kasus akan didasarkan pada suatu bukti dan akan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk didengar.

Para pihak dalam prosedur itu akan memiliki kesempatan untuk meminta kepada pejabat peradilan peninjauan terhadap keputusan *administrative final* dan, tanpa mengurangi berlakunya ketentuan mengenai

yurisdiksi dalam hukum nasional mengenai penting tidaknya suatu kasus terhadap setidaknya-tidaknya satu dari aspek hukum dalam keputusan peradilan tingkat pertama atas suatu kasus. Namun tidak ada kewajiban untuk memberikan kesempatan peninjauan ulang terhadap keputusan bebas yang diberikan dalam kasus pidana.

Ketentuan-ketentuan dalam bagian ini tidak membebankan kewajiban para anggota untuk menciptakan sistim judicial penegakan hukum untuk hak milik intelektual yang berbeda dari sistim penegakan hukum pada umumnya, dan juga tidak mempengaruhi kewenangan Anggota untuk menegakkan hukumnya dengan sistim penegakan hukum pada umumnya, Ketentuan-ketentuan dalam bagian ini tidak membebankan kewajiban menyangkut pembagian sumber daya misalnya antara penegakan hukum Hak kekayaan intelektual dan penegakan hukum pada umumnya.

Ketentuan tersebut di atas telah terakomodasi dalam tugas-tugas dari aparat penegak hukum termasuk aparat kepolisian yang merupakan aparat penegak hukum untuk memelihara keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum termasuk Hak kekayaan intelektual dan memberikan perlindungan dan pengayoman pada masyarakat.

4.Kejaksaan

Kejaksaan Republik Indonesia merupakan bagian tak terpisahkan dari Penegakan Hukum. Landasan hukum diatús dalam Undang-undang No.5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan Keputusan Presiden Nomor 86 tahun 1998.

Kejaksaan Republik Indonesia mempunyai tugas pokok melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan tugas-tugas lain berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang hukum.

Dalam melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan, Kejaksaan melakukan tindakan sebagai berikut: (1) Menerima Surat Pemberitahuan dimulainya penyidikan yang dikenal dengan SPDP dari penyidik, SPDP tersebut untuk monitoring penanganan perkara sesuai dengan pasal 10 KUHAP; (2) Memebrikan petunjuk atau konsultasi kepada Penyidik untuk penyempurnaan berkas perkara sesuai dengan pasal 143 KUHAP; (3) memberitahukan bahwa berkas perkara memenuhi syarat untuk disidangkan, jika berkas telah lengkap dan memiliki alat bukti yang cukuo sesuai dengan pasal 139 KUHAP; (4) Melimpahkan perkara ke persidangan untuk disidangkan dan dituntut sesuai dengan Pasal 143 KUHAP;

(5) Mengeksekusi putusan perkara baik terhadap orangnya maupun terhadap barang bukti sesuai pasal 270 KUHP.

Mengingat pentingnya peranan Kejaksaan dalam penegakan hukum kejaksaan mempunyai fungsi sebagai berikut: (1) merumuskan kebijaksanaan dan kebijaksanaan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan serta pemberian perijinan sesuai dengan bidang tugasnya; (2) menyelenggarakan dan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana pembinaan manajemen, administrasi, organisasi dan ketatalaksanaan serta pengelolaan atas kekayaan milik negara yang menjadi tanggung jawabnya; (3) melaksanakan penegakan hukum baik preventif maupun represif yang berintikan keadilan di bidang pidana; (4) menempatkan tersangka atau terdakwa di rumah sakit atau tempat perawatan jiwa atau tempat lain yang layak; (5) Memberikan pertimbangan hukum kepada Instansi pemerintah baik di Pusat maupun di daerah; (6) Menyelenggarakan koordinasi, bimbingan dan petunjuk teknis baik kedalam maupun dengan instansi terkait.

Kejaksaan dengan Hak Kekayaan Intelektual, Hak Kekayaan intelektual dikategorikan sebagai suatu perkara yang penting oleh karena itu yang menangani perkara hak kekayaan intelektual adalah jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum yang telah mengeluarkan surat Nomor B

183/RJ/8/1994 tanggal 1 Agustus 1994 tentang Penerapan dan Penegakan Peraturan perundnag-undangan yang berkaitan dengan hak kekayaan Intelektual.

5. Pengadilan

Pengadilan adalah puncak dari penegakan hukum di Indonesia yang akan memberikan hukum sebagai penjeratan terhadap pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual yang memiliki landasan Hukum: (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan KeHakiman sebagaimana yang telah diamandemen dengan Undang-undnag Nomor 35 tahun 1999. (2) Undang-undang nomor 14 Tahun 1985 tentang mahkamah Agung. (3) Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang peradilan Umum.

Pengadilan memiliki tugas pokok : a) Badan Peradilan adalah menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya sesuai dengan pasal 21 ayat 1 Undang-undnag Nomor 14 tahun 1970. (b) Tugas pokok Mahkamah Agung adalah memutus perkara dalam tingkat kasasi Sengketa tentang kewenangan mengadili dan permohonan Peninjauan Kembali putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Tujuannya untuk menjamin bahwa hukum ditegakkan sebagaimana mestinya secara seragam dan konsisiten.

Dalam pelaksanaan tugas tersebut Hak Kekayaan Intelektual tunduk pada Hukum Acara perdata (HIR: *Herziene Indonesestch Reglemen* yang merupakan hukum acara perdata yang dibuat oleh pemerintah koloni belanda) dan Hukum Acara Pidana yaitu undang-undang Nomor 8 Tahun 1981. disamping itu hak kekayaan Intelektual terkait pada hukum acara yang secara khusus diatur dari kedua sumber hukum diatas seperti penyelesaian perkara Hak kekayaan Intelektual.

Dalam memutuskan Mahkamah Agung tidak melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran fakta-fakta yang telah dilakukan oleh peradilan di tingkat bawahnya Pengadilan negeri menerima memeriksa, mengadili dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan oleh masyarakat. Pengadilan tinggi menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan oleh Pengadilan Negeri. Pembuktian tentang fakta dilakukan oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi. Karena tugasnya tersebut Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi disebut sebagai *judex facti*, sedangkan Mahkamah agung senagai *judex juris*

Mengenai Badan Peradilan terdiri dari 4 (empat) lingkungan sesuai pasal 10 Undang-undang No.14 Tahun 1970 jo Undang-undang Nomor 35 tahun 1999 tentang Pokok-

pokok Kekuasaan Kehak kekayaan Intelektual. Yaitu : (1) peradilan Umum; 92) Peradilan Agama; (3) Peradilan Militer (4) Peradilan Tata Usaha Negara.

Mengenai Lembaga Struktural mahkamah Agung terdiri: (1) Direktorat perdata; 92) Direktorat Perdata Niaga; (3) Direktorat Pidana; (4) Direktorat Tata Usaha Negara.

Badan Peradilan, pada mulanya perkara Hak kekayaan Intelektual berada di bawah kompetensi Peradilan Umum mahkamah Agung setelah berlakunya Undang-undang No.7 Tahun 1994 yang merupakan ratifikasi persetujuan TRIPs yang kemudian diikuti dengan perubahan undnag-undnag di bidang Hak kekayaan intelektual maka perkara-perkara Hak Kekayaan intelektual berada dalam kompetensi pengadialn Niaga. Sebagaimana diketahui telah terbentuk 5 (lima) Pengadilan Niaga di Jakarta, Semarang, Surabaya, Medan dan Makasar.

Mengenai mekanisme penanganan perkara, perkara hak kekayaan Intelektual meliputi perkara pidana dan perkara perdata. Penanganan perkara pidana di bidang hak kekayaan Intelektual sampai saat ini tidak diklasifikasikan sebagai perkara Hak kekayaaan Intelektual melainkan sebagai perkara pemalsuan atau

penipuan, akibatnya statistik khusus perkara pidana di bidang Hak kekayaan Intelektual tidak terdeteksi dan terdokumentasi secara khusus. Sedangkan perkara perdata diklasifikasikan sehingga perkara perdata bidang Hak Kekayaan Intelektual dapat dengan mudah dicatat sebagai mana perkara perdata lainnya seperti kepailitan, waris, jual beli.

Pada saat ini sebagai kewajiban umum para anggota persetujuan TRIPs sesuai dengan article 41 harus menjamin prosedur penegakan hukum dapat diterapkan. Prosedur penegakan hukum Hak Kekayaan Intelektual harus jujur dan adil atau tidak boleh terjadi penundaan yang tak terjamin. Dan para pihak yang berperkara mempunyai kesempatan untuk meninjau kembali melalui lembaga yang yudisial dari putusan administrative final.

Selanjutnya dapat disampaikan aspek-aspek penegakan Hak Kekayaan intelektual sebagaimana diatur dalam persetujuan TRIPs sebagai berikut:

Untuk menyesuaikan dengan persetujuan TRIPs beberapa ketentuan dalam perundang-undangan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia telah dilakukan amandemen secara khusus yang menghasilkan beberapa perubahan yang mendasar dalam hukum secara umum yaitu:

Semua kasus perdata Hak Kekayaan intelektual berada di bawah yurisdiksi Pengadilan Niaga, Masa pemberian putusan baik di pengadilan tingkat pertama maupun pengadilan tingkat lebih tinggi dibatasi oleh waktu tertentu. Jika para pihak tidak puas dengan putusan Hak Kekayaan Intelektual tingkat pertama tidak dapat diajukan banding, namun langsung kasasi Mahkamah Agung. Ada kemungkinan dilaksanakan penetapan sementara berupa suatu perintah pengadilan yang diajukan sebelum kasus tersebut diajukan ke Pengadilan Niaga untuk mengumpulkan barang bukti dan mencegah barang-barang hasil pelanggaran masuk di pasaran.

Pada perkembangan hukum dan prakteknya saat ini adalah untuk hak kekayaan intelektual di Indonesia dalam sistim judicialnya telah diatur dalam undang-undang hak kekayaan intelektual sendiri dan terhadap sengketa hak kekayaan intelektual dapat diajukan Pengadilan Niaga yang pada pengaturan paten sebelumnya sengketa tersebut diajukan kepada Pengadilan Negeri adapun tujuan perubahan tersebut adalah dengan pertimbangan bahwa bidang paten sangat terkait erat dengan perekonomian dan perdagangan, penyelesaian perkara perdata yang berkaitan dengan Paten harus dilakukan secara cepat dan segera sehingga putusan Pengadilan Niaga harus di ucapkan

paling lambat dalam waktu 180 (seratus delapan puluh) hari setelah tanggal gugatan didaftarkan.

Selanjutnya terhadap putusan Pengadilan Niaga hanya dapat diajukan kasasi. Putusan atas gugatan harus diucapkan paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari setelah tanggal gugatan di daftarkan.

6. Penyelesaian Sengketa

Dalam melaksanakan Konsistensi kebijakan Pemerintah dalam ketentuan TRIPS terhadap Pengaturan Paten di Indonesia Undang-undang No 14 tahun 2001 tentang Paten telah mengatur mengenai beberapa penyelesaian Sengketa²⁰ yaitu jika suatu paten diberikan kepada pihak lain selain dari yang berhak berdasarkan pasal 10. Pasal 11 dan pasal 12, pihak yang berhak atas Paten tersebut dapat menggugat ke Pengadilan Niaga. Dan hak menggugat sebagaimana dimaksud berlaku surut sejak tanggal penerimaan. Pemberitahuan isi putusan disampaikan kepada para pihak oleh pengadilan niaga paling lambat 14 hari dan isi putusan tersebut diumumkan oleh Direktorat jendral

7. Ganti Rugi

²⁰ Lihat Undang-undang No.14 tahun 2001 pasal 117

Mengenai masalah ganti rugi²¹ seperti diamanatkan dalam ketentuan TRIPs pada artile 45 mengenai *damages* dalam undang-undang paten diatur pula bahwa Pemegang paten atau penerima lisensi berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga setempat terhadap siapapun dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan melanggar hak eksklusif pemegang paten. Dan gugatan ganti rugi hanya dapat diterima apabila produk atau proses tersebut menggunakan invensi yang telah diberi Paten.

Dalam Pemeriksaan gugatan terhadap paten proses, kewajiban pembuktian bahwa suatu produk tidak dihasilkan dengan menggunakan Paten-proses (Pasal 16 ayat 1 huruf b) dibebankan pada pihak tergugat apabila: (a) produk yang dihasilkan melalui paten proses tersebut merupakan produk baru (b) Produk tersebut diduga merupakan hasil dari paten proses dan sekalipun telah dilakukan upaya pembuktian yang cukup untuk itu pemegang paten tidak dapat menentukan proses apa yang digunakan untuk menghasilkan produk tersebut.

Untuk sengketa pada pengadilan Niaga di bidang Paten dan terhadap putusan Pengadilan niaga tersebut hanya dapat diajukan kasasi.

²¹ Lihat undang-undang No.14 Tahun 2001, Pasal 118

Persetujuan TRIPs yang diatur dalam article 45 mengatur mengenai ganti rugi Pejabat peradilan akan memiliki kewenangan untuk memerintahkan kepada pelanggar untuk membayar kepada pemegang hak yang menderita karena pelanggaran atas hak milik intelektualnya oleh seorang pelanggar yang mengetahui atau patut mempunyai alasan untuk mengetahui bahwa ia terlibat dalam kegiatan yang melanggar hukum.

Pejabat peradilan akan memiliki pula kewenangan memerintahkan kepada pelanggar untuk membayar kepada pemegang hak biaya-biaya, yang dapat meliputi biaya pengacara. Dalam kasus yang sesuai, anggota dapat memberi kewenangan kepada pejabat peradilan untuk memerintah pembayaran untuk memulihkan keuntungan dan/atau pembayaran atas kerugian yang telah terjadi sebelumnya, juga meskipun pelanggaran tidak mengetahui atau tidak sepatutnya mempunyai alasan untuk mengetahui bahwa ia terlibat dalam kegiatan yang melanggar hukum.

Dalam Undang-undang No.14 Tahun 2001 tentang Paten mengaturnya dalam Pasal 118 seperti telah dijelaskan dalam Hasil Penelitian.

8. Penetapan Sementara Pengadilan

Dalam ketentuan TRIPS article 50 Tindakan Sementara: dapat disampaikan bahwa:

1. Pejabat peradilan akan memiliki kewenangan untuk memerintahkan tindakan sementara yang segera dan efektif (a) untuk mencegah terjadinya pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual, dan pada khususnya untuk mencegah masuknya ke dalam jalur perdagangan di dalam yurisdiksinya barang, termasuk barang impor, segera sesudah barang itu mendapat izin keluar dari bea cukai (b) untuk menyimpan bukti yang relevan berkaitan dengan pelanggaran yang dipersangkakan Pejabat Peradilan akan memiliki kewenangan untuk mengambil tindakan sementara inaudita altera parte jika dianggap baik, khususnya dalam hal setiap kelambatan mungkin akan menimbulkan kerugian terhadap pemegang hak yang tidak dapat diperbaiki lagi atau jika terdapat risiko besar terjadinya penghilangan barang bukti.

2. Pejabat peradilan akan memiliki kewenangan untuk meminta kepada pemohon/penggugat untuk memberikan setiap bukti yang ada yang cukup untuk memberi keyakinan kepadanya bahwa permohonan/penggugat adalah pemegang hak dan bahwa haknya sedang dilanggar atau bahwa pelanggaran itu akan terjadi, serta kewenangan untuk memerintahkan kepada pemohon/penggugat untuk memberikan jaminan

kepastian yang cukup untuk melindungi tergugat dan untuk mencegah penyalahgunaan prosedur.

3. Dalam hal tindakan sementara telah dilakukan inaudita altera parte, para pihak yang terkena akan diberitahu mengenai hal itu segera setelah dilakukan tindakan yang terakhir. Peninjauan ulang, termasuk hak untuk didengar, akan dilakukan atas permintaan tergugat untuk mendapat keputusan, di dalam jangka waktu yang layak sesuai penyampaian pemberitahuan mengenai tindakan sementara itu akan diubah, dibatalkan atau dikuatkan.

4. Pemohon/penggugat dapat diminta oleh pejabat yang akan melaksanakan tindakan sementara itu untuk memberikan informasi lain yang perlu untuk mengidentifikasi barang yang bersangkutan.

Ketentuan article 50 TRIPS ini telah diakomodasi oleh Pasal 125 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, *Provisional Measures/ Penetapan Sementara* ini adalah sebuah putusan yang dimintakan sebelum suatu kasus diajukan ke Pengadilan. Dengan demikian putusan penetapan ini ada sebelum adanya perselisihan. Dalam Undang-undang Paten yang baru suatu penetapan sementara ini untuk menghindari kerugian yang besar.

Penetapan sementara merupakan pengaturan yang baru bagi Undang-undang paten di Indonesia dalam TRIPS dikenal dengan istilah *injunctiions* Pemerintah membuat pasal baru sesuai dengan ketentuan TRIPS dalam Undang-undang Paten yang penetapan Sementara Pengadilan²² bahwa pihak yang merasa dirugikan karena pelaksanaan Paten dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan Niaga untuk menerbitkan surat penetapan Sementara Pengadilan untuk mencegah berlanjutnya pelanggaran Paten dan hak yang berkaitan dengan Paten, khususnya mencegah masuknya barang yang diduga melanggar Paten dan hak yang berkaitan dengan Paten ke dalam jalur Perdagangan termasuk tindakan importasi.

Selanjutnya menyimpan bukti yang berkaitan dengan pelanggaran Paten dan hak yang berkaitan dengan paten guna menghindari terjadinya penghilangan barang bukti dan meminta kepada pihak yang merasa dirugikan agar memberikan bukti yang menyatakan bahwa pihak tersebut memang berhak atas Paten dan hak yang berkaitan dengan Paten, serta hak Pemohon tersebut memang sedang dilanggar.

Dalam ketentuan TRIPS article 50 Tindakan Sementara: dapat disampaikan bahwa:

²² Lihat Undang-undang Paten No.14 Tahun 2001, Pasal 125

1. Pejabat peradilan akan memiliki kewenangan untuk memerintahkan tindakan sementara yang segera dan efektif (a) untuk mencegah terjadinya pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual, dan pada khususnya untuk mencegah masuknya ke dalam jalur perdagangan di dalam yurisdiksinya barang, termasuk barang impor, segera sesudah barang itu mendapat ijin keluar dari bea cukai (b) untuk menyimpan bukti yang relevan berkaitan dengan pelanggaran yang dipersangkakan. Pejabat Peradilan akan memiliki kewenangan untuk mengambil tindakan sementara inaudita altera parte jika dianggap baik, khususnya dalam hal setiap kelambatan mungkin akan menimbulkan kerugian terhadap pemegang hak yang tidak dapat diperbaiki lagi atau jika terdapat risiko besar terjadinya penghilangan barang bukti.

2. Pejabat peradilan akan memiliki kewenangan untuk meminta kepada pemohon/penggugat untuk memberikan setiap bukti yang ada yang cukup untuk memberi keyakinan kepadanya bahwa permohonan/penggugat adalah pemegang hak dan bahwa haknya sedang dilanggar atau bahwa pelanggaran itu akan terjadi, serta kewenangan untuk memerintahkan kepada pemohon/penggugat untuk memberikan jaminan kepastian yang cukup untuk melindungi tergugat dan untuk mencegah penyalahgunaan prosedur.

3. Dalam hal tindakan sementara telah dilakukan *inaudita altera parte*, para pihak yang terkena akan diberitahu mengenai hal itu segera setelah dilakukan tindakan yang terakhir. Peninjauan ulang, termasuk hak untuk didengar, akan dilakukan atas permintaan tergugat untuk mendapat keputusan, di dalam jangka waktu yang layak sesuai penyampaian pemberitahuan mengenai tindakan sementara itu akan diubah, dibatalkan atau dikuatkan.

4. Pemohon/penggugat dapat diminta oleh pejabat yang akan melaksanakan tindakan sementara itu untuk memberikan informasi lain yang perlu untuk mengidentifikasi barang yang bersangkutan.

Ketentuan article 50 TRIPS ini telah diakomodasi oleh Pasal 125 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, *Provisional Measures/* Penetapan Sementara ini adalah sebuah putusan yang dimintakan sebelum suatu kasus diajukan ke Pengadilan. Dengan demikian putusan penetapan ini ada sebelum adanya perselisihan. Dalam Undang-undang Paten yang baru suatu penetapan sementara ini untuk menghindari kerugian yang besar.

9. Penyidikan

Penegakan hukum di bidang Hak Kekayaan Intelektual merupakan unsur yang sangat penting dalam pengelolaan

hak Kekayaan intelektual, hal ini dilakukan dengan melakukan koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait. Dalam bidang penegakan hukum ini Undang-undang Hak Kekayaan Intelektual mengatur Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang memiliki kewenangan melaksanakan penyelidikan, penyidikan serta pemberkasan atas kasus-kasus pidana di bidang hak kekayaan intelektual sampai saat ini Direktorat Jendral Hak kekayaan Intelektual memiliki PPNS sejumlah 151 orang.

Dalam hal terjadi suatu pelanggaran di bidang paten selain Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai negeri sipil pada Direktorat Jendral Hak kekayaan Intelektual diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana di atur dalam Undang-undang No.8 tahun 1981 tentang hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang paten.

Adapun tugas Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran aduan berkenaan dengan tindak pidana di bidang paten;
- b. Melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidang

Paten berdasarkan aduan sebagaimana dimaksud pada huruf a;

- c. Meminta keterangan dan barang bukti dari pihak yang terkait sehubungan dengan tindak pidana dibidang paten;
- d. Melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan dan dokumen lainnya yang berkenaan dengan tindak pidana dibidang paten;
- e. Melakukan pemeriksaan ditempat tertentu yang diduga terdapat barang bukti, pembukuan, catatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang dan bahan hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dibidang paten; dan
- f. Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang paten.

Berdasarkan Peraturan perundang-undangan di bidang Hak Kekayaan Intelektual yang telah ada bahwa ditegaskan pelanggaran di bidang paten dikategorikan sebagai tindak pidana kejahatan and diancam dengan hukuman penjara atau denda dan merupakan delik aduan, sebelumnya adalah delik biasa. Mengingat pelanggaran di bidang Hak Kekayaan Intelektual adalah tindak pidana kejahatan oleh itu

diatur tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil²³ yang dikenal dengan singkatan PPNS. PPNS tersebut dapat melakukan penanganan terhadap tindakan pidana di bidang Hak Kekayaan Intelektual karena Paten merupakan delik aduan dengan demikian PPNS melakukan tindakan penyidikan setelah menerima pengaduan dari pemilik Paten.

Pejabat PPNS Hak Kekayaan Intelektual yang telah mempunyai kualifikasi sebagai Penyidik melalui pendidikan-penyidikan, keberadaannya diperlukan untuk kepentingan penanggulangan tindakan pidana di bidang Hak Kekayaan Intelektual sesuai dengan lingkup kewenangannya. Pentingnya keberadaan PPNS ini juga didukung oleh adanya azas pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab yang didasarkan kemandirian, sehingga PPNS sebagai suatu aparat penegak hukum diberikan kewenangan tersendiri untuk melaksanakan penyidikan secara tuntas. Pada tahun 2003 merupakan tantangan bagi PPNS karena Hak Kekayaan Intelektual terus berkembang sejalan dengan perkembangan teknologi informasi yang semakin canggih.

10.Sanksi Pidana

Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar hak Pemegang paten dengan melakukan salah satu tindakan

²³ Lihat undang-undang Nomor 14 tentang Paten, pasal 129

sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Dan barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar hak pemegang Paten Sederhana dengan melakukan salah satu tindakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang paten dalam Pasal 130 telah mengatur tentang sanksi pidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), sedang dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 1997 pidana penjara 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) hal ini ada perbedaan mengingat pada dasarnya TRIPs mengatur bahwa Hak Kekayaan Intelektual adalah Hak prifat. Lebih mengutamakan sanksi hukum dalam bentuk denda daripada penjara.

C.Langkah-langkah Yuridis yang ditempuh Indonesia di

Bidang perlindungan Paten dalam rangka PMA.

Pemerintah Indonesia dalam mengatasi kesulitan modal , terutama devisa untuk pengadaan prasarana dan sarana

untuk menunjang pelaksanaan pembangunan yang segera harus diwujudkan yang meliputi segala bidang , dengan penuh penuh kehati-hatian /kewaspadaan telah mempersilahkan perusahaan asing atau kaum modal asing masuk untuk mengembangkan usaha-usahanya di Indonesia.

Penanaman modal asing ini hanya diwenangkan bagi mereka yang hanya berhasrat untuk melakukan usaha /menjalankan perusahaan , dengan demikian maka pemilik modal secara langsung menanggung resiko dari penanaman modalnya. Yang dimaksud dengan modal asing itu, selain alat pembayaran luar negri yang tidak merupakan kekayaan devisa Indonesia adalah juga alat-alat untuk perusahaan , termasuk penemuan-penemuan baru milik orang asing dan bahan-bahan yang dimasukan dari luar negri kedalam wilayah Indonesia ,selama alat-alat tersebut tidak dibiayai dari kekayaan devisa Indonesia.

Perusahaan Modal asing yang dapat didirikan itu harus merupakan satu kesatuan perusahaan tersendiri dan harus berbentuk badan hokum menurut hokum Indonesia, dan berkedudukan di Indonesia ,yang daerahnya usahanya ditetapkan oleh pemerintah ,demikian juga dengan tentang macam nya perusahaan ,besarnya penanaman modal dan keinginan pemikik modal agar tidak bertentangan dengan dengan rencana pembangunan ekonomi nasional dan ekonomi

daerah dapat tertunjang dengan adanya perusahaan asing tersebut.

Dengan demikian jelaslah bahwa kebijakan pemerintah dalam mengatur penanaman modal asing , sehingga penanaman modal asing tidak akan berarti pemasaran - pemasaran terhadap kekayaan alam Indonesia dan para tenaga bangsa Indonesia . Makna dari pasal 4 UU no. 1 tahun 1967 menyatakan bahwa syarat pertama yang harus dipenuhi oleh para penanam modal asing haruslah terlebih dahulu memiliki perijinan dari Pemerintah , yang berarti pula bahwa pemilik modal asing harus menyepakati segala ketentuan pemerintah Indonesia , mentaati kewajiban-kewajiban yang ditentukan pemerintah serta menjauhi larangan-larangan yang telah diharuskan .Karena dengan dikeluarkannya perijinan berarti telah terjadi kesepakatan antara pemerintah dengan pihak pemilik modal asing tersebut (vide pasal 1320 ,pasal 1313, dan pasal 1338 KUHPerdato.

Untuk maksud pengaturan penanaman modal asing ini pemerintah telah mengeluarkan selain UU PMA juga Keputusan Presidium Kabinet RI nomor 17/EK/I/1967 tentang pembentukan Badan Pertimbangan Penanaman modal asing , yang kemudian dicabut dan diubah dengan Keputusa

Presiden nomor 286 tahun 1968 tentang Pembentukan Panitia Teknis PMA.

Materi penting dalam Kepres tersebut yang berhubungan dengan dengan pengaturan PMA , yaitu ::

-pasal 1 Kepres 286 /1968 :

Tugas Panitia Teknis PMA (asing dan dalam negri),

1. Meneliti dan menilai apakah permintaan -permintaan penanaman modal (asing dan dalam negri) memenuhi syarat yang ditentukan oleh peraturan-peraturan yang berlaku:
2. Memberikan pertimbangan dan saran kepada pemerintah melalui Ketua dewan Stabilitas Ekonomi Nasional mengenai masalah penanaman modal khususnya.
3. Melakukan langkah-langkah teknis yang dianggap perlu untuk meningkatkan pelaksanaan penanaman modal asing sesuai dengan peraturan yang berlaku;
4. Bersama dengan departemen -departemen /Instansi-instansi yang bersangkutan mengikuti secara terus menerus pelaksanaan dari izin-izin penanaman modal yang telah di berikan Pemerintah.

Tentang hal diatas kalau kita meninjau Keputusan Presidium Kabinet nomor 17/EK/KEP/I.1967 terutama pasal 4 , tugas Tean Teknis PMA ,yaitu :

- a. Membantu mempersiapkan saran-saran kepada Badan Pertimbangan PMA.
- b. Menampung dan mengadministratifkan penawaran-penawaran PMA;
- c. Mengadakan hubungan dan koordinasi serta pengawasan administrasi kepada Departemen-departemen yang bersangkutan mengenai pelaksanaan PMA.

Dengan demikian maka jelas bahwa penanaman modal asing walau sangat kita butuhkan , tidaklah Pemerintah gegabah dalam pemberian izin-izinnya, melainkan harus melalui pertimbangan yang cermat dan dalam pelaksanaannya akan diawasi secara seksama agar jangan sampai merugikan perekonomian nasional /daerah dan kehidupan masyarakat yang ada disekitar perusahaan dengan PMA tersebut . Hal diatas ternyata dimaklumi oleh pihak para PMA , bahwa cara yang ditempuh Pemerintah bukan berate mempersulit masuknya modal asing ke Indonesia.tetapi merupakan kebijaksanaan yang wajar mengingat pengalaman-pengalaman dimasa lampau tentang tindak-tanduk pengusaha asing yang terlalu mengutamakan kepentingan nya, tidak memberikan kesempatan untuk alih tehnologi dengan tetap mempertahankan kedudukan-kedudukan penting dalam perusahaannya untuk ditempati oleh tenaga-tenaga ahli

mereka ,menjadikan tenaga-tenaga Indonesia sebagai buruh dengan upah rendah ,bahkan sempat pula merugikan /mengganggu ketertban,keamanan masyarakat.

Kebijaksanaan Pemerintah dalam pelaksanaan PMA ,yang melalui pertimbangan-pertimbangan yang matang dan mantap ini, ternyata telah berhasil menggugah kesadaran para pemilik modal asing bahwa izin yang diberikan kepada mereka untuk melakukan usaha-usahanya di Indonesia mengandung amanat untuk berpartisipasi menunjang pembangunan di Indonesia , sebagai rasa kemanusiaan untuk turut serta dalam mengembangkan dan meningkatkan kesejahteraan hidup bangsa Indonesia .

Hal ini terbukti dengan adanya :

G. kesediaan mereka untuk melakukan alih tehnologi;

H. penyediaan fasilitas-fasilitas pendidikan kejuruan baik yang diadakan dilingkungan perusahaan maupun di luar negri.

I. Pemberian kesempatan kepada tenaga-tenaga tekhnisi Indonesia untuk mendu duki jabatan-jabatan penting dalam perusahaannya;

J. Turut serta membantu kehidupan masyarakat disekitar perusahaannya dari berbagai kesulitan/musibah yang menimpinya.

Prioritas yang diberikan bagi para pemilik modal asing untuk mengembangkan usaha-usahanya di Indonesia, berdasarkan ketentuan pasal 1 Instruksi PRESKAB nomor 06/EK/IN/I/67, yaitu :

- a. Apabila perusahaan asing itu (*direct investment* , *joint venture*, *joint enterprice*) dapat menambah penerimaan devisa bagi Negara (bidang *tourisme*, industri *prosessing* untuk ekspor dan yang sejenis dengan itu).
- b. Apabila perusahaan seperti diatas dapat membantu mengurangi import sesuatu barang ,bahan dan jasa.
- c. Apabila perusahaan seperti diatas itu berdaya guna untuk :
 1. dapat memberikan hasil yang cepat (*quick yielding*) kurang dari 2 tahun.
 2. dapat menambah kesempatan kerja yang berarti.
 3. dapat mengintroduksir teknologi atau cara-cara kerja yang baru yang dapat menaikkan produktivitas dalam sector produksi itu :
 4. dapat membawakan alat-alat perlengkapan mutahir yang dapat memperbesar efektivitas kerja dan atau menurunkan biaya produksi...

Tentang prioritas itu dalam UU no 1 tahun 1967 pasal 5 ayat (1) dan (2) secara jelas dan tegas telah dinyatakan pula sebagai berikut :

Bahwa pemerintah pada tiap kali menyusun Rencana-rencana Pembangunan memperhatikan perkembangan teknologi dan ekonomi akan menetapkan perincian bidang-bidang usaha yang terbuka bagi modal asing menurut prioritas yang urutan dan syarat-syaratnya telah ditentukan ,sehingga penerimaan atau pelaksanaan penanaman modal asing tersebut selalu seirama dengan pelaksanaan pembangunan di Indonesia.

Dengan demikian maka jelaslh bahwa rencana dan pelaksanaan PMA selalu dilakukan dengan hati-hati ,diatur sedemikian rupa sehingga pada akhirnya setelah Kita menguasai teknologi -teknologi yang mutakhir serta permodalan yang cukup.

Tentang produksi selanjutnya bagi produk-produk yang dilindungi UU Paten ,tidaklah menjadi masalah karena selain dapat diusahakan dengan cara lisensi ,terdapat pula ketentuan bahwa penemuan-penemuan yang mengenai kepentingan umum pemberian lisensi adalah merupakan suatu kewajiban yang dapat dipaksakan oleh Dewan Paten ,dan tehniisi bangsa kitapun dengan sendirinya mampu pula menciptakan

1. PENGGUNAAN HAK PATEN ASING BERDASARKAN LISENSI

Dalam penanaman modal secara *Joint venture* (kerja sama antar pemilik modal asing dengan pemilik modal nasional) atau yang lebih disukai yaitu *Joint Enterprise* (kerja sama antar perusahaan nasional dengan perusahaan asing), kita mengenal suatu persetujuan (*agreement*) yang bernama "*Franchise And Brand Use Agreement*". Persetujuan itu digunakan apabila suatu perusahaan nasional (dalam negara) berhasrat memproduksi suatu barang yang telah mempunyai merk, telah terkenal, dan dilindungi oleh Undang-Undang Paten, seperti halnya Coca Cola, Honda, Toyota, Bata, rokok 555 dan lain sebagainya, dalam persetujuan itu ditentukan hal-hal yang wajib ditaati, ketentuan bagi keuntungan, cara-cara kerja dan lain sebagainya. Ketentuan tentang Produk, menyangkut tentang mutu, bentuk, ukuran, berat dan rasa yang harus sama dengan produk-produk aslinya yang telah dilindungi hukum paten.

Dengan adanya kerja sama antara perusahaan asing dengan perusahaan nasional, dengan dasar *Franchise And Brand Use Agreement*", Indonesia tidak perlu lagi mengimpor produk-produk yang penting bagi peningkatan kesejahteraan rakyat. Bahkan, karena produk-produk yang

dihasilkan kerja sama perusahaan tersebut melebihi kepentingan/kebutuhan dalam negara, Indonesia dapat pula mengekspornya.

Tentang kerja sama modal asing dan modal nasional tersebut diwenangkan berdasarkan ketentuan Pasal 23 Bab IX Undang-Undang Nomor 1 tahun 1967, yang dalam hal ini tentang bidang-bidang usaha, bentuk-bentuk dan cara-cara kerja sama, pemanfaatan modal dan keahlian tenaga asing, produk barang-barang dan jasa serta bidang ekspornya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Pemerintah Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1967. Dengan demikian, kerja sama usaha ini dapat diarahkan pada produksi barang-barang yang belum bisa ditangani sendiri oleh tenaga-tenaga ahli Indonesia sebelum terjadinya kerja sama ini tidak berani untuk melanggar hak paten tersebut walaupun kemampuan untuk memproduksi telah ada.

Jika dikaitkan dengan kerja sama antar perusahaan asing dengan perusahaan nasional dalam batas ketentuan pemberian lisensi yang hanya berlaku untuk tiga (3) tahun, kerja sama antar perusahaan ini jelas lebih menguntungkan dunia usaha bangsa Indonesia, daripada membiarkan perusahaan nasional mengusahakan sendiri lisensi tersebut.

Joint enter prise dengan Industri kendaraan Jepang (misalnya Toyota) untuk perakitan (*assembling*) kendaraan-kendaraan tersebut di Indonesia lebih banyak menguntungkan bila dibandingkan dengan perusahaan nasional Indonesia meminta lisensi dari pemegang patennya. Keuntungan-keuntungan tersebut antara lain:

- a. batas kerja sama itu dapat berlangsung sampai 30 tahun (sesuai dengan pasal 18 bab VII Undang-undang Nomor 1 tahun 1967);
- b. kendaraan-kendaraan Toyota yang dirakit dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan keadaan di negara Indonesia, misalnya Toyota Kijang, Toyota Mini Bus dan lain-lain;
- c. alih teknologi dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, sehingga pada waktu perjanjian kerja sama ini berakhir, para tenaga Indonesia dapat sepenuhnya melaksanakan pembuatan kendaraan-kendaraan tersebut baik atas dasar lisensi untuk meneruskan produksi Toyota Kijang dan lain-lain, maupun atas dasar dimilikinya Paten Bergantung (*Afhankelijk Oktroei*) kepada paten pokoknya;
- d. perusahaan yang terbentuk atas dasar kerja sama ini merupakan kesatuan perusahaan tersendiri yang berbentuk badan hukum Indonesia yang berlaku di

negara Indonesia atau jelasnya tidak akan merugikan kepentingan negara (Pasal 28 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1967).

Kalau perusahaan nasional bekerja sendiri untuk memproduksi produk-produk atas dasar lisensi, selain memberikan keuntungan demikian saja kepada pemegang hak patennya, juga perpanjangan waktu penggunaan lisensi harus diulangi secara terus menerus (ingat batas waktu pemberian lisensi), tanpa mengingat apakah perusahaan nasional itu berhasil atau tidak dalam mengembangkan/memproduksi penemuan yang telah dilindungi hak paten tersebut.

Uraian di atas menyangkut penjelasan yang telah dikemukakan di dalamnya, bahwa setiap pemilik paten dapat menarik keuntungan dari patennya dengan cara pemberian lisensi kepada pihak lain atas dasar persetujuan/perjanjian dan pihak lain itu diharuskan memberi imbalan yang berupa sejumlah uang pengganti yang dapat dibayar secara sekaligus atau secara periodik, sedangkan batas waktu pemberian lisensi kepada pihak lain tersebut adalah 3 tiga tahun, yang dapat diperpanjang dengan mengadakan perjanjian-perjanjian perpanjangan. Setiap kali perjanjian perpanjangan penggunaan lisensi perusahaan nasional yang bersangkutan

wajib membayar uang pengganti atas pemakaian lisensinya, tanpa mengingat berhasil atau tidaknya atau berkembang dan mundurnya usaha produksinya.

Dengan demikian, jelas bahwa kerja sama antara perusahaan nasional dengan perusahaan asing yang menanamkan modalnya di Negara Indonesia, yang memproduksi barang-barang yang dilindungi paten, sangat menguntungkan perusahaan nasional, lebih-lebih kalau dikaitkan dengan pembangunan sarana fisik, alih teknologi dan kemungkinan-kemungkinan dimiliki saham-sahamnya oleh para pengusaha nasional.

2. PROSES ALIH TEKNOLOGI DALAM BENTUK PERJANJIAN LISENSI

Di dalam sub-bab ini, 2 (dua) pokok yang akan diulas yaitu mengenal : perjanjian lisensi dan proses alih teknologi. Khusus mengenai perjanjian lisensi, akan dibicarakan tentang subjek dan objek yang berkaitan dalam perjanjian tersebut. Sedangkan mengenai alih teknologi yang berkaitan dengan paten, memang sulit untuk menempatkan bentuk lisensi yang membedakan antara perjanjian atau kontrak. Hal senada seperti yang dinyatakan oleh Fisseha-Tsion Menghistu dalam disertasinya, yaitu :

"Although licensing is an ambiguous term, it is defined

roughly as an agreement or a contract by which the licensor or a proprietor of the technology or intellectual property extends to the licensee a limited right to make use of, among other things, a patent, know-how, trade mark and other items as may be agreed between the licensor and the licensee".

Selanjutnya dikatakan olehnya,

"Thus, strictly speaking licensing of technology and sale of technology are not one and the same. A sale implies the transfer of ownership rights from the seller to the buyer".

Bila hal tersebut dikatkan dengan keadaan di Indonesia yang ketentuan-ketentuan mengenai perjanjiannya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Barat, Buku III khususnya Pasal 1320 sampai dengan Pasal 1864, Hukum perjanjian dalam BW mengikuti apa yang disebut dengan "Sistem terbuka" (open system). Dengan sistem terbuka ini dimaksudkan bahwa setiap orang bebas untuk membuat segala jenis kontrak, sedangkan kontrak-kontrak khusus yang secara eksplisit diatur dalam BW berupa kontrak jual beli, barter/pertukaran, jaminan, pinjam meminjam dan lain sebagainya.

Selain itu, sistem terbuka BW bisa juga diartikan bahwa melalui sistem ini memang membuka pintu lebar-lebar untuk berbagai inovasi dan penerimaan melalui praktik hukum. Atas dasar kebebasan berkontrak bisa terjadi beragam masalah kontrak timbul di dalam praktik hukum, sehingga inovasi bisa terjadi di dalam praktik hukum, khususnya dalam mengatasi masalah kontrak. Pengalihan teknologi bisa terjadi melalui masuknya modal asing, bisa juga tidak selalu demikian. Pemodal Asing Jepang tidak pernah mau mengalihkan teknologi. Sehubungan dengan ketentuan Undang-undang di Indonesia dengan adanya ketentuan keharusan dalam penanaman modal asing agar pihak asing sebagai penanam modal asing dalam hal ia menjalankan usahanya dengan cara patungan dengan pengusaha nasional Indonesia, kedua-duanya masing-masing mempunyai keuntungan dan membawa hasil yang memuaskan. Sebagai contoh misalnya:

- "pengusaha asing memang mempunyai keunggulan di bidang operasional, teknologi dan pengalaman.
- Tetapi di pihak pengusaha lokal mempunyai pengetahuan pangsa pasar setempat, lebih lincah dalam mengurus perizinan dan lebih mampu dalam menghadapi buruh".

Walaupun pernyataan tersebut tidak menjamin adanya proses alih teknologi, perjanjian/kontrak lisensi merupakan salah satu cara yang digunakan dalam proses alih teknologi.

Insan Budi Maulana menyatakan bahwa perjanjian pemberian lisensi paten merupakan salah satu jenis lisensi industrial yang umumnya diatur dalam Hukum Perdata. Selanjutnya dikatakannya bahwa perjanjian lisensi paten tidak berbeda dengan perjanjian perorangan lainnya.

Hak-hak untuk menikmati dan menegakkan ketentuan-ketentuan lisensi bergantung kepada sifat kontraktual lisensi itu, daripada kenyataan terlibatnya hak-hak paten. Berbeda dengan pendapat tersebut di atas ialah yang dikemukakan oleh Sumantoro, yaitu bahwa perjanjian lisensi adalah kontrak pemberian teknologi untuk menggunakan hak proses dengan imbalan. Perjanjian lisensi paten berbeda dengan perjanjian umum lainnya, karena pemilik paten atau pemegang paten hanya memberikan lisensi kepada penerima lisensi, sedangkan hak patennya masih tetap menjadi milik pemilik paten tersebut dan bukan menjadi milik penerima lisensi. Sebagai aturan umum, lisensi paten bersifat personal dan tidak adapat dialihkan, kecuali jika syarat-syarat yang

terdapat dalam perjanjian tersebut menunjukkan adanya maksud untuk mengizinkan pengalihan.

Dalam hal perjanjian lisensi paten, ketentuan dasar pemberian lisensi diatur dalam Undang-undang tentang Paten (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989), khususnya dalam pasal 76-80. Namun, rincian ketentuan mengenai lisensi dalam wujud pelaksanaannya sampai kini belum ditetapkan. Ini berarti bahwa perjanjian alih teknologi diatur berdasarkan KUH Perdata, sedangkan pemberian lisensi paten berdasarkan ketentuan Undang-Undang Paten (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989).

Oleh karena itu, dasar hukum untuk mengatur perjanjian lisensi paten akan tetap menggunakan ketentuan-ketentuan umum dalam KUH Perdata, terutama ketentuan-ketentuan perjanjiannya, walaupun "kebebasan dalam membuat perjanjian" akan dibatasi oleh ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata dan Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten. Melalui perjanjian lisensi ini pemberi teknologi memberikan hak kepada penerima teknologi untuk suatu jangka tertentu dan dengan syarat-syarat dan kondisi-kondisi yang disetujui bersama, memanfaatkan dan menggunakan teknologi dari pemberi teknologi untuk tujuan tertentu.

Kebebasan untuk mengadakan perjanjian dalam bentuk dan macam apapun didasarkan pada Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menyebutkan bahwa "Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya". Pasal ini merupakan dasar hukum dari asas Kebebasan Berkontrak.

Seperti telah disebutkan terdahulu, memang belum ada suatu peraturan perundang-undangan yang secara jelas dan tegas mengatur tentang perjanjian lisensi. Namun secara tak langsung terdapat beberapa ketentuan yang ada kaitannya dengan masalah perjanjian proses alih teknologi, yaitu diantaranya dapat bersumber pada :

1. Pasal 1338 ayat(1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan: "Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya".Ketentuan Pasal inilah yang merupakan dasar hukum dari asas Kebebasan Berkontrak. Dasar hukum ini kalau dikaitkan dengan

Undang-Undang Paten dapat ditelusuri melalui penerapan asas Lex Speciali Derogat Lex Generali. Maksudnya ialah Lex Speciali adalah Undang-undang Paten sedangkan Lex Generali adalah Undang-Undang Perjanjian Lisensi.

2. Undang-undang tentang Penanaman Modal asing Nomor 1 tahun 1967, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 tahun 1970, Secara khusus, Pasal 12 dari Undang-Undang ini menyatakan : " perusahaan-perusahaan modal asing berkewajiban menyelenggarakan dan atau menyediakan fasilitas-fasilitas latihan dan pendidikan di dalam dan atau di luar Negara secara teratur dan terarah bagi warga negara Indonesia dengan tujuan agar berangsur-angsur tenaga-tenaga warga negara asing dapat digantikan oleh tenaga-tenaga warga negara Indonesia".

3. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1984 tentang Perindustrian. (Lembaran negara Nomor 22 tahun 1984, Tambahan Lembaran negara Nomor 3274.)

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. (Lembar Negara Nomor 50 tahun 1983, Tambahan Lembar negara Nomor 3263).

Dari keempat (4) sumber hukum tersebut fokus tesis pada (perjanjian) lisensi. Dalam kaitannya dengan lisensi (license) Hak Milik Intelektual (Intellectual Property Right). Termasuk di dalamnya mengenai jangka waktu dan royaltinya. Di samping itu, juga mengenai bantuan teknologi, bahan baku, bahan pembantu, mesin-mesin, dan peralatan serta mekanisme pengelolaan (manajemen), serta pendidikan dan

pelatihan tenaga kerja lokal (Indonesia), sehingga dapat dihitung beban pembiayaan yang harus digunakan bila menggunakan tenaga asing.

Perlu diketengahkan disini, mengenai apa yang dimaksud dengan objek lisensi. Ada 2 (dua) segi yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama: pada saat perjanjian teknologi dibuat, para pihak tentunya sudah mengetahui tentang teknologi jenis mana yang akan menjadi objek perjanjian yaitu yang merupakan teknologi dasar (hasil teknologi). Teknologi dasar ini merupakan jenis teknologi yang akan dialihkan oleh pemberi teknologi kepada penerima teknologi. Dalam proses selanjutnya teknologi dasar ini akan mengalami perubahan, penyempurnaan ataupun modifikasi, yang dalam kaitannya dengan ("proses alih teknologi") disebut dengan "improvement" dan "development". Inilah yang kemudian disebut dengan teknologi yang dihasilkan ("advance technology"). Dari segi objek perjanjian lisensi dapat dibedakan antara "basic technology" dan "advance technology".

Sedangkan dari segi lainnya, objek perjanjian lisensi adalah apa yang termasuk dalam hak milik intelektual ("intellectual property Right") serta hak-hak lain yang berkaitan dengan masalah teknologi.

Berdasarkan wujudnya, Indonesia mengenal 3 (tiga) macam hak milik intelaktual, yaitu: hak cipta, hak paten dan hak merek. Argentina mengenal 5 (lima) macam hak milik intelektual yaitu trade mark, trade name, patens, industrial design and modal, dan copy right.

Pendapat yang sama juga dinyatakan oleh Ehrbar mengenai lisensi dan transfer of technology yang mengutip dari The Nasional Institute of Industrial Property (INPI) yang memberikan 5 (lima) katagori dalam pengklasifikasian "lisensing the transfer of technology", yaitu:

1. Licensing of trade mark;
2. Licensing of patens;
3. Industrial-technology agreements (related to the production of consumption goods);
4. Technical industrial-cooperation agreements (related to capital goods); and
5. Specialized technical-service agreement (planning, implementation, installation, inspection, and operasional support such as specialized eingeineering services).

Dalam kaitannya dengan apa yang telah diuraikan tersebut memang tidak dapat disangkal bahwa teknologi mempunyai peranan yang sangat penting.

Karena itu, perlu mendapat perlindungan hukum bagi penemunya/penciptanya. Disamping itu, juga perlu legalisasi dalam bentuk campur tangan negara-dalam hal ini pemerintah-dalam proses pengalihannya. Untuk dapat mendorong kegiatan ke arah penemuan baru, sudah jelas betapa pentingnya sistem perlindungan hukum atas penemuan/ penciptaan tersebut dengan cara memberikan hak paten. Dalam Bab Menimbang (konsiderans) dari Undang-undang tentang paten 1989 Nomor 6 menyatakan bahwa sub c: "bahwa dengan memperhatikan peranan teknologi dalam peningkatan dan pengembangan industri, diperlukan upaya untuk mewujudkan iklim yang lebih baik lagi kegiatan penemuan teknologi dan perangkat memberikan perlindungan hukum terhadap hasil tersebut".

Hak paten menurut Undang-undang tersebut dirumuskan sebagai suatu "hak khusus" yang diberikan oleh pemerintah kepada pihak penemu/pencipta. Juga dimungkinkan hak tersebut diberikan kepada pihak lain yang memperoleh hak dari si penemu. Hak yang dimaksud merupakan hak untuk melaksanakan sendiri hasil penemuan tersebut atau memberikan persetujuan kepada orang lain untuk melaksanakan selama waktu tertentu.

Konstruksi hubungan hukum antara penemu/pencipta dengan penerima teknologi tersebut semula berawal dari hubungan perjanjian (perjanjian lisensi). Namun, dalam perkembangannya hubungan tersebut yang semula berdasarkan pada hukum perjanjian melalui tahapan-tahapan proses, mengalami perkembangan dalam mengupayakan untuk menjadi peraturan. Dalam rangka memberi kejelasan tentang bentuknya, konsepsi hukum yang dirujuk dalam tulisan ini adalah pemikiran Anthony Allot yang membedakan hukum dalam 3 (tiga) bentuk, yakni:

1. "Law", yang dimaksud adalah yang berupa asas-asas huku;
2. "Law", yang dimaksud disini adalah hukum yang berupa aturan-aturan hukum;
3. "Law", yang dimaksud disini adalah putusan peradilan.

Dalam kaitannya dengan perjanjian lisensi mengenai proses alih teknologi adalah konsep hukum yang pertama, sedangkan Undang-undang tentang Patennya dalah konsep hukum yang kedua. Dengan demikian, perjanjian tersebut adalah merupakan Hukum In Konkreto yang merupakan asas-asas hukum, sedangkan Undang-Undang Paten dan Merek

merupakan Hukum In Abstrakto dalam bentuk peraturan perundang-undangan.

Lisensi merupakan suatu masalah tersendiri yang menarik perhatian sebagai permasalahan yang baru dalam Undang-undang Paten. Ini membuka kemungkinan untuk memberikan lisensi hak Paten kepada pihak lain. Sedangkan Undang-undang tentang merek tidak membuka kemungkinan untuk melakukan pendaftaran lisensi mengenai hak atas merek yang dalam praktik memang dikenal.

Merek-merek dagang terkenal dari perusahaan luar negara digunakan secara sah berdasarkan licence agreement yang dibuat antara pemilik luar negara dan perusahaan-perusahaan lokal di Indonesia. Si penerima lisensi dengan jelas mencantumkan bahwa produk mereka adalah hasil produksi yang dipasarkan "Under licence" atau "Under The Authority of" si pemilik merk tersebut. Namun, tidak ada kemungkinan mendaftarkan perjanjian lisensi ini di Kantor Direktorat Hak Cipta dan Paten Departemen kehakiman.

Sistem perjanjian lisensi ini tumbuh dan berkembang dalam praktik sesuai dengan perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Sesuai dengan sistem terbuka perjanjian lisensi tidak dilarang. Karena itu, diperbolehkan adanya perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh para pihak

meskipun tidak diatur dalam KUH Perdata. Dengan demikian, dalam praktik hukum tumbuh berbagai bentuk perjanjian yang tidak diatur di dalam KUH Perdata dan yang berkembang dengan baik seperti misalnya tentang : beli sewa, "leasing" dan perjanjian "trust". Demikian pula halnya dengan perjanjian lisensi mengenai merk, tetapi perjanjian lisensi tidak dapat didaftarkan dalam daftar merek dari Direktorat Paten dan Hak Cipta.

A. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Lisensi

Pada hakekatnya antara hak dan kewajiban terdapat hubungan yang sangat erat, yang satu mencerminkan adanya yang lain. Dan satu pihak merupakan suatu kekuasaan yang bisa diterapkan, sedangkan di lain pihak hak merupakan tuntutan untuk melaksanakan kewajibannya.

Suatu kepentingan merupakan sasaran dari hak, bukan hanya karena ia dilindungi oleh hukum, tetapi juga karena ada perlakuan terhadap dirinya. Hak ternyata tidak hanya mengandung unsur perlindungan dan kepentingan melainkan juga kehendak.

Ciri-ciri melekat pada hak menurut hukum adalah sebagai berikut :

1. Hak dilekatkan pada seseorang yang disebut sebagai pemilik atau subjek dari hak tersebut. Ia juga disebut

sebagai orang yang memiliki titel atas barang yang menjadi sasaran dari hak.

2. Hak tertuju kepada orang lain, yaitu yang menjadi pemegang kewajiban. Antara hak dan kewajiban terdapat hubungan korelatif.

3. Hak yang ada pada seseorang mewajibkan kepada pihak lain untuk melakukan (*Commission*) atau tidak melakukan (*omission*) dan yang disebut sebagai isi dari hak.

4. *Commission* atau *omission* menyangkut sesuatu yang dapat disebut sebagai objek dari hak.

5. Setiap hak menurut hukum mempunyai titel, yaitu suatu peristiwa tertentu yang menjadi alasan melekatnya hak tersebut pada pemilikinya.

Suatu hak mencerminkan dasar dari berbagai kekuasaan, kekebalan, kewajiban, serta tanggung jawab yang menjadi bagian dari hak tersebut. Ini merupakan salah satu segi yang membedakan hak dari kewajiban. Seperti yang dijabarkan oleh Richard Brandt sebagai berikut:

"Sebuah manifesto tentang gerakan perempuan barang kali mendaftar segala kewajiban laki-laki, korporasi, atau pemerintah terhadap perempuan. Namun, daftar serupa itu akan kekurangan fokus. Bagaimanapun, ada target di sini bahwa perempuan memiliki peluang yang

sama untuk mendapatkan kehidupan yang baik. Itulah segala sesuatu yang hendak dituju oleh kewajiban-kewajiban ini: perempuan hendak memiliki kehidupan yang sama-sama layak. Pada saat membicarakan hak atas peluang yang sama itu, barulah kita dapat memuaskan perhatian pada manfaat yang dituju".

Hak dapat ditemukan di berbagai sistem normatif, seperti moralitas, aturan organisasi, serta sistem hukum lokal, negara nasional, dan internasional. Hak biasanya diklasifikasikan menurut jenis sistem normatif dalam mana hak itu berakar.

Selanjutnya, James Nickel menyatakan :

"Suatu hak dalam hukum positif ("*Positive Legal Right*") merupakan sesuatu yang diakui dan ditetapkan di dalam system hukum suatu (kelompok) masyarakat tertentu. Ini dapat menyangkut suatu norma yang konstitusional, tetapi pengakuan semacam ini menjadikan hak tersebut menjadi tidak lebih dari sekadar merupakan suatu hak nominal atau hak di atas kertas".

Ada pendapat yang berbeda, yaitu dalam arti bahwa hak itu melekat pada pemiliknya kalau dikaitkan dengan hak-hak ekonomi. Selanjutnya, James W. Nickel juga menyatakan bahwa :

"Hak-hak ekonomi menentukan siapa yang memiliki kekuasaan, keleluasaan untuk menggunakan, menjual, atau memberi berbagai barang, dan karenanya memungkinkan tindakan-tindakan yang pokok bagi aktivitas ekonomi". Mengenai hak kepemilikan ini sama dengan apa yang dinyatakan oleh Hobbes, yaitu : "bahwa sistem pemilikan yang ditegakkan oleh hukum, yang mencakup perlindungan dari pencurian dan metode-metode untuk menangani klaim-klaim yang bersaing terhadap barang-barang diperlukan untuk memungkinkan produktivitas yang dibutuhkan peradaban".

Dengan demikian, sistem pemilikan yang operatif memiliki signifikansi yang sangat besar, karena untuk menciptakannya dan mempertahankannya diperlukan adanya aksi kolektif berikut hak-hak yang menyangkut usaha untuk membeli dan menjual. Kontrak tidak hanya berfungsi mendistribusikan kekuasaan dan keuntungan, melainkan juga menata sistem ekonomi dengan jalan/cara menentukan pihak-pihak yang memiliki kewenangan dan keleluasaan untuk menjual atau memberikan berbagai jenis barang.

Penggunaan sistem kepemilikan semacam ini tidaklah terlalu kontroversial, karena sebagian besar ketaksepakatan lahir/timbul ketika/pada saat orang mempertimbangkan apakah ketimpangan yang seringkali

terjadi yang menyangkut harta benda itu dapat diterima secara moral dan apakah pemilikan sarana produksi harus bersifat individual atau kolektif. Pada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948 mencanangkan hak milik secara umum dan disebutkannya bahwa setiap orang mempunyai hak untuk membuka kata memiliki kekayaan baik secara pribadi maupun bersama-sama dengan orang lain dan melarang perampasan hak milik secara sewenang-wenang.

Dari pernyataan-pernyataan tersebut tidak terdapat gambaran yang jelas mengenai perbedaan antara hak milik pribadi dan hak milik produksi. Dalam konvensi Eropa perjanjian internasional tidak memuat klausula yang melegitimasi hak milik pribadi, tetapi dalam kedua perjanjian tersebut terdapat klausula-klausula yang identik, yaitu yang melindungi hak milik nasional. Seperti yang terdapat dalam Pasal 1, bagian 2 (yang memuat ayat-ayat tentang penentuan nasib sendiri) masing-masing perjanjian/pernyataan tersebut menyebutkan sebagai berikut: "Semua orang boleh, demi tujuan-tujuan mereka sendiri, secara bebas mengelola kekayaan dan sumber alam mereka tanpa mengurangi kewajiban-kewajiban yang timbul dari kerja sama ekonomi internasional, yang didasari prinsip keuntungan bersama, dan hukum internasional. Sama sekali tidak diperbolehkan merampas

sarana penghidupan seseorang". Hak merupakan norma yang kompleks dan berprioritas dengan identifikasi pemilik, penanggung jawab, kondisi kepemilikan, ruang lingkup. Disebabkan oleh ciri wajibnya, hak merupakan hal yang dapat dituntut atau diklaim oleh pemilik-pemiliknyanya dan juga oleh pihak-pihak lain. Hak yang ditetapkan secara tetap akan mampu memberikan pedoman yang tepat bagi perilaku manusia. Kapasitas ini membuatnya bermanfaat dalam segi hukum dan tepat untuk penegakan hukum.

Konsep hak merupakan konsep yang sering digunakan orang dan mungkin juga dianggap sebagai satu-satunya yang ada. Konsep ini terutama menekankan kepada pengertian hak yang berpasangan dengan Kewajiban. Jadi, hubungan antara hak dan kewajiban merupakan hubungan yang resiprokal.

Dalam kaitannya dengan hak dan kewajiban ini segi yang terpenting yang perlu diperhatikan dalam kontrak lisensi ialah adanya hubungan secara timbal balik antara hak dan kewajiban tersebut. Hak pemberi lisensi akan merupakan kewajiban bagi penerima lisensi. Demikian juga sebaliknya, apa yang menjadi kewajiban bagi pemberi lisensi akan merupakan hak bagi penerima lisensi. Dalam pembahasan ini akan memfokuskan pada kewajiban dari masing-masing pemberi dan penerima lisensi dan juga hak-

haknya. Banyak hak dan kewajiban pemberi dan penerima lisensi yang timbul dari perjanjian yang mereka buat sesuai dengan asas kebebasan berkontrak. Namun, ada beberapa hak dan kewajiban yang karena sifatnya, dianggap akan selalu ada dalam perjanjian lisensi, walaupun ada kemungkinan pengaturan yang jelas untuk beberapa hal dan penerima lisensi dijabarkan lebih rinci, mencakup :

Kewajiban Pemberi Lisensi :

1) Kewajiban untuk mengusahakan dan menjamin hak-hak yang dilisensikan dapat digunakan oleh penerima lisensi. Pemberi lisensi harus menjamin bahwa hak-hak yang dilisensikan itu akan dapat digunakan oleh penerima lisensi.

2) Kewajiban menjaga hak-hak yang dilisensikan itu dalam

keadaan baik. Pemberi lisensi di bidang know-how misalnya, berkewajiban untuk menjaga agar know-how yang dilisensikan adalah akurat dan terjaga kerahasiannya.

3) Jaminan ("warranty")

Dalam beberapa perjanjian lisensi, pemberi lisensi biasanya akan mencantumkan "No Warranty Clause". Dengan dicantulkannya klausula ini pemberi lisensi

tidak memberikan jaminan apapun kepada penerima lisensi, kecuali mengenai hal-hal yang dengan jelas dan eksplisit disebutkan dalam perjanjian lisensi yang biasanya mencakup:

(a) Bahwa pemberi lisensi berhak memberikan lisensi;

(b) Bahwa informasi yang diberikan itu memenuhi standat yang umum digunakan untuk bidang tersebut.

Kewajiban Penerima Lisensi meliputi :

1) Kewajiban membayar Royalti.

Membayar royalti merupakan kewajiban utama dari penerima lisensi. Yang sering dipermasalahkan adalah berupa besar dan bagaimana cara pembayaran royalti harus dilakukan.

Permasalahan lainnya yang masih ada kaitanya dengan royalti ialah :

(a) Mulai kapan royalti harus dibayarkan;

(b) Apakah pembayaran royalti tadi bebas dari pembayaran pajak;

(c) Apakah atas keterlambatan pembayaran royalti akan dikenakan bunga atau sanksi.

2) Kewajiban lain.

Penerima lisensi pada dasarnya dibebani dengan kewajiban untuk menggunakan hak-hak yang diperolehnya dari perjanjian lisensi. Namun, kewajiban tersebut tidak diwajibkan kepada penerima lisensi dalam beberapa hal seperti misalnya :

(a) Apabila penerima lisensi setuju membayar suatu jumlah minimal royalti tertentu tanpa melihat apakah akan menggunakan haknya atau tidak.

(b) Dalam hal "*non exclusive licence agreement*".

2) Penerima lisensi juga berkewajiban untuk :

(a) Tidak melakukan sanggahan atas keabsahan hak yang dilisensikan;

(b) Kewajiban untuk tidak melakukan kompetisi;

(c) Kewajiban menjaga kerahasiaan;

(d) Kewajiban menjaga kualitas dari produk;

(e) Kewajiban untuk memenuhi dan mematuhi persyaratan-persyaratan serta peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sehubungan dengan hak dan kewajiban antara penerima dan pemberi lisensi tersebut bila dikaitkan dengan syarat sahnya perjanjian (pasal 1320 KUH Perdata) termasuk dalam lingkup pengertian subjek hukum. Hal tersebut karena menyangkut para pihak yang terlibat dalam perjanjian. Dengan adanya subjek hukum, harus ada objek

yang diperjanjikan. Yang dimaksud dengan objek yang diperjanjikan oleh masing-masing pihak adalah "teknologi dan atau "alih teknologinya" yang berupa paten dan merek.

Untuk mengajukan permintaan paten ketentuan Pasal 30 Undang-undang 6 Tahun 1989 tentang Paten menentukan bahwa:

- (1) Permintaan paten diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kantor Paten.
- (2) Surat permintaan paten harus memuat:
 - a. tanggal, bulan dan tahun permintaan;
 - b. alamat lengkap dan jelas orang yang mengajukan permintaan termaksud haruf a;
 - c. nama lengkap dan kewarganegaraan tertentu;
 - d. dalam hal permintaan diajukan orang lain selaku kuasa dilengkapi pula dengan nama lengkap dan alamat lengkap kuasa yang bersangkutan;
 - e. surat kuasa khusus, dalam hal permintaan diajukan oleh kuasa;
 - f. permintaan untuk diberi paten;
 - g. judul penemuan;
 - h. klaim yang terkandung dalam penemuan;

- i. deskripsi tertulis tentang penemuan, yang secara lengkap memuat keterangan tentang cara pelaksanaan penemuan;
- j. gambar yang disebut deskripsi yang diperlukan untuk memperjelas;
- k. abstraksi mengenai penemuan.

Ketentuan Pasal 30 Undang-undang tentang Paten tersebut sebenarnya mengandung prinsip bahwa peminta paten wajib mengungkapkan penemuannya. Ayat (1) Pasal tersebut yang secara tegas menentukan bahwa permintaan paten harus ditulis dalam bahasa Indonesia, bermaksud agar penemuan yang diungkapkan itu dapat dipahami oleh masyarakat Indonesia. Meskipun dengan pengungkapan tersebut setiap orang dapat mengetahui penemuan tersebut. Namun, tidak setiap orang mendapat izin dari pemegang paten boleh melaksanakan paten tersebut di Indonesia. Setidaknya dengan pengungkapan dalam bahasa Indonesia membuka kesempatan bagi orang Indonesia untuk melakukan modifikasi terhadap penemuan tersebut.

Apabila pemegang paten suatu perusahaan transnasional yang berkebangsaan Indonesia, atau mungkin perusahaan atau orang asing yang meminta paten di Indonesia, dengan mengungkapkan penemuannya memungkinkan bangsa Indonesia akan mendapat inspirasi dari penemuan tersebut.

Sedangkan mengenai lisensi untuk paten dapat secara bebas kemungkinan untuk diberikan lisensi hak paten kepada pihak lain yang diatur dalam undang-undang tentang paten.

Pemegang hak paten berhak memberikan lisensi berdasarkan suatu surat perjanjian lisensi. Hak-hak yang diperoleh/didapat berdasarkan lisensi ini dapat diberikan kepada setiap orang, dan orang inilah yang dapat melaksanakan segala perbuatan hukum yang oleh undang-undang tentang hendak diberikan kepada pemegang hak patennya. Yaitu agar dapat memperoleh suatu hak khusus untuk mengeksploitasikan penemuan/ciptaan tersebut ialah agar dengan perusahaan membuat, menjual, menyewakan, memakai dan menyediakan untuk dijual, disewakan, diserahkan, atau dipakai sebagai suatu hasil produksi yang telah diberikan hak paten itu.

Dengan demikian, termasuk dalam hak milik intelektual di antaranya adalah hak-hak atas teknologi yang dilindungi dengan sistem paten "utility model", "design", "know-how", "trade mark" dan "trade name" serta "hak cipta". Dalam kenyataan, walaupun dikenal dan dibedakan mengenai adanya beberapa sistem perlindungan menurut hukum kepada hak milik intelektual, tetapi tidak dapat dipungkiri, bahwa atas suatu hak milik intelektual

dapat tercakup lebih dari sistem perlindungan menurut hukum. Misalnya gabungan antara "trade mark" dan "design", antara "copy right" dan "design" dan antara "copy right" dan "trade mark".

B. Hak dan Kewajiban dalam Perjanjian Paten

Kewajiban penerima lisensi bergantung kepada perjanjian yang telah disepakati, tetapi ada beberapa macam kewajiban yang biasanya ada dalam perjanjian, yaitu:

Pertama: Kewajiban yang biasanya diatur dalam undang-undang;

Kedua: Kewajiban yang diatur dalam kesepakatan para pihak;

Ketiga: Kewajiban yang disetujui berdasarkan kepercayaan;

Pertama, kewajiban yang diatur dalam undang-undang, misalnya penerima lisensi harus membayar lisensi. Atau, penerima lisensi tidak dapat mengadakan perjanjian sub-lisensi dengan pihak ketiga tanpa izin dari pemberi lisensi.

Kedua dan ketiga, berkaitan dengan beberapa jumlah royalti yang harus dibayar yang biasanya tidak diatur dalam undang-undang, Karena klausula ini penerima lisensi berkewajiban untuk memenuhi perjanjian tersebut.

Penerima lisensi berkewajiban untuk mendaftarkan perjanjian lisensi di Kantor Paten jika pemberti lisensi adalah orang asing, dan dalam hal perjanjian lisensi tersebut merupakan perjanjian lisensi internasional. Cara ini lebih mudah bagi penerima lisensi karena faktor efisiensi dan waktu. Alasan lainnya ialah karena lisensi tersebut akan dimanfaatkan di negara penerima lisensi dan biasanya pemerintah negara penerima lisensi mempunyai kebijaksanaan sendiri dalam hal melindungi penerima lisensi.

Kewajiban lain bagi penerima lisensi ialah untuk menjaga kendali mutu atas barang-barang yang diproduksi atau dalam menggunakan proses yang dipatenkan. Kendali mutu dapat dilakukan oleh pemberi lisensi jika bantuan teknik juga dapat dilakukan oleh pemberi lisensi. Hal tersebut disebabkan karena, kadang-kadang, meskipun penerima lisensi membuat perjanjian lisensi dan penerima lisensi menerima sejumlah keterangan, dan pelatihan mengenai bagaimana caranya memanfaatkan paten yang dilisensikan tersebut, tetapi pemberi lisensi tidak memberikan tata cara dan pengetahuan teknikal (know-how) untuk menjaga kendali mutu dari barang-barang yang menggunakan hasil produksi Atau proses yang dipatenkan.

Dengan demikian, penerima lisensi harus berhati-hati mengenai klausula ini.

Dalam hal perjanjian lisensi paten yang dikaitkan dengan perjanjian lisensi pengetahuan teknikal ("know-how license agreement"), biasanya pemberi lisensi akan mewajibkan kepada penerima lisensi untuk tidak mengungkapkan kepada pihak ketiga atau pihak-pihak tertentu mengenai apa yang ditentukan oleh pemberi lisensi. Dalam hal paten tersebut telah berakhir dan menjadi milik umum ("public domain"), penerima lisensi masih mempunyai kewajiban untuk tidak mengungkapkan keterampilan atau pengetahuan teknikal ("know-how") dari barang yang menggunakan hasil produksi atau proses yang dipatenkan tersebut kecuali jika ditentukan lain. Pemberi lisensi kadang-kadang mewajibkan kepada penerima lisensi agar penerima lisensi tidak bersaing atau tidak melakukan intervensi di pasar yang dikuasai oleh pemberi lisensi.

Adapun mengenai hak dan kewajiban pemilik paten di antaranya ialah:

1. Mempunyai hak atas temuannya dan berkewajiban untuk mendaftarkan dalam Daftar Umum Paten;

2. Berkewajiban menjaga kerahasiaan penemuannya dalam tempo 12 (dua belas) bulan sebelum permintaan paten diajukan;
3. Berhak atas paten dalam jangka waktu selama 20 (dua puluh) tahun sejak tanggal penerima permintaan paten. Untuk paten sederhana 10 (sepuluh) tahun;
4. Pemegang paten berkewajiban untuk melaksanakan patennya di wilayah negara Indonesia;
5. Pemegang paten untuk proses yang bersangkutan berhak atas ketentuan Pasal 17 ayat (2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1997 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 6 Tahun^o 1989 tentang Paten, melakukan upaya hukum terhadap produk yang diimpor tersebut jika produk telah dibuat di Indonesia dengan menggunakan proses yang dilindungi paten;
6. Berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan penemuan yang dimintakan paten. Berkewajiban mencatatkan di kantor Paten dan dimuat dalam Daftar Umum Paten dengan membayar biaya yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Menteri. Di samping itu hak dan kewajiban pemegang paten meliputi:
 1. Pemegang paten berhak untuk saling memberikan lisensi dalam menggunakan paten pihak lainnya berdasarkan persyaratan yang wajar;

2. Pemegang lisensi yang patennya dibatalkan tidak berkewajiban untuk meneruskan pembayaran royalti yang seharusnya masih wajib dibayar, tetapi wajib membayar royalti untuk sisa jangka waktu lisensi yang dimilikinya kepada pemegang paten yang berhak;

3. Berkewajiban untuk membayar biaya tahunan untuk tahun kedelapan belas dan berikutnya, paten dianggap berakhir pada akhir batas waktu kewajiban pembayaran biaya tahunan untuk tahun yang kedelapan belas tersebut.

Atas dasar hal tersebut sudah cukup jelas hak dan kewajiban antara pemegang paten dengan pemilik paten berdasarkan ketentuan-ketentuan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten.

C. Sistem Pendaftaran

Pasal 79, Undang-undang Nomor 13 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten menyatakan:

(1) Perjanjian lisensi wajib dicatatkan di Kantor Paten dan dimuat dalam Daftar Umum Paten dengan membayar biaya yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Dalam hal perjanjian lisensi tidak dicatatan di Kantor Paten sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), perjanjian

lisensi tersebut tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga.

(2) Syarat dan tata cara pencatatan perjanjian lisensi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan atas penjelasan Pasal tersebut juga menyatakan sudah jelas bahwa Perubahan ayat (1) dan ayat (2) dimaksudkan untuk memperjelas ketentuan dalam kaitannya dengan perjanjian lisensi. Perjanjian serupa pada dasarnya wajib dicatatkan di Kantor Paten dan bukan didaftarkan. Hal ini dari segi administrasi, keputusan mengenai dapat atau tidaknya perjanjian lisensi tersebut didaftar hanya dapat dilakukan atas dasar mekanisme pendaftaran yang mengatur persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi. Sedangkan kewajiban yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah mencatatkan perjanjian lisensi tersebut di Kantor Paten. Dengan tercatatnya perjanjian lisensi di Kantor Paten, kantor Paten dapat melakukan penilaian apakah perjanjian lisensi tersebut memuat hal-hak yang dapat merugikan kepentingan ekonomi nasional sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 78. Khusus mengenai penambahan ketentuan yang dijadikan ayat (1a) tersebut dimaksudkan untuk memberi penegasan mengenai akibat hukum terhadap pihak ketiga apabila perjanjian lisensi tidak dicatatkan di Kantor Paten.

Dalam kaitannya dengan permasalahan mengenai "Bagaimana caranya agar dalam perjanjian lisensi dapat menjamin dipenuhinya persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang tentang Paten?"

Mengenai hal ini ternyata ada ketidakjelasan pada pasal tersebut, yaitu terutama yang berkaitan dengan aturan mengenai pendaftaran tersebut masih sah bagi pihak ketiga.

Dalam kenyataannya, praktik sistem pendaftaran tersebut tidak pernah dihiraukan, bahkan sering kali pihak lisensor tidak mau mendaftarkan di Kantor Paten, walaupun sudah jelas maksud dari sistem pendaftaran tersebut adalah untuk memberikan penegasan mengenai akibat hukum terhadap pihak ketiga jika suatu perjanjian lisensi tidak dicatikan di Kantor Paten. Bahkan, terhadap hal tidak dilakukannya pendaftaran ini ada anggapan kalau didaftarkan di kantor Paten dirasakan tidak efisien.

Dalam perjanjian tidak ada satu pasalpun ketentuan yang menunjuk pada ketentuan peraturan, agar perjanjian tersebut harus didaftarkan di Kantor Paten. Yang ada hanya asas Kebebasan Berkontrak. Oleh karena itu, campur tangan pemerintah dalam bentuk sistem pendaftaran ini dihindari.

Perbandingan lain, misalnya Undang-undang tentang Paten Jepang menyatakan bahwa perjanjian lisensi tidak akan berpengaruh terhadap pihak ketiga kecuali jika perjanjian itu telah didaftarkan, tetapi tidak ada kewajiban mendaftarkan untuk perjanjian lisensi non-eksklusif.

Jadi, sistem registrasi yang tercantum dalam Undang-undang tentang Paten Indonesia dalam hal adanya pengaruh dan akibat terhadap pihak ketiga masih menjadi pernyataan yang penting. Hal tersebut disebabkan karena kekurangan atas penjelasan pasal tersebut, sehingga akan mempengaruhi efektif atau tidaknya pengawasan pelaksanaan Pasal 78. Jika pelaksanaan Pasal 78 dapat dilakukan secara efektif, salah satu masalah yang merupakan penghambat dalam perjanjian lisensi dapat diatasi.

Dengan demikian, bagaimana Pemerintah akan menyelesaikan permasalahan tersebut? Ketentuan Pasal 79 ayat (2) menyatakan bahwa: "persyaratan dan tata cara pencatatan perjanjian lisensi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah". Dalam rangka ini, penelitian yang telah dilakukan agar pembentukan Peraturan Pemerintah tersebut dapat segera direalisasikan. Setidak-tidaknya buku ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah untuk

merealisir Peraturan Pemerintah sebagai tindak lanjut dari Undang-undang Nomor 13 Tahun 1997 tentang Paten tersebut.

FUNGSI PENDAFTARAN PERJANJIAN LISENSI :

Sebagaimana telah dikemukakan pada Bab sebelumnya Undang-undang Paten Indonesia berlaku bagi paten yang dimintakan di Indonesia. Akan tetapi, di dalam kenyataanya yang minta untuk patennya didaftarkan di Indonesia sebagian besar adalah perusahaan asing, baik yang memiliki maupun yang tidak memiliki anak perusahaan di Indonesia. Sedangkan paten yang diminta oleh perusahaan maupun orang Indonesia pada umumnya adalah paten sederhana. Lagi pula dengan keikutsertaan Indonesia di dalam Patent Cooperation Treaty (PCT) berdasarkan Keppres Nomor 16 tahun 1997, perusahaan asing dapat mengajukan permintaan paten secara internasional. Article 3 dari PCT menyebutkan bahwa applications for the protection of inventions is in any of the Contracting States may be filed as international applications under this treaty (garis bawah oleh penulis). Hal ini berarti perusahaan asing, melalui permintaan paten internasional dapat mengajukan perlindungan penemuannya untuk diberi paten oleh Pemerintah Indonesia. Apabila terdapat kekurangan di

dalam persyaratan menurut Hukum Indonesia, berdasarkan article 26 PCT, kekurangan persyaratan itu harus diberitahukan kepada pemohon dan bukan serta merta ditolak. Ketentuan-ketentuan itu akan memudahkan perusahaan-perusahaan asing yang tidak mempunyai anak perusahaan di Indonesia. Dengan keikutsertaan Indonesia di dalam PCT tersebut, Pasal 78 Undang-undang Paten Indonesia semakin relevan.

Lagi pula di dalam article 27 (8) PCT ditegaskan"

Nothing in this Treaty and the regulations is intended to be contrued as limiting the freedom of any Contracting State to apply measures deemed necessary for the preservation of its national security or to lomit, for the protection of the economic Interest or nationals to file international applications.

Berdasarkan article itu ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Paten Indonesia dapat dikatakan tidak bertentangan dengan PTC.

Pasal 78 ayat (1) undang-undang paten Indonesia melarang Perjanjian lisensi yang memuat ketentuan baik langsung maupun tak langsung dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia, atau memuat pembatasan yang menghambat kemampuan bangsa Indonesia

dalam menguasai dan mengembangkan teknologi. Selanjtnya, ayat (2)-nya menegaskan bahwa pendaftaran dan permintaan pencatatan perjanjian lisensi yang dilarang oleh ayat (1) harus ditolak oleh Kantor Paten. Mengenai kewajiban pendaftaran lisensi disebutkan secara tegas pada Pasal 79 undang-Undang Paten Indonesia. Di dalam penjelasan Pasal 79 ayat (1) dinyatakan bahwa "seperti halnya pengalihan pemilik, perjanjian lisensi juga wajib didaftarkan dan dicatat". Atas dasar hal tersebut di atas jika dikaitkan dengan penjelasan Pasal 78 yang isinya sebagai berikut:

Ayat (1): paten merupakan salah satu sumber Informasi teknologi yang sangat penting.

Perlisensian yang berlangsung dengan syarat yang kurang atau sama sekali menutup, jalan ke arah penguasaan teknologi dalam paten, hanya akan menghambat pengembangan kemampuan bangsa Indonesia dalam mengetahui dan menguasai teknologi yang bersangkutan. Dalam kerangka pikir bahwa teknologi sangat penting dan besar artinya terhadap kehidupan dan kemajuan indistri, maka adanya ketentuan serupa itu praktis tidak akan bermanfaat bagi perekonomian nasional.

Ayat (2) : Penolakan permintaan paten dan

pencatatan tersebut, dengan memperhatikan penjelasan ayat (1).

Memang sudah seharusnya ditolak oleh Kantor Paten. Dengan demikian, istilah pendaftaran kalau dikaitkan dengan perjanjian lisensi ada dua (2) aspek yang perlu dicermati, yaitu: pendaftaran itu sendiri sebagai predikat (kata kerja) dan perjanjian lisensi sebagai objek dari predikat tersebut. Dalam hal pendaftaran berarti ada yang didaftarkan, apa yang didaftarkan adalah perjanjian lisensi.

Di dalam setiap perjanjian lisensi paten harus didaftarkan atau dicatatkan pada Kantor Paten. Apabila pendaftaran tersebut tidak ditolak oleh Kantor yang bersangkutan (Kantor Paten), selanjutnya akan dicatat dalam daftar Umum Paten, dan diumumkan dalam Berita Resmi Paten.

Tampaknya pendaftaran perjanjian lisensi ini akan menjadi syarat sahnya kontrak tersebut. Itu berarti bahwa Kantor Paten yang dibebani tugas pendaftaran ini perlu dikondisikan untuk bekerja secara cepat dan cermat agar birokrasi pada kantor tersebut tidak menghambat kegiatan usaha berdasarkan perjanjian lisensi itu. Untuk mengatasi hal ini bisa dirujuk "Peraturan Tahun 1985: *Regulations on Controlling Technology Import Contracts*

yang dikeluarkan oleh 'state Council' RRC pada tanggal 24 Mei 1985", yang menjelaskan tentang pemberian batas waktu 60 hari kepada "examination and approval organ" untuk memberikan keputusannya (menyetujui atau tidak). Seandainya organ tersebut tidak berhasil memberikan suatu keputusan dalam batas waktu tersebut, perjanjian lisensi yang didaftarkan itu dianggap telah disetujui dan secara otomatis akan berlaku.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas dan mengenai perlunya pendaftaran ini, perlu dicermati "normative act No.15" yang berlaku di Brazil yang menentukan bahwa pendaftaran suatu perjanjian alih teknologi (termasuk lisensi paten dan lisensi merek) merupakan syarat (condition) untuk:

- a. Pengesahan pembayaran yang timbul dari lisensi, baik di dalam negara maupun di luar negara;
- b. Memperoleh pengurangan pajak;
- c. Membuktikan pemakaian paten atau merek oleh licensee.

Atas dasar laporan suatu kasus yang diputuskan di Sao Paulo pada bulan Desember Tahun 1975 menunjukkan bahwa tanpa pendaftaran semacam itu suatu perjanjian alih teknologi tidak dapat dilaksanakan di Brazil untuk maksud apapun.

Adapun yang dimaksud dengan "pendaftaran" seperti yang tercantum dalam pasal 78 Undang-undang Paten Indonesia alasannya "pendaftaran" tersebut digunakan dengan maksud agar pemilik paten sebagai pemberi lisensi melalui perjanjian lisensi tidak menyalahgunakan kedudukannya yang lebih kuat yang dapat berakibat menghambat perkembangan perekonomian Indonesia dan kemampuan bangsa Indonesia dalam menguasai dan mengembangkan teknologi. Tidak dapat disangkal bahwa penemuan memang bernilai ekonomis. Dilihat dari segi itu, tampaknya paten merupakan suatu manifestasi dari pandangan individualisme. Hal itu memang merupakan realita, tetapi tidak dapat dihindari bahwa adanya paten memungkinkan terjadinya perkembangan ekonomi dan teknologi. Dengan diberikannya paten kepada penemuan, diharapkan perusahaan tidak segan-segan untuk mendayagunakan penemuannya. Pendayagunaan penemuan itu mungkin saja akan menimbulkan inovasi atau menimbulkan terjadinya penemuan baru, sehingga terjadi proses yang bersifat suksesif.

Di sisi lain fungsi dari perlindungan paten itu diharapkan dapat mendorong pengungkapan teknologi yang selanjutnya akan memacu alih teknologi, karena

sebagaimana dikatakan paten diberikan oleh negara sebagai imbalan atas pengungkapan teknologi. Apabila semua kegiatan itu terlaksana, hal itu akan meningkatkan kesejahteraan orang banyak itulah yang sebenarnya dijadikan filosofis diberikannya paten. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa apabila pada kenyataannya paten hanya memberikan keuntungan kepada pemegang paten semata-mata, pemberian paten tersebut tidak sesuai dengan landasan filosofis diberikannya paten.

Selain itu, perlindungan penemuan melalui paten adalah pengungkapan penemuan itu melalui spesifikasi yang disertakan di dalam permohonan pendaftaran paten. Setelah paten diberikan kepada pemohon, pengetahuan yang disebutkan dalam spesifikasi menjadi diketahui oleh umum. Akan tetapi, penemuan itu tidak boleh ditiru sebab dengan adanya pemberian paten berarti penemuan itu telah dilindungi secara hukum. Namun, tidak dapat disangkal bahwa adanya perlindungan paten sedikit banyak telah menghilangkan faktor penghambat perkembangan teknologi adalah Faktor utama penghambat perkembangan teknologi adalah kerahasiaan penemuan itu dapat terungkap, bukannya tidak mungkin bisa terjadi perkembangan teknologi.

Dalam hukum privat pendaftaran merupakan pengaturan tentang burgerlijk stand umum. Dewasa ini *burgerlijk stand* merupakan lembaga yang diadakan oleh penguasa, yang maksudnya adalah memberikan kepastian sebesar-besarnya tentang semua peristiwa yang penting-penting bagi status keperdataan seseorang: kelahiran, pengakuan, perkawinan, perceraian dan kematian. Atas dasar hal tersebut di atas, fungsi pendaftaran di sini adalah sebagai bukti pada peristiwa-peristiwa yang dicatat untuk kepentingan dirinya sendiri atau pihak ketiga. Sehubungan dengan itu, burgerlijk stand ini sifatnya terbuka artinya dapat dilihat oleh siapapun juga.

Akan tetapi, pencatatan di sini mempunyai makna yang lain dari *Burgelijk Stand*. Pencatatan atau pendaftaran perjanjian lisensi di sini merupakan peranan aktif pemerintah dalam kerangka meningkatkan kesejahteraan bangsa Indonesia secara keseluruhan. Dengan adanya ketentuan mengenai pendaftaran perjanjian lisensi dapat dikatakan bahwa suatu paten sebagai konstruksi hukum yang timbul dari pandangan individualisme dapat diterima di dalam Hukum Indonesia, tetapi harus ditundukkan ke dalam cita hukum bangsa Indonesia yang ditujukan untuk kesejahteraan orang per orang. Apabila hal ini dikaitkan dengan hukum perjanjian

pada umumnya dapat dikatakan bahwa pendaftaran perjanjian lisensi seperti yang disyaratkan oleh Pasal 79 Undang-undang Paten bukan merupakan syarat untuk sahnya suatu perjanjian lisensi seperti yang disyaratkan oleh Pasal 79 undang-undang Paten bukan merupakan syarat untuk sahnya perjanjian lisensi. Berdasarkan pemikiran itu dapat dikatakan bahwa perjanjian lisensi sebagaimana perjanjian-perjanjian lainnya selama syarat-syarat sahnya perjanjian seperti yang tertuang di dalam pasal 1320 BW terpenuhi, perjanjian itu sah. Akan tetapi, perlu diingat bahwa ketentuan perjanjian menurut pasal 1339 BW bukan hanya mengikat mengenai apa yang diperjanjikan, melainkan juga tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang, kesusilaan dan kepentingan umum. Apabila ketentuan ini dikaitkan dengan Pasal 78 Undang-Undang Paten, dapat dikatakan bahwa perjanjian lisensi yang memuat klausula-klausula yang dilarang oleh Pasal 78 tidak mempunyai kekuatan mengikat.

Selanjutnya apabila Pasal 1338 ditafsirkan secara *a contrario*, perjanjian yang tidak menurut/sesuai dengan undang-undang tidak berlaku sebagai undang-undang bagi para pembuatnya. Dengan demikian, apabila penafsiran itu dikaitkan dengan Pasal 78 Undang-undang Paten, dapat dikatakan bahwa perjanjian lisensi yang mengandung

klausula yang dilarang oleh Pasal 78 Undang-undang Paten tidak berlaku, sebagai undang-undang bagi para pembuatnya, atau tidak mempunyai kekuatan hukum.

Berdasarkan pemikiran ini dapat dipahami kalau ketentuan Pasal 78 ayat (2) memerintahkan Kantor Paten untuk menolak pendaftaran perjanjian yang dilarang oleh ayat (1) nya. Apabila pendaftaran itu tidak ditolak, dapat dikatakan bahwa Kantor Paten dalam hal ini Pemerintah Republik Indonesia mendaftarkan perjanjian yang berdasarkan hukum perjanjian yang berlaku di Indonesia tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mengikat. Ini merupakan penegasan dari ketentuan pasal 78 ayat (2).

Sebagaimana telah dikemukakan ketentuan Pasal 78 jo 79 undang-undang paten memberikan dasar hukum bagi peran aktif pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, meskipun era welfare state telah berlalu dan secara berangsur-angsur peran pemerintah dalam kegiatan ekonomi banyak dikurangi, untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa secara keseluruhan masih diperlukan adanya campur tangan dalam bentuk pengaturan oleh pemerintah agar tidak menghambat kegiatan ekonomi.

Menurut pendapat penulis, pasal 78 jo 79 undang-undang Paten bukan merupakan hambatan untuk mengadakan transaksi bisnis, khususnya dalam hal ini perjanjian lisensi.

Untuk mewujudkan tujuan yang ingin dicapai melalui kebijaksanaan sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 79 tersebut, pemerintah telah melakukan tindakan yang mendorong agar ditingkatkannya upaya penertiban dalam pencatatan perjanjian lisensi yang akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah, tetapi hingga sekarang belum terwujud.

Mengingat akan pentingnya perjanjian lisensi dalam rangka pengalihan dan pengembangan teknologi yang sangat diperlukan dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi nasional, pemerintah hendaknya segera menerbitkan berbagai Peraturan Pemerintah seperti diamanatkan oleh Undang-undang tersebut.

Ke tidak mampuan atau ke tidak berdayaan hukum dalam menjalankan tugas dan fungsinya disebabkan oleh kurang disadarinya bahwa untuk setiap peraturan yang telah dibuat mengandung arti membuat rencana yang berupa tindakan untuk selanjutnya yang telah disiapkan pula. Kultur hukum menjembatani sistem hukum dengan tingkah laku/perilaku masyarakat. Ide-ide, baik sikap maupun

pandangan yang merupakam kultur hukum yang melatar belakangi dilahirkannya suatu peraturan oleh pembuat peraturan berbeda dengan kultur hukum sebagai suatu nilai sosial yang melatar belakangi kekuatan sosial suatu masyarakat. Tanpa adanya dukungan dari objek kebijaksanaan pemerintah yang merupakan hal untuk mewujudkan tujuan yang ingin dicapai oleh kebijaksanaan tersebut.

Hal ini terlepas dari adanya pengaruh baik sosial, budaya. Politik maupun ekonomi yang ,latar belakangi baik terhadap pembuat peraturan, pelaksana, maupun mereka yang menjadi objek kebijaksanaan.

Sebagaimana dimaklumi, sejalan dengan perkembangan negara-negara modern pada umumnya, negara Republik Indonesia juga menyadari bahwa undang-undang sebaiknya menentukan dan menetapkan ptinsip-prinsip dalam garis-garis Besar saja (*Principle Foundamenthale*), dan menyerahkan rincian dan pengaturannya lebih lanjut kepada peratusran yang lebih rendah. Penciptaan bentuk peraturan negara yang disebut Peraturan Pemerintah, sebagaimana ditentukan oleh pasal 5 ayat (2) Undang-undang dasar 1945 adalah tepat sekali. Jenis peraturan ini khusus untuk melaksanakan undang-undang, untuk membuat agar undang-

undang dapat berjalan, dapat beroperasi sebagaimana mestinya, mengingat undang-undang hanya mengatur Garis-garis Besarnya.

Sebagaimana disebut dalam pasal 5 ayat (2) UUD 1956, jenis peraturan yang dibentuk berdasarkan "Pouvoir reglementair" Presiden tersebut ialah Peraturan Pemerintah. Tentu saja sebagai suatu peraturan yang dibentuk dalam rangka kekuasaan reglementaire, peraturan pemerintah tidak dapat melampaui kekuatan Undang-undang yang dilaksanakan olehnya. Sebagai suatu kekuasaan yang di negara Republik Indonesia bersifat khusus ini, kekuasaan reglementaire tidak dapat dilaksanakan apabila kekuasaan legislatif belum melaksanakan fungsinya. Dengan perkataan lain, kekuasaan membentuk Peraturan Pemerintah tidak dapat berfungsi sebelum berfungsinya kekuasaan pembentukan Undang-undang yang bersangkuat.

Bedasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa pemerintah perlu membuat Peraturan Pemerintah sebagai tindak lanjut dari undang-undang Paten, yang salah satu pasalnya menyebutkan bahwa perjanjian lisensi akan diatur oleh Peraturan Pemerintah. Sebab kalau tidak segera dibuat Peraturan Pemerintah, kebiasaan yang berlaku dalam praktik akan tetap berlangsung

seperti yang diamati sekarang ini. Dengan kata lain untuk menengarai perbedaan kepentingan dibuatnya perjanjian lisensi yang di satu pihak lisensor mempunyai tujuan *profit-oriented* sedangkan di pihak lain lisensi bertujuan agar dapat dinikmati dan menggunakan teknologi yang masih baru tersebut. Memang saat ini Indonesia masih belum memiliki Undang-undang yang mengatur secara khusus mengenai lisensi, tetapi melalui penelusuran lebih lanjut perjanjian lisensi perlu diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah. Hal ini sedah diawali secara sumir dalam Undang-undang Paten. Melalui Undang-undang Patenlah bisa terjadi proses alih teknologi.

Menurut ajaran hukum konvensional dari Terheide yang penting adalah pertanyaan bagaimana dalam situasi tertentu dapat ditemukan pemecahannya yang paling baik yang sesuai dengan kebutuhan yang hidup dalam suatu kehidupan bersama.

Dengan demikian, fungsi hukum merupakan kajian penting dalam pembahasan mengenai pembangunan ekonomi di Indonesia, tampak dari apa yang dikatakan Peter Mahmud Marzuki dengan mensitir Lawrence M. Friedman tentang hukum sebagai sistem pembagian keseimbangan seperti sebagai berikut:

The function of law is to produce outputs what society needs. At the most general level, the outputs would be social order and justice it is the primary function of law to create social order. The function corresponds to the fundamental striving of human being. Whenever people create social organisation, they try to avoid chaos. Law is utilised as an integrative mechanism in that it protects individual and group interests proportionally. What is proportional is a matter of justice.

The concept of justice is a subject of a wide philosophical literature. For the purpose of this writing justice refers to expectations and assessments. In terms of law, justice will be judged as how law treats people and how it distributes its benefits and costs (Friedman, 1975:20). Friedman correctly states the ever function of law, general or specific, is allocative.

Fungsi sistem hukum adalah menjaga atau mengusahakan agar keseimbangan tatanan dalam masyarakat (*restitutio in integrum*). Setiap sistem termasuk sistem hukum mengenai pembagian di dalamnya. Setiap bagian atau unsur mempunyai hubungan antara satu sama lain dengan seluruhnya. Masing-masing bagian tidak boleh bertentangan satu sama lain.

Telah dikemukakan di muka bahwa arti pentingnya suatu bagian atau unsur adalah justru fungsinya di dalam sistem itu. Di luar sistem atau kesatuan, bagian atau unsur tidak mempunyai arti sama sekali.

Pembagian hukum atau klasifikasi hukum merupakan ciri sistem hukum. Untuk dapat mengadakan pembagian atau klasifikasi harus ada kriterium atau tolak ukurnya. Karena itu, kriterium merupakan prinsip sebagai dasar pembagian. Klasifikasi hukum menjadi hukum materiil (substantif) dan hukum formil (ajektif) menggunakan "fungsi hukum" sebagai kriterium. Hukum materiil adalah hukum yang mengatur substansi atau isi materi hubungan antara orang perorangan, hukum yang mengatur hak dan kewajiban. Hukum formil mengatur cara melaksanakan atau menegakkan hukum materiil. Berdasarkan kriterium waktu berlakunya, hukum terdiri dari ius constituendum, yaitu hukum yang dicita-citakan (masa mendatang). Menurut kriterium daya kerjanya hukum terdiri dari hukum yang bersifat memaksa (emeratif) dan yang bersifat melengkapi (fakultatif).

Perkembangan dan perubahan yang sangat besar sebagai akibat dari peranan teknologi dan industrialisasi telah mengakibatkan dampak dari peranan tersebut menghendaki agar hukum melakukan adaptasi

terhadap keadaan tersebut. Akibatnya, hampir dalam semua aspek kehidupan diatur oleh hukum.

Dalam era pembangunan saat ini kemampuan hukum untuk mewujudkan tujuan diadakannya hukum semakin penting, karena pembangunan menghasilkan bermacam-macam tujuan yang ingin dicapai dalam waktu yang bersamaan, sehingga hukum saat ini banyak digunakan untuk mewujudkan pembangunan sebagai tujuan politik negara.

Mengingat hukum bertujuan untuk melindungi kepentingan manusia, dalam menemukan hukum juga harus disimak perkembangan kekuatan hukum masyarakat dalam kaitannya dengan perkembangan teknologi. Sehubungan dengan hal itu, penulis sependapat dengan pernyataan Sudikno Mertokusumo yang menyatakan bahwa:

"hukum tidak hanya berwujud norma atau kaidah, tetapi dapat juga berwujud dalam bentuk perilaku. Dari perilaku manusia lahir hukum"

Dikatakan Pula:

"perilaku termasuk sumber hukum, yang wujudnya berupa perilaku baik yang bersifat aktif yang berupa perbuatan konkret maupun yang bersifat pasif yang berupa sikap atau itikad".

Karena itu, melalui penormaan perilaku, hukum memasuki segi kehidupan manusia, hukum memberikan suatu

kerangka bagi hubungan-hubungan yang dilakukan oleh anggota-anggota masyarakat antara yang satu terhadap yang lain. Hukum merupakan "*the normative life of the state and its citizens*" Hukum memberikan suatu jalan untuk mengadakan diagnosis tentang krisis sosial. Seorang sarjana hukum bukan hanya sebagai seorang pembentuk undang-undang, tetapi perhatiannya juga terkait perubahan-perubahan sosial seperti halnya seorang ahli politik, ahli ekonomi atau ahli sosiologi. Hukum menentukan serta mengatur bagaimana hubungan itu dilakukan dan bagaimana akibatnya. Hukum memberikan pedoman bagi perilaku yang dilarang, yang diizinkan/diharuskan. Penormaan ini dilakukan melalui pembuatan kerangka umum suatu perbuatan yang diwujudkan dalam berbagai bentuk peraturan perundang-undangan yang ada.

Kesadaran bahwa hukum bersifat instrumental menjadikan hukum saat ini secara aktif dan sadar digunakan untuk mewujudkan tujuan tertentu. Perkembangan wawasan ini tidak terlepas dari perkembangan kehidupan sosial yang nyata. Hukum merupakan suatu kebutuhan yang melekat pada kehidupan sosial itu sendiri yaitu melayani anggota-anggota masyarakat * seperti mengalokasikan kekuasaan, mendistribusikan sumber daya, melindungi

kepentingan anggota masyarakat. Karena itu, hukum semakin penting peranannya sebagai sarana untuk mewujudkan kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah, hukum sebagai instrumen/sarana implementasi kebijaksanaan Pemerintah.

Keadaan ini mencerminkan fungsi hukum untuk menjamin tercapainya tujuan-tujuan yang telah ditetapkan oleh masyarakat. Hukum memberikan jaminan keteraturan dalam cara-cara bagaimana hubungan-hubungan antara orang yang satu dengan yang lain dijalankan di dalam masyarakat, yaitu dengan menegaskan prosedur yang harus dilalui. Hukum juga memiliki nilai kepastian hukum yang disertai dengan kekuatan yang memaksa (sanksi).

Ketentuan Pasal 78 ayat (1) Undang-undang paten tidaklah jelas dan tegas bagaimana caranya pemerintah akan merealisasikan ketentuan pelaksanaannya pasal tersebut dalam Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksanaan Undang-undang paten mengenai lisensi atas paten. Dengan merujuk/belajar/menarik pengalaman dari negara-negara lain yang mempunyai peraturan perjanjian lisensi paten atau perjanjian mengenai lisensi paten mengenai alih teknologi perlu diberikan pelajaran dan jika memungkinkan juga dapat ditetapkan di Indonesia sebagai peraturan pelaksanaan Pasal 78 ayat (1) yang disesuaikan

dengan kondisi di Indonesia. Hal yang paling penting untuk perkembangan industri dari ekonomi yang harus dicantumkan dalam Peraturan Pemerintah adalah bahwa penerima lisensi dalam negeri harus dilindungi. Namun, tidak dilakukan secara berlebihan agar dapat menghindari pembatasan-pembatasan, lebih-lebih yang mengarah ke monopoli.

Paten juga merupakan hak khusus yang diberikan oleh negara kepada penemu atas hasil penemuannya di bidang teknologi untuk selama waktu tertentu mengoperasikan sendiri penemuannya itu, atau dapat memberikan persetujuannya kepada orang lain untuk melaksanakannya. Permintaan paten dianggap diajukan pada tanggal penerimaan surat permintaan paten oleh kantor Paten atau dicatat secara khusus oleh Kantor Paten. Permintaan yang telah memenuhi syarat diumumkan oleh Kantor paten dengan menempatkan pada papan pengumuman yang khusus disediakan untuk itu. Dan menempatkannya dalam berita resmi paten.

Dengan kemungkinan akan adanya proses pengalihan teknologi melalui direct invesment dan indirect invesment, yang bisa dialihkan adalah baik teknologi yang sudah dipatenkan maupun teknologi yang tidak atau belum dipatenkan. Yang dapat dialihkan melalui proses direct invesment adalah teknologi dalam bentuk paten.

Sedangkan alih teknologi melalui proses indirect investment adalah teknologi yang diperoleh dalam bentuk lisensi. Dengan demikian, proses terjadinya alih teknologi adalah melalui paten.

Di dalam undang-undang paten (Undang-Undang Nomor 6 tahun 1989) sebagaimana yang telah diperbaharui dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 1997 dan terakhir diubah dengan UU nomor 14 tahun 2001 mengandung dasar pemikiran filosofis yang diperlukan dalam rangka penemuan dan pengembangan teknologi dalam kaitannya dengan pembangunan ekonomi dalam rangka mengantisipasi perdagangan global.

Dasar pemikiran memungkinkan pemerintah untuk berperan aktif dalam pengaturan mengenai hak atas kekayaan intelektual, termasuk paten dengan ditempatkannya fungsi paten tidak semata-mata untuk perlindungan terhadap penemuan, melainkan juga dalam rangka mewujudkan iklim yang lebih baik bagi timbul dan berkembangnya kegiatan penelitian yang menghasilkan penemuan dan pengembangan teknologi yang sangat diperlukan dalam pembangunan nasional.

Peranan pemerintah terhadap paten tampak dari kewajiban untuk mendaftarkan temuannya di Kantor Paten, juga harus didaftar dalam Daftar Umum Paten. Di samping

itu, juga dilakukan penelusuran dan pemeriksaan terhadap permintaan akan paten oleh pemeriksa paten yang terdiri dari pejabat ahli yang diangkat oleh Menteri atau kantor paten intra-perusahaan. Menteri mempunyai tanggung jawab dalam pembinaan paten. Keikutsertaannya ini merupakan kontrol dari pemerintah atas paten sebagai sarana proses alih teknologi.

Bila hal tersebut dikaitkan dengan ketentuan yang mewajibkan pendaftaran apten dengan prinsip kebebasan berkontrak yang merupakan salah satu prinsip dalam perjanjian yang selama ini sudah dipelihara sebagai tradisi hukum barat, campur tangan pemerintah (melalui pendaftaran paten) akan dihadapkan dengan prinsip kebebasan berkontrak. Dalam praktik pelaksanaannya, lisensor (pemberi lisensi) tidak mau dicampuri oleh pemerintah dan tidak mau melepaskan kerahasiaan teknologinya. Hal ini dapat mengerti sebab semuanya itu ada kaitannya dengan orientasinya pada keuntungan (*profit oriented*). Sehubungan dengan hal itu ketentuan pasal 78 ayat 92) Undang-undang tentang paten merupakan jalan keluar solusinya.

Dalam perjanjian alih teknologi mengandung banyak aspek yang terkait, diantaranya adalah hak dan kewajiban para pihak yang melaksanakan perjanjian serta campur

tangan negara. Dalam campur tanagn negara dengan sendirinya yang penting ialah memperhatikan kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah baik sekarang maupun di waktu yang akan datang.

Pengadaan informasi yangs sesuai dan tepat serta kemampuan untuk menafsirkan dan memanfaatkannya dalam proses pengambilan keputusan kebijaksanaan semakin dirasakan penting. Hal ini earat kaitannya dengan pelbagai kompleksitas yang semakin terasa sebagai akibat , dan juga sebagai penyebab dari perkembangan teknologi yang makin pesat dalam dekade akhir-akhir ini.

Perkembangan teknologi di satu pihak telah meningkatkan kemampuan manusia untuk mengatasi berbagai keterbatasan dalam lingkup ruang dan waktu, yang pada gilirannya semakin mampu memecahkan masalah-masalah baru yang timbul dalam masyarakat. Di lain pihak perkembangan teknologi itu sendiri dapat menimbulkan masalah-masalah baru yang pemecahannya membutuhkan perkembangan-perkembangan baru di bidang teknologi. Perkembangan bidang teknologi yang tampak sementara ini ialah sebagai proses modernisasi yang terdapat dalam segala aspek kehidupan telah memasuki proses dalam perumusan kebijaksanaan. Teknologi di bidang media dan elektronika yang makin maju membuat masyarakat mampu secara langsung

ikut mengawasi jalannya pemerintahan dan mengikuti proses perumusan kebijaksanaan. Hal ini membawa konsekuensi pada proses perumusan itu sendiri dan dampak yang ditimbulkan oleh suatu kebijaksanaan.

Teknologi maju di satu pihak memberi banyak kemudahan untuk mendapatkan masukan informasi yang luas dan cepat, tetapi di lain pihak memberi risiko yang lebih besar terhadap kekeliruan dalam membuat kebijaksanaan. Kebijaksanaan yang keliru dapat menimbulkan dampak yang luas dalam waktu yang amat singkat.

Di samping itu, kemampuan manusia untuk menjangkau wawasan yang amat luas dalam waktu yang amat cepat tersebut telah meningkatkan interaksi dalam berbagai aspek kehidupan secara meluas. Akibatnya, dewasa ini susah dibayangkan adanya suatu kegiatan yang secara eksklusif hanya termasuk dalam salah satu aspek kehidupan dan mampu ditangani melalui satu dimensi ilmu saja. Tidak ada satu kegiatan yang dapat digolongkan sebagai kegiatan ekonomi, bisa dipisahkannya dari aspek politik, budaya, kesehatan dan sebagainya. Begitu pula sebaliknya, keadaan yang demikian ini menyebabkan adanya pengaruh antar-bidang dan berlangsung amat cepat terhadap sesuatu kebijaksanaan. Perubahan kebijaksanaan

dalam salah satu bidang kehidupan di salah satu benua hari ini dapat segera memberi pengaruh dalam bidang kehidupan yang berbeda di benua lain. Pengertian perjanjian alih teknologi dapat ditinjau dari berbagai sudut. Dari sudut hukum, perjanjian alih teknologi merupakan suatu kontrak atau perjanjian kerja sama antara pemberi teknologi dan penerima teknologi dalam bentuk standar. Sedangkan di mata pemerintah dan masyarakat umum, perjanjian alih teknologi dapat dipandang sebagai suatu hubungan kemitrausahaan antara penerima dan pemberi teknologi.

Masalah alih teknologi merupakan masalah di antara negara-negara maju yang mempunyai teknologi tinggi/maju dengan kemampuan dan fasilitas-fasilitas lain, dengan negara-negara berkembang yang memerlukan dalam rangka mengembangkan negaranya.

Perjanjian alih teknologi sering dianggap sebagai sinonim dengan perjanjian kerjasama luar negara yang objek utamanya adalah alih teknologi. Namun apa yang merupakan alih teknologi masih mempunyai pengertian yang bervariasi dari negara yang satu ke negara yang lain. Indonesia tampaknya belum mempunyai strategi nasional untuk alih teknologi. Akan tetapi, setelah Undang-undang Paten diundangkan mau tidak mau Indonesia harus

mempunyai strategi untuk memperoleh alih teknologi, pengumpulan data teknologi yang diperlukan untuk mendorong kemampuan di pasar persaingan internasional, mengundang peraturan untuk menunjang penegakan Undang-undang paten. Penegakan kebijakan dan Undang-undang Paten alih teknologi di beberapa negara berkembang dianggap tidak menguntungkan karena dengan melihat realitas yang berbeda dari apa yang tadinya diharapkan. Namun, paten perlu diberi bantuan yang layak bagi perbaikan industri di negara berkembang. Pada kenyataannya, negara berkembang harus menghadapi pembatasan-pembatasan dan kendala-kendala jika yang diinginkan adalah paten teknologi yang tidak dapat dihindari. Hal ini karena sebagian besar pemilik paten adalah negara-negara maju yang mempunyai posisi kuat dalam bidang modal teknologi dan kekuatan tawar menawar. Sekalipun para pemilik paten teknologi mendaftarkan paten mereka di negara-negara berkembang, hanya sedikit paten yang dilaksanakan oleh pemilik paten itu sendiri berdasarkan perjanjian lisensi.

Permasalahan lain yang harus diselesaikan oleh Indonesia adalah teknologi, prasarana, dan tata cara lisensi yang dapat digunakan di samping pengaturan lainnya untuk keberhasilan alih teknologi. Tanpa aturan-

aturan itu, pemerintah tidak dapat menggunakan kekuatannya untuk memaksa investor asing supaya mentransfer teknologinya. Para mitra Indonesia tidak dapat menghindar dari pembatasan-pembatasan yang diadakan oleh mitra-mitra asing yang memiliki teknologi dan berslogan "terima atau tinggalkan (take it or leave it)". Setelah Undang-undang Paten diberlakukan, posisi penerima lisensi dalam negeri harus diubah. Dominasi pemberi lisensi yang mempunyai teknologi paten atau teknologi yang harus dikurangi, setidaknya posisi penerima lisensi dalam negeri harus disejajarkan dengan pemberi lisensi. Posisi monopoli dimana pemberi lisensi dapat menahan atau memaksa penerima lisensi melalui perjanjian lisensi yang tidak sehat, seperti dicantumkannya klausula pengikatan (*tie-in*), klausula pemberian kembali (*grant-back*), lisensi paket, pembayaran royalti setelah paten berakhir dapat dihindarkan. Kantor paten mempunyai wewenang untuk memberikan bantuan kepada setiap perjanjian lisensi paten ataupun yang bertentangan dengan pasal 78 ayat (1), dan melalui kantor paten inilah alih teknologi dapat ditingkatkan dan segala pengekanan atau hambatan perjanjian lisensi paten dapat dihindari. Selain itu, peranan Kantor paten seharusnya tidak menolak atau

mengizinkan, tetapi memberikan nasihat kepada penerima lisensi dalam negeri bila ia menghadapi posisi yang tidak seimbang dalam perjanjian lisensi paten. Sangat disayangkan ketentuan pasal ini masih harus dijabarkan lebih lanjut dalam peraturan pemerintah mengenai lisensi paten. Baru setelah peraturan pemerintah ini terbit permasalahan mengenai paten alih teknologi yang tidak dipatenkan dapat diselesaikan.

Sesuai dengan perjanjian lisensi paten pada umumnya pemberi lisensi akan bersedia atas permintaan penerima lisensi untuk membantu berkonsultasi dan bekerja sama dengan tenaga teknis dari penerima lisensi mengenai rancang bangun, rekayasa, manufacturing, penelitian dan pelayanan terhadap produk-produk yang dilisensikan. Biasanya penerima lisensi akan membayar gaji, biaya hidup dan biaya perjalanan para teknisi tersebut selama mereka ditugaskan di pabrik dan kantor-kantor penerima lisensi. Selain daripada itu, pemberi lisensi wajib membantu penerima lisensi untuk mempertahankan kualitas atau mutu produk yang sama seperti produk dari pemberi lisensi. Masalahnya bagaimana kalau pemberi lisensi atau pemilik paten mengingkari faktor-faktor tersebut di atas, dengan dalih bahwa tidak ada peraturan pelaksanaannya yang menyuruh untuk bantuan teknik atau

alih teknologi atau rincian persetujuan karena lisensi paten itu sendiri tidak memberikan klausula-klausula yang berkaitan dengan hal-hal tersebut di atas.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dengan melihat Pasal 78 Undang-undang paten Indonesia yang dikaitkan dengan perjanjian lisensi akan tampak perlunya peranan pemerintah. Peranan pemerintah di sini berarti bukan merupakan campur tangan pemerintahnya, tetapi peran pemerintah di sini diperlukan kalau terjadi sengketa yang akan menggunakan litigasi secara arbitrase sebagaimana yang termaktub dalam klausula perjanjiannya.

Pelaksanaan arbitrase ini akan membutuhkan pengadilan guna mendapatkan eksekusi. Inilah yang dimaksud dengan peran pemerintah.

Isue hukumnya adalah bagaimana kalau pihak yang dikalahkan tidak menghendaki atau tidak setuju atau tidak mau, maka akan terjadi eksekusi. Masalah ini bukannya tidak mungkin akan terjadi sengketa-sengketa internasional dalam pengalihan teknologi.

Pemerintah telah menetapkan Undang-undang pokok perindustrian Nomor 21 Tahun 1982 dan undang-undang paten, tetapi peraturan-peraturan pelaksanaannya untuk pasal 78 dan Undang-undang perindustrian belum ditetapkan. Dengan demikian, para pihak mempunyai

kebebasan untuk memilih bentuk perjanjian. Dalam hal ini dapat digunakan sebagai acuan pengalaman di negara-negara Amerika latin yang mempunyai kemiripan latar belakang mengenai pengaturan tentang alih teknologi.

Sebagai banding Undang-undang Paten yang dasar pemikirannya dilatar belakangi atau diilhami oleh pemikiran-pemikiran Brazil dan Meksiko dalm hal peraturan-peraturan mengenai Paten.

Meksiko dalam hal seleksi saluran untuk masuknya teknologi sangat tepat. Alternatif mekanisme dalam memperoleh teknologi dilakukan melalui 2 (dua) saluran yaitu:

1. Penanaman Modal Asing, baik dengan langsung melalui perusahaan cabang ataupun dengan mengadakan usaha patungan.
2. Perolehan lisensi teknologi, baik yang dipatenkan ataupun yang tidak, kepada perusahaan asing, cabang atau perusahaan yang tidak ada kaitannya dengan induknya.

Perjanjian lisensi dapat diselenggarakan secara langsung mengenai penanaman modal ataupun tanpa modal equity. Penanaman modal biasanya lebih disenangi terutama jika teknologinya dapat langsung disertakan, sehingga dapat mencegah ditiru oleh pesaingnya yang

potensial. Dalam pada itu telah diamati bahawa di negara berkembang, perlindungan yang efektif justru merupakan iklim yang dikehendaki oleh perusahaan asing, dalam mentransfer produksi ke negara berkembang sebagai sarana perlindungan apsar tempat produk mereka telah ada di dalamnya. Pengalaman di Amerika Latin yang juga dialami Meksiko adalah dalam bidang farmasi dan kimia sehingga terjadi peningkatan tarif yang cukup mengesankan. Motifasi lain yang mempengaruhi adalah kemudahan untuk melakukan usaha yang terus meningkat di negara berkembang, yang tingkat kecanggihannya ditentukan oleh R & D dan biaya tetap dari kegiatan operasional perusahaan.

Dari uraian tersebut di atas, penetapan harga teknologi menjadi faktor yang ikut menentukan. Disini manajer perusahaan asing/internasional sebagai pemberi lisensi mempertimbangkan:

1. Biaya untuk pembangunan teknologi atau paten,
2. Biaya untuk memelihara teknologi,
3. Biaya yang mungkin timbul untuk penyempurnaan,
4. Prospek untuk perbaikan dan penggantian dari temuan teknologi.

Dari penerima lisensi mempertimbangkan:

UPT-PUSTAKA-ORDIP

1. Potensi keuntungan yang akan diperoleh,
2. Kemungkinan biaya yang timbul untuk pengembangannya pada jenis teknologi yang dikehendaki.

Perjanjian lisensi merupakan kontrak pemberian teknologi untuk menggunakan hak proses dengan imbalan. Dalam banyak kasus perjanjian lisensi termasuk di dalamnya merek dagang and nama merek. Walaupun pada dasarnya perjanjian lisensi membuka kesempatan penggunaan teknologi, kenyataannya tidak ada jaminan untuk melawan kekuatan monopoli dari pihak penemu teknologi. Pembatasan-pembatasan ini merupakan pelembagaan monopoli yang memberikan keuntungan bagi teknologi aslinya. Dengan menyadari hal tersebut di atas dan menyadari kelemahan pihak negara berkembang dalam bidang ilmu dan teknologi, kekeuatan berunding dalam membeli atau memperoleh lisensi teknologi perlu diperhatikan.

Dengan menyadari hal tersebut, dalam klausula perjanjian alih teknologi perlu memperhatikan:

1. Pembatasan eksport kesemua negara atau daerah tertentu,
2. Kewajiban untuk membeli bahan mentah setengah jadi atau barang modal dan peralatan dari pihak pemberi lisensi,

3. Pengawasan oleh pemberi lisensi terhadap volume produksi dan penjualan, lokasi produksi dan transaksi dengan perusahaan lain,
4. Ketentuan yang mewajibkan penemuan lisensi untuk menyerahkan semua yang berkaitan dengan proses yang diberikan kepada pemberi lisensi,
5. Kewajiban untuk membelanjakan modal dalam jumlah tertentu untuk iklan bagi produk yang dihasilkan dalam lisensi itu,
6. Ketentuan yang mengizinkan pemberi lisensi untuk ikut campur dalam manajemen produksi, penetapan harga dan penanaman modal baru,
7. Ketentuan yang mewajibkan penerima lisensi untuk menutup/tidak membuka atau merahasiaan teknologi tersebut setelah kontrak berakhir,
8. Ketentuan untuk menyerahkan perkara dalam hal ada konflik ke Pengadilan di luar negeri.

Kedelapan ketentuan yang membatasi perjanjian alih teknologi ini tidak selalu berlangsung dalam paket, tetapi unsur-unsurnya perlu diperhatikan.

Apabila diperhatikan, perundang-undangan paten dan teknologi di negara tersebut (Meksiko) mengandung pemikiran filosofis yang diperlukan dalam rangka pembangunan ekonomi nasional negara tersebut. Pemikiran

ini terlihat pada dimungkinkannya pemerintah melakukan intervensi terhadap perjanjian-perjanjian alih teknologi dan ditempatkannya fungsi paten bukan semata-mata sebagai perlindungan terhadap penemuan, melainkan juga sebagai sarana untuk mendorong pembangunan ekonomi.

Sikap intervensionis pemerintah di negara itu terhadap perjanjian-perjanjian alih teknologi tercermin dari kewajiban untuk mendaftarkan perjanjian-perjanjian mengenai alih teknologi dan adanya kontrol pemerintah terhadap perjanjian intra perusahaan.

Tampaknya, dalam membuat peraturan-peraturan untuk mengembangkan usaha lisensi teknologi di Meksiko menggunakan pendekatan legislatif. Menurut Undang-undang tentang registrasi pengalihan teknologi, semua persetujuan lisensi lama dan baru harus didaftarkan pada suatu Kantor registrasi. Biasanya kantor pemerintahan yang dibentuk berdasarkan Undang-undang akan bekerja secara birokrasi yang akan menghambat kelancaran pekerjaan. Akan tetapi, terbukti bahwa badan tersebut memperlihatkan sikap yang sangat simpatik terhadap pengusaha nasional, sehingga suasana dalam perundingan antara badan pemerintah dan pengusaha nasional yang mempunyai persetujuan lisensi teknologi dari luar negeri cukup menyenangkan. Dalam negoisasi

tentang persyaratan pada persetujuan lisensi teknologi badan pemerintah ini membela dan memperhatikan kepentingan pengusaha nasional terhadap lisensor asing. Keadaan semacam ini tidak akan terjadi bila pejabat-pejabatnya tidak didorong oleh aspirasi yang tinggi.

Dalam pengalihan teknologi dikenal pemberi teknologi (supplier) dan penerima teknologi (recipient). Umumnya industri negara maju menjadi supplier dan industri negara berkembang menjadi recipient. Disinilah selalu terjadi praktik pengalihan teknologi yang tidak berkembang, sehingga selalu terjadi yang kuat mendominasi yang lemah, apalagi negara yang lemah belum mempunyai Undang-undang tentang alih teknologi. Persaingan antara supplier dan recipient sesamanya merupakan hubungan horinsontal.

Seperti yang telah dikemukakan pada Bab terdahulu, pengalihan teknologi terjadi dengan jalan/cara pemindahan hak paten dan melalui lisensi paten. Walaupun di suatu negara belum mempunyai Undang-undang paten, lisensi dapat dilakukan untuk pengalihan teknologi. Keadaan daya saing yang tidak seimbang antara perusahaan industri negara maju dan negara berkembang adalm pengalihan teknologi menyebabkan terjadinya kelompok 77 yang memilik negara berkembang dalam konferensi UNCTAD.

Yang diperjuangkan kelompok ini adalah agar jangan terjadi pembatasan usaha dagang dan industri (*restrictive business practices*), yang merugikan teknologi negara berkembang.

Pasal 78 Undang-undang Paten Indonesia merupakan peraturan perundang-undangan yang menetapkan ketentuan mengenai pedoman untuk mengawasi pembatasan praktik bisnis (*restrictive business practices*). Seyogyanya tidak boleh ada pembatasan dalam klausula setiap perjanjian lisensi. Dalam hal ini tidak diperbolehkan dalam setiap perjanjian lisensi yang merugikan perekonomian negara sehingga menghambat perkembangan kemampuan negara. Hal tersebut sesuai dengan *chapter IV International Code of Conduct UNCTAD (TD/B/C.6/1 Annex III, page W)*. Seyogyanya dikeluarkan peraturan penjabaran pasal 78 Undang-undang Paten Indonesia dalam bentuk peraturan pelaksanaannya.

Di dalam praktik, perjanjian lisensi terhadap penemuan yang mendapat paten Indonesia tidak selalu didaftar di Kantor Paten. Untuk menghindari adanya pembatalan oleh pengadilan, apabila terjadi sengketa biasanya para pihak sepakat untuk memilih penyelesaian sengketa melalui arbitrase oleh badan arbitrase asing. Apabila sengketa itu diselesaikan di pengadilan

Indonesia, bukannya tidak mungkin Pengadilan Indonesia akan menafsirkan bahwa perjanjian lisensi itu bertentangan dengan pasal 78 jo 79 Undang-undang Paten, dan oleh karenanya dibatalkan. Disamping itu apabila asalah satu pihak dalam perjanjian lisensi bukan subjek hukum Indonesia dapat saja para pihak sepakat untuk tidak memilih hukum Indonesia sebagai hukum yang berlaku pada perjanjian itu. Hal itu karena paten bukan merupakan barang tidak bergerak, sehingga tidak terkena oleh pasal 17 *Algemene Bepalingen Van Wetgeving (A.B)*, yang mewajibkan digunakannya Hukum Indonesia.

Akan tetapi, kemungkinan demikian sebenarnya dapat dicegah apabila pihak penerima lisensi dalam hal terjadi sengketa melalui arbitrase dikalahkan oleh arbitrase asing dan pihak Indonesia tidak mau membayar. Dalam menghadapi kasus semacam ini pihak lisensor yang dimenangkan oleh arbitrase asing tersebut dapat mengajukan permohonan eksekusi melalui pengadilan Indonesia. Pada saat inilah sebenarnya pengadilan Indonesia mempunyai kesempatan untuk menyatakan bahwa klausula penyelesaian secara arbitrase yang dikehendaki oleh para pihak tidak sah. Hal itu didasarkan pada Pasal V ayat(2) New York Convention 1958 yaitu tentang

Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards
yang berbunyi:

also be Recognition and enforcement of an arbitral
award may Refused if the competent authority in the
country where recognition and enforcement is sought
finds that:

- (a) The subject matter of the difference is not
capable of settlement by arbitration under
the law of the country; or
- (b) Recognition and enforcement of the award
would be contrary to the public policy of
that country.

Dengan Keppres Nomor 34 Tahun 1981, Indonesia telah
meratifikasi konvensi itu. Ini berarti bahwa dengan
berpegang kepada ketentuan Pasal V (2) Konvensi New
York itu, Pasal 68 jo. 79 Undang-undang Paten dapat
berfungsi sebagaimana diharapkan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bertitik tolak dari latar belakang masalah dan pengkajian yang dilakukan dalam bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Ada keterkaitan yang sangat erat antara perlindungan Paten dengan Penanaman Modal Asing. Keterkaitan tersebut dalam bentuk perlindungan hak paten dalam bentuk lisensi, franchise, melalui investasi modal asing, dan joint venture, yang lebih memberikan perlindungan hukum kepada investor, karena lisensinya diberikan oleh perusahaan diluar negeri kepada Investro asing.

Perlindungan Hukum Paten dan Investasi modal Asing merupakan kebutuhan semua pihak dan dalam rangka menghadapi era globalisasi secara menyeluruh termasuk di bidang Paten dan Penanaman Modal Asing dalam rangka menghasilkan sumber income bagi Pemerintah dan menghasilkan Barang dan jasa untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Adapun pertumbuhan Penanaman Modal Asing yang cukup meningkat pada saat belum adanya UU Paten lebih dipengaruhi oleh faktor politik maupun kondisi kepentingan yang menunjangnya. Setelah adanya UU paten lebih-lebih UU nomor 14 tahun 2001 dimana Indonesia masih diliputi suasana krisis multi dimensional menyebabkan Penanaman Modal Asing merosot dan hal tersebut tidak berkaitan dengan Perlindungan Paten.

2. Hambatan-hambatan yang timbul dalam perlindungan Hak Paten yang terkait Penanaman Modal Asing adalah sistem hukum Indonesia berikut produk hukum yang menyangkut Paten dan Penanaman Modal Asing kurang *up to date* dalam memenuhi kebutuhan serta Penegakan hukum yang kurang meyakinkan akibat dari sumber daya manusia para Penegak Hukum yang tidak memadai. Selain itu juga dipengaruhi oleh kondisi politik dan keamanan yang kurang mendukung pada saat ini membuat minat melakukan investasi menurun. Sedang pada masa orde Baru walau dari segi pengaturan Hak Paten masih kurang baik, namun karena didukung dengan sistem politik dan keamanan yang solid para investor asing tetap

berduyun-duyun datang menginvestasikan modalnya di Indonesia.

Sistem Lisensi yang diterapkan dan dipergunakan oleh Investor Asing dalam kegiatan investasinya itu merupakan suatu perlindungan hukum terhadap teknologi yang di Investasikannya di Indonesia. Karena Hak Paten dengan sistem lisensi itu merupakan bagian dari Saham Pihak Asing dalam Badan Hukum Perusahaan Penanaman Asing tersebut.

3. Langkah-langkah Yuridis yang ditempuh Indonesia di bidang Perlindungan Paten dalam rangka Penanaman Modal Asing adalah dengan mengakomodir ketentuan-ketentuan Internasional/TRIPs dan konvensi-konvensi Internasional dibidang Haki/HKI dalam bidang perlindungan Paten. Namun didalam hal operasionalisasi UU Paten dan UU PMA kurang dilengkapi dengan Peraturan Pelaksanaan lebih lanjut.

B. Saran-saran

1. Perlu dikembangkan lebih lanjut perlindungan Paten agar modal asing baik berupa devisa maupun teknologi dapat leluasa masuk ke Indonesia yang pada akhirnya menjadi salah satu modal penting pembangunan .
2. Perlunya perbaikan sistem hukum Indonesia yang modern serta pembinaan /peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam rangka penegakan hukum melalui pelatihan

profesional dan pengawasan menyeluruh pada setiap instansi terkait agar benar-benar melaksanakan penegakan hukum Paten yang menyangkut penilaian pihak investor asing dan dunia pada umumnya.

3. Perlu segera dibuat Beberapa UU maupun peraturan pelaksanaannya antara lain : UU penyempurnaan UU no. 1 tahun 1967. Juga UU yang mengatur mengenai lisensi yang mengandung pembatasan-pembatasan pemberian lisensi guna melindungi posisi penerima lisensi yang mempengaruhi keadaan ekonomi Indonesia dan juga ketentuan yang mewajibkan pendaftaran lisensi. Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan UU no. 14 tahun 2001 tentang Paten agar UU tersebut benar-benar dapat dijalankan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson A Ronald, *Business Law Principles and Cases*
Seventh Edition, South Western Publishing Co.
Cincinnati, Chicago, tanpa tahun.
- Bernt Hugenholtz, *Introduction to the law of Copyright,*
WIPO Training Course, Jakarta, 1995
- Butler, Henry, N, *Legal Environment of Business:*
Government regulation and Public Policy Analysis,
South Western Publishing co, 1987.
- Cornish, WR, *Intellectual Property: patents, Copyrights,*
Trade marks, and Allied Rights, Sweet and Maxwell,
London, 1989.
- Diephuis, *The Concept of Recognition, A short Historical*
Review and a Critical Analysis of the Main Provi-
Sions of the ERC Recognition Convention, Sijt Hoff
& Nordhoff International Publishers, Alpen aan de
Rijn, 1980.
- De Winter, *Himpunan Konvensi-konvensi Hukum Perdata*
Internasional Fakultas Hukum UI, Jakarta, tanpa
Tahun.
- Foster Frank H, Shook Robert, L, *Patents, Copyrights,*
And Trade Marks, John Wiley & Sons, Inc, New York,
1993.
- G Kartasapoetra dkk, *Manajemen Penanaman Modal Asing,*
PT, Bina Aksara 1985.
- Henkin Louis, at all, *International law, Cases and*
Materials American Case book Series, St Paul Minn,
West Publishing Co, 1980.
- I Nyoman Moena, *Menyongsong Berlakunya Undang-Undang NO.*
10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanaan Dalam Kaitannya
Dengan Perjanjian Internasional GATT, Kertas Kerja
Seminar, BPHN, Jakarta 6 maret 1996
- Karl F, Jorda, Jurgen Maruhn Teartse Schaper, *Roving*
Discussion on Copyright Infringement and Litigation,
Jakarta 1991.
- , *Roving Discussion on patent Infringement*
and Litigation, Jakarta 1991.
- Komar Kanta Atmadja, *Undang-Undang Perseroan Terbatas*
1995 dan implikasinya Terhadap Penanaman Modal

Asing, makalah seminar bandung 1995.

Mieke Komar Kanta Atmadja, at all, *Aspek Hukum Kerjasama Internasional (ASEAN) di Bidang Hak Milik Intelektual* Laporan Penelitian, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 1992.

-----, *Perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual di Bidang Penginderaan Jauh* Laporan Penelitian Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 1999.

Nobuyaki Yasada, *Corporation and Law in ASEAN Countries, Some Problems of ASEAN Corporation Law Institute Of developing Countries*, Tokyo, 1986.

Sunarjati Hartono, *Beberapa masalah Transnasional Dalam Penanaman Modal asing di Indonesia*, Binatjipta 1972

Oetojo Oesman, *Pengaruh dan Akibat Organisasi Perdagangan Dunia Terhadap Hukum Nasional Indonesia*, Pidato Pada Seminar badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta . 6 Maret 1996.

Ostry Sylvia & Michel Gestrin, *Foreign Direct Investment. Technology Transfer and The Innovation Network Model, Transnational Corporations. Vol.2 Number 3, United Nations Conference on Trade and Development, Division On Transnational Corporations and Investment, New York, 1993.*

Pearson, Hilary, Clifford Miller, *Commercial Exploitation Of Intellectual Property*, Blackstone Press, Limited, London, 1990.

Sri Soedewi Masjhoen Sofwan, *Hukum Perdata : Hukum Benda*, Penerbit Liberty Yogyakarta, 1974

Sudargo, *Pengantar Hukum Perdata Internasional* Penerbit Bina Cipta, Bandung 1986.

-----, *Segi-Segi Hukum Hak Milik Intelektual*, PT Eresco, bandung 1990.

-----, *Hukum Perdata Internasional Indonesia, Jilid III Bagian I*, Penerbit Alumni, Bandung 1981.

-----, *Hukum Dagang dan Arbitrase Internasional* Cetakan I Citra Aditya Bukti, Bandung 1991.

-----, *Hak Milik Intelektual Indonesia dan Perjanjian Internasional TRIPS-GATT Putaran Uru-Guay*, 1994, PT Citra Aditya Bukti, Bandung .

-----, *Indonesian Business Law* PT Citra Aditya
Bukti, Bandung 1995.

Sunaryati Hartono, *Beberapa masalah Transnasional dalam
Penanaman Modal Asing di Indonesia* Binacipta,
Bandung 1972.

Situs Aris, Adi Sasono, *Modal Aing, Beban Hutang Luar
Negeri Dan Ekonomi Indonesia*, Lembaga Studi
Pembangunan bekerjasama dengan Penerbitan UI,
Jakarta 1987.

Sumantoro, Dr, *Bunga Rampai Permasalahan Penanaman Modal
Dan pasar Modal/Problems of Investment in
Aquties and in Securities*, Binacipta 1984.

Soemitro Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum ,Gahlia
Indonesia ,Jakarta 1983.*

Soemitro Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan
yurimetri,Gahlia Indonesia ,Jakarta 1994.*

Vlas P, *Rechtspersonen in hot International Priva-
Trecht*, Kluwer Deventer, 1982.

WIPO, *Introduction to Patent law and Practice, The
Basic Concept*, WIPO Training manual, Geneva 1989.

WIPO, *Introduction to Trade Mark Law and Practice, The
Basic Concept*, Secoud Edition, Geneva 1993.

WIPO, *Protection Against Unfair Competition Analysis of
The Present World Situation*, Geneva 1994.

WIPO, *Beckground Reading material on Intellectual Prop-
Perty*, 1988

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang No. 1 tahun 1967 tentang PMA.

Undang-Undang No.6 tahun 1989 tentang Paten.

Undang-Undang No.13 tahun 1997 tentang Paten.

Undang-Undang No.14 tahun 2001 tentang Paten.